

**PONO
ROGO
HEBAT**



RENCANA KONTINGENSI BENCANA TANAH LONGSOR PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO

2023 - 2026



BUPATI PONOROGO
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI PONOROGO
NOMOR : 188.45/ **1336** /405.29/2023

TENTANG

RENCANA KONTINGENSI TANAH LONGSOR KABUPATEN PONOROGO
TAHUN 2023 - 2026

BUPATI PONOROGO,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk efektivitas dan kelancaran proses evakuasi pada saat kejadian bencana tanah longsor serta meminimalisir kerugian dalam bentuk korban jiwa dan harta benda, perlu menetapkan rencana kontingensi tanah longsor;
 - b. bahwa untuk memberikan acuan kepada pemangku kepentingan dalam penanggulangan bencana tanah longsor dan merespon kejadian bencana secara cepat tepat dan efektif perlu menetapkan rencana kontingensi tanah longsor;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Rencana Kontingensi Tanah Longsor Kabupaten Ponorogo Tahun 2023 - 2026.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2006 tentang Pedoman Umum Mitigasi Bencana;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyiapan Sarana dan Prasarana dalam Penanggulangan Bencana;
 7. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana;

8. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kontingensi Bencana;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 2 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ponorogo;
10. Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 22 Tahun 2011 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ponorogo.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Rencana Kontingensi Tanah Longsor Kabupaten Ponorogo Tahun 2023 – 2026.
- KEDUA : Rencana Kontingensi Tanah Longsor sebagaimana tersebut pada Diktum KESATU disusun dalam sebuah dokumen Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Dokumen Rencana Kontingensi sebagaimana tersebut pada Diktum KEDUA memuat :
- a. BAB I : Pendahuluan
 - b. BAB II : Situasi
 - c. BAB III : Tugas Pokok dan Fungsi Pokok Organisasi Komando Penanggulangan Darurat Bencana
 - d. BAB IV : Pelaksanaan
 - e. BAB V : Administrasi dan Logistik
 - f. BAB VI : Pengendalian
 - g. BAB VII : Rencana Tindak Lanjut
- KEEMPAT : Rencana Kontingensi tanah longsor ini menjadi pedoman kedaruratan bencana tanah longsor bagi semua pemangku kepentingan.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ponorogo

pada tanggal 27 DEC 2023

BUPATI PONOROGO,



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PONOROGO

NOMOR : 188.45/ **1336** /405.29/2023

TANGGAL **27 DEC 2023**

RENCANA KONTINGENSI TANAH LONGSOR KABUPATEN PONOROGO
TAHUN 2023 - 2026



**Rencana Kontingensi
Bencana Tanah Longsor
Pemerintah Daerah Kabupaten Ponorogo
Provinsi Jawa Timur**

Tahun 2023

DAFTAR ISTILAH DAN SINGKATAN

AMPL	: Air Minum dan Penyehatan Lingkungan
APBD	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
APBDes	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
ASN	: Aparat Sipil Negara
ATK	: Alat Tulis Kantor
BKD	: Badan Keuangan Daerah
BNPB	: Badan Nasional Penanggulangan Bencana
BPBD	: Badan Penanggulangan Bencana Daerah
BTT	: Belanja Tidak Terduga
BUD	: Bendahara Umum Daerah
CSO	: Civil Society Organization
CSR	: Corporate Social Responsibility
DISBUDPARPORA	: Dinas Kebudayaan Pariwisata Kepemudaan dan Olah Raga
DINKES	: Dinas Kesehatan
DINSOS	: Dinas Sosial
DLH	: Dinas Lingkungan Hidup
DMT	: Disaster Medical Team
DSP	: Dana Siap Pakai
FGD	: Focus Group Discussion
FORKOPIMDA	: Forum Koordinasi Pimpinan Daerah
HF	: High Frequency
HP	: Handphone
HT	: Handy Talky
HUMAS	: Hubungan Masyarakat
KMTP	: Koordinasi Manajemen Tempat Pengungsian
KODIM	: Komando Distrik Militer
LPG	: <i>Liquified Petroleum Gas</i>
MCK	: Mandi Cuci Kakus
NAKES	: Tenaga Kesehatan
NGO	: Non-Governmental Organization
OPD	: Organisasi Perangkat Daerah
ORARI	: Organisasi Radio Amatir Republik Indonesia
P3K	: Pertolongan Pertama pada Kecelakaan
PB	: Penanggulangan Bencana
PDB	: Penanganan Darurat Bencana
PIK-R	: Pusat Informasi dan Konseling Remaja
PKB	: Penanggulangan Kedaruratan Bencana
PLN	: Perusahaan Listrik Negara
PMD	: Pemberdayaan Masyarakat Desa
PMI	: Palang Merah Indonesia
PNF	: Pendidikan Nonformal
POLRES	: Kepolisian Resor
POLRI	: Kepolisian Republik Indonesia
POKDARWIS	: Kelompok Sadar Wisata
PSP	: <i>Psychological Support Program</i>

RAPI	: Radio Antar Penduduk Indonesia
RENKON	: Rencana Kontingensi
RSUD	: Rumah Sakit Umum Daerah
RX	: <i>Receiver</i>
SAR	: <i>Search and Rescue</i>
SATPOL PP	: Satuan Polisi Pamong Praja
SD	: Sekolah Dasar
SDM	: Sumber Daya Manusia
Shelter	: Proses mendampingi warga terdampak dalam menyediakan tempat berlindung yang layak.
SKPDB	: Sistem Komando Penanggulangan Darurat Bencana
SOP	: <i>Standard Operating Procedure</i>
SPM	: Standar Pelayanan Minimal
SSB	: <i>Single Side Band</i>
TAPD	: Tim Anggaran Pemerintah Daerah
TDB	: Tanggap Darurat Bencana
TNI	: Tentara Nasional Indonesia
TX	: <i>Transmitter</i>
UPT	: Unit Pengelola Teknis
VHF	: <i>Very High Frequency</i>

DAFTAR ISI

DAFTAR ISTILAH DAN SINGKATAN	ii
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	3
1.3. Maksud dan Tujuan	5
1.4. Ruang Lingkup	6
1.5. Kebijakan dan Strategi	8
1.6. Pendekatan, Metode, dan Tahapan Proses	9
1.7. Umpan Balik	10
1.8. Masa Berlaku dan Pemutakhiran	10
1.9. Konversi Rencana Kontingensi menjadi Rencana Operasi	11
BAB II. SITUASI	12
2.1. Karakteristik Bahaya	12
2.2. Skenario Kejadian	13
2.3. Asumsi Dampak	14
BAB III. TUGAS POKOK DAN FUNGSI POKOK ORGANISASI KOMANDO PENANGGULANGAN DARURAT BENCANA	42
3.1. Tugas Pokok	42
3.2. Sasaran	43
BAB IV PELAKSANAAN	44
4.1. Konsep Operasi dan Sasaran Tindakan	44
4.2. Struktur Organisasi Komando	52
4.3. Fungsi dan Kegiatan Pokok	53
4.4. Tugas-Tugas Bidang	54
4.5. Instruksi Koordinasi	69
BAB V ADMINISTRASI DAN LOGISTIK	71
5.1. Administrasi	71
5.2. Logistik	73
BAB VI PENGENDALIAN	74
6.1. Komando	74
6.2. Kendali	75
6.3. Koordinasi	75
6.4. Komunikasi	75
6.5. Informasi	75
BAB VII RENCANA TINDAK LANJUT	77
7.1. Komitmen Para Pihak dalam Penanganan Kedaruratan dan Terhadap Rencana Kontingensi Tanah Longsor	77
7.2. Penyiapan Kesiapsiagaan	84
LAMPIRAN	86
Lampiran 1. Konversi Rencana Kontingensi menjadi Rencana Operasi: Penyusunan Rencana Operasi Penanganan Darurat	86
Lampiran 3. Susunan Pelaksana Tugas Struktur Komando Penanganan Darurat Bencana	90
Lampiran 4. Jaring Komunikasi	93
Lampiran 5. Estimasi Ketersediaan dan Kebutuhan Sumberdaya	94
Lampiran 6. Album Peta	139
Lampiran 7. Peringatan Dini dan Status Tanggap Darurat	140
Lampiran 9. SOP / Prosedur Tetap	145

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki kondisi geografis, geologi, morfologi, hidrologi, dan klimatologi yang rawan terhadap kejadian bencana. Adanya 4 lempeng tektonik yang mengapit wilayah Indonesia (*Indian-Australian Plate, Eurasian Plate, Philippine Plate, Pacific Plate*) serta beberapa patahan yang melalui wilayah Indonesia, menjadikan Indonesia rawan terhadap bencana Tanah Longsor. Banyaknya gunungapi yang masih aktif, juga menjadikan wilayah Indonesia memiliki ancaman kejadian bencana erupsi vulkanik dan gempa. Aspek demografi serta pola pemanfaatan ruang dan sumber daya alam yang terjadi saat ini, juga memberikan pengaruh terhadap potensi bencana seperti banjir, kekeringan, tanah longsor, hingga kebakaran hutan dan lahan.

Kabupaten Ponorogo adalah sebuah kabupaten di Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Pada periode 10 tahun terakhir (2008-2017), terdapat lima jenis bencana alam yang terjadi di Kabupaten Ponorogo, yaitu tanah longsor, banjir, puting beliung, kekeringan, kebakaran hutan dan lahan. Di Kabupaten Ponorogo selama 10 tahun terakhir terjadi bencana alam sebanyak 155 kejadian. Kejadian yang paling banyak adalah tanah longsor (85 kejadian), dampak yang ditimbulkan bencana tanah longsor telah menyebabkan 31 orang meninggal atau hilang, 24 orang luka-luka, serta 1.349 orang mengungsi/menderita. Bencana banjir (29 kejadian), yang menyebabkan 4 orang meninggal/hilang dan 1.248 orang mengungsi/menderita, serta menyebabkan 2.073 rumah terendam. Bencana angin puting beliung (21 kejadian), kebakaran hutan dan lahan (14 kejadian), kekeringan (6 kejadian).

Berdasarkan kejadian sejarah data DIBI Kabupaten Ponorogo tahun 2004-2020 terjadi 166 kali bencana tanah longsor yang menyebabkan penderitaan dan kerugian harta benda. Kawasan yang memiliki ancaman bencana tanah longsor di Kabupaten Ponorogo adalah wilayah yang memiliki tingkat erosi

tinggi, tanah-tanah gundul di kawasan hutan lindung, curah hujan tinggi serta kawasan yang mempunyai kelerengan tanah lebih dari 40 %. Gerakan tanah di Kabupaten Ponorogo lebih banyak terjadi pada daerah dengan penggunaan lahan hutan sejenis dan hutan lebat. Kondisi air hujan merupakan faktor penting yang dapat memicu terjadinya gerakan tanah terutama curah hujan. Air permukaan yang berasal dari curah hujan, sebagian akan meresap ke dalam tanah/batuan melalui pori-pori tanah atau retakan-retakan yang terdapat pada tanah dan sebagian lagi akan mengalir di atas permukaan tanah. Seiring dengan meningkatnya bobot massa tanah, maka kuat geser tanah akan menurun. Keadaan demikian apabila ditunjang oleh faktor lain, misalnya kemiringan lereng yang terjal dan/atau keadaan tata guna lahan yang kurang sesuai, maka akan mudah terjadi gerakan tanah, sehingga dapat disimpulkan bahwa curah hujan di suatu daerah dapat memicu terjadinya gerakan tanah.

Berdasarkan hasil Kajian Risiko Bencana Kabupaten Ponorogo 2019-2023 didukung dengan data kejadian 2012-2022 serta FGD Rencana Kontingensi Bencana Tanah Longsor tahun 2023 maka terdapat 9 Kecamatan yang berpotensi bencana tanah longsor yaitu: Ngrayun, Pudak, Pulung, Badegan, Sambit, Sawoo, Slahung, Sooko, dan Ngebel. Sehingga berdasarkan hasil kajian tersebut maka dokumen berkaitan dengan rencana kontingensi penanggulangan bencana tanah longsor di Kabupaten Ponorogo perlu disusun. Hal tersebut sesuai dengan Amanah Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana Bab III Pasal (6) yang mengamanatkan bahwa tanggung jawab pemerintah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi: (1) pengurangan risiko bencana dan pemaduan pengurangan risiko bencana dengan program pembangunan, (2) perlindungan masyarakat dari dampak bencana, (3) penjaminan pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana secara adil dan sesuai dengan standar pelayanan minimum, (4) pemulihan kondisi dari dampak bencana, (5) pengalokasian anggaran penanggulangan bencana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang memadai, (6) pengalokasian anggaran penanggulangan bencana dalam bentuk dana siap pakai, dan (7)

pemeliharaan arsip/ dokumen otentik dan kredibel dari ancaman dan dampak bencana. Selain itu, rencana kontingensi tanah longsor di Ponorogo menjadi mandat yang harus ada, mengingat penegasan Pemerintah pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No 101 Tahun 2018 yang menekankan bahwa Rencana Kontingensi sebagai urusan wajib Pemerintah Daerah khususnya di wilayah Kabupaten Ponorogo dalam upaya pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang merupakan prasyarat bagi kegiatan penanggulangan bencana secara umum baik pada tataran pencegahan, kesiapsiagaan dan evakuasi korban bencana.

Pada implementasinya dalam menanggulangi bencana tidak hanya menjadi tugas dan tanggung jawab pemerintah saja, melainkan juga menjadi tanggung jawab bersama semua unsur mulai dari kepolisian, militer, lembaga swadaya (LSM), Pihak Swasta, Akademisi dan Media yang berdasarkan pada prinsip pentahelix yang ada. Strategi dalam menanggulangi bencana tanah longsor secara terpadu memerlukan konsensus bersama dari seluruh pemangku kepentingan, yang dijelaskan lebih rinci dalam Rencana Kontingensi Bencana Tanah Longsor di Wilayah Ponorogo. Diharapkan dengan adanya Rencana Kontingensi Ponorogo di Kabupaten Ponorogo, akan tercipta mekanisme proteksi yang memberikan rasa aman kepada seluruh masyarakat di Kabupaten Ponorogo.

1.2. Landasan Hukum

Pada penyusunan dokumen Rencana Kontingensi Bencana Tanah Longsor Kabupaten Ponorogo ini menggunakan Landasan operasional hukum dan standar sebagai pedoman. Adapun landasan hukum yang digunakan adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana.
3. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
5. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan.

6. Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk penanganan Pandemi *corona virus disease 2019* (COVID-19) dan/ atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/ atau Stabilitas Sistem Keuangan.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.
9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana.
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
11. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah.
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
13. Peraturan Kasad Nomor Perkasad/91/XI/2009 tanggal 30 November 2009 tentang bantuan TNI pada PEMDA dalam penanggulangan bencana alam di darat.
14. Peraturan Kasad Nomor Perkasad/96/XI/2009 tanggal 30 Nopember 2009 tentang pedoman penanggulangan bencana di darat.
15. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2009 tanggal 22 Desember 2009 tentang Manajemen Penanggulangan Bencana.
16. Peraturan Kepala BNPB Nomor 06 Tahun 2008 tentang Pedoman Penggunaan Dana Siap Pakai.
17. Peraturan Kepala BNPB Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
18. Peraturan Kepala BNPB Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pedoman Komando Tanggap Darurat Bencana.
19. Peraturan Kepala BNPB Nomor 4 Tahun 2009 tentang Prosedur Bantuan Logistik.

20. Peraturan Kepala BNPB Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pedoman Pergudangan.
21. Peraturan Kepala BNPB Nomor 9 Tahun 2009 tentang Prosedur Tetap Tim Reaksi Cepat.
22. Peraturan Kepala BNPB Nomor 6 Tahun 2011 tentang Standardisasi Data Bencana.
23. Peraturan Kepala BNPB Nomor 6.A Tahun 2011 tentang Pedoman Penggunaan Dana Siap Pakai Pada Status Keadaan Darurat Bencana.
24. Peraturan Kepala BNPB Nomor 14 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pengajuan dan Pengelolaan Dana Bantuan Sosial Berpola Hibah Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana.
25. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 2 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ponorogo.
26. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 01 tahun 2012 tentang RTRW Kabupaten Ponorogo.

1.3. Maksud dan Tujuan

Adapun penyusunan rencana kontingensi ini diharapkan bisa dijadikan landasan strategis, operasional, dan pedoman dalam menangani bencana tanah longsor di Kabupaten Ponorogo. Sedangkan tujuan praktis penyusunan rencana darurat bencana longsor Kabupaten Ponorogo adalah terkait dengan ketersediaan dokumen antara lain karakteristik bahaya, skenario kejadian, asumsi dampak, organisasi kepemimpinan, manajemen dan logistik, pengendalian dan keterlibatan seluruh pihak dalam manajemen dan kesiapsiagaan darurat. Selain itu, dokumen ini juga menjadi landasan dan pedoman dalam upaya mobilisasi sumber daya seluruh pemangku kepentingan yang terlibat dalam penanganan darurat tanah longsor di wilayah Kabupaten Ponorogo.

1.4. Ruang Lingkup

A. Lingkup Bahaya dan Risiko Bencana

Lingkup bahaya dan risiko bencana merupakan jenis bahaya/ ancaman bencana yang disusun perencanaan kontingensi. Lingkup bahaya dan risiko bencana di Kabupaten Ponorogo dapat dijabarkan sebagai berikut.

Dilihat dari topografinya Kabupaten Ponorogo terletak pada ketinggian antara 25 - 1.000 m di atas permukaan laut, dengan ketinggian terbanyak berada di antara 100 - 500 m di atas permukaan laut. Kondisi lahan bertopografi datar sampai berbukit. Lereng adalah sudut yang dibentuk oleh permukaan tanah dengan bidang horizontal yang dinyatakan dalam persen (%). Kondisi kemiringan di wilayah Kabupaten Ponorogo cukup beragam dari kemiringan yang kriteria datar (0 - 2 %) hingga kemiringan yang tajam (di atas 40%).

Bentuk lahan Kabupaten Ponorogo bervariasi mulai daratan rendah sampai pegunungan, sebagian besar wilayah Kabupaten Ponorogo yaitu 79 % terletak di ketinggian kurang dari 500 m di atas permukaan laut, 14,4% berada di antara 500 hingga 700 m di atas permukaan laut dan sisanya 5,9% berada pada ketinggian di atas 700 m. Kabupaten Ponorogo dibagi menjadi 2 (dua) sub area, yaitu area dataran tinggi yang meliputi Kecamatan Ngrayun, Sawoo, Pudak, Sooko, Pulung, dan Ngebel sisanya merupakan dataran rendah. Berdasarkan ketinggian wilayah dari permukaan laut dapat dikelompokkan 241 desa berada pada ketinggian dibawah 500 m diatas permukaan laut, 44 desa berada pada 500-700 m diatas permukaan laut; dan 18 desa berada di ketinggian lebih dari 700 m diatas permukaan laut.

Secara fisiografi Kabupaten Ponorogo dan sekitarnya terletak pada jalur pegunungan selatan Jawa Timur dan termasuk pada formasi Andisit tua (van Bemmelen, 1949) Daerah ini didominasi oleh batuan beku baik intrusi maupun ekstrusi yang bersifat intermediate sampai basa. Satuan batuan alluvial kuartar adalah Kompleks Lawu. Struktur batuan yang berkembang adalah lipatan, sesar, dan kekar. Struktur lipatan umumnya mempunyai sumbu lipatan relatif arah barat-timur dan baratdaya- timurlaut, dan berkembang di bagian barat (*Sampurno dan Samodro 1997*). Sesar

umumnya sesar turun dan geser, dengan arah baratlaut- tenggara dan timurlaut, sedangkan sesar arah barat-timur dan utara- selatan umumnya sesar normal.

Berdasarkan kondisi topografi dan fisiografi tersebut maka lingkup wilayah risiko adalah longsor. Tanah longsor adalah perpindahan material pembentuk lereng (berupa batuan, bahan rombakan, tanah, atau campuran berbagai material tersebut) yang bergerak ke bawah atau keluar lereng. Proses terjadinya tanah longsor diawali dengan keberadaan air yang meresap ke dalam tanah sehingga menambah bobot tanah. Jika air tersebut menembus sampai ke lapisan tanah kedap air yang berperan sebagai bidang gelincir, maka tanah menjadi licin dan tanah pelapukan di atasnya akan bergerak mengikuti lereng dan keluar lereng. Kondisi inilah yang disebut tanah longsor.

B. LINGKUP WILAYAH RISIKO

Lingkup bahaya dan risiko bencana Tanah Longsor di Kabupaten Ponorogo meliputi wilayah 9 kecamatan. Kecamatannya yaitu Ngrayun, Pudak, Pulung, Badegan, Sambit, Sawoo, Slahung, Sooko, dan Ngebel.

C. LINGKUP PELAKSANA AKSI

Ruang lingkup rencana kontingensi ini mencakup hal-hal yang perlu dilaksanakan untuk menghadapi kemungkinan terjadinya peristiwa dan situasi darurat bencana longsor di wilayah Kabupaten Ponorogo. Lingkup pelaksana aksi dalam rangka penyusunan rencana kontingensi bencana tanah longsor di Kabupaten Ponorogo melalui tahap-tahap sebagai berikut:

- a. Pengumpulan data dan informasi dari berbagai unsur baik Pemerintah, Swasta, Lembaga Non Pemerintah, dan Masyarakat
- b. Pembagian peran dan tanggung jawab antar sektor
- c. Proyeksi kebutuhan lintas sektor
- d. Identifikasi, inventarisasi dan penyiapan sumber daya dari setiap sektor
- e. Pemecahan masalah berdasarkan kesepakatan-kesepakatan dan komitmen untuk melakukan peninjauan kembali/kaji ulang Rencana

Kontingensi, jika tidak terjadi bencana, termasuk dilaksanakan geladi sebagai metode/alat uji coba rencana kontingensi.

1.5. Kebijakan dan Strategi

Kebijakan penanganan darurat bencana adalah arahan/pedoman umum yang bersifat mengikat bagi para pihak yang terlibat sesuai dengan tugas dan fungsinya serta Struktur Komando Penanganan Darurat Bencana dalam melaksanakan tugas pokok dan operasinya. Kebijakan- kebijakan tersebut adalah sebagai berikut.

1. Menetapkan koordinasi pelaksanaan Penanggulangan Bencana (PB) secara terencana, terpadu dan menyeluruh,
2. Memberikan perlindungan pada masyarakat terdampak.
3. Optimalisasi pos anggaran Biaya Tidak Terduga (BTT) APBD tahun berjalan untuk penanggulangan kedaruratan bencana (PKB)
4. Mengajukan pendampingan dan fasilitas Dana Siap Pakai (DSP) kepada Pemerintah Pusat melalui BNPB,
5. Membuka jejaring bantuan dari masyarakat, swasta, lembaga non pemerintah, dan luar negeri,
6. Melibatkan masyarakat, relawan dan pemberi bantuan dalam pencarian dan pertolongan
7. Membebaskan seluruh biaya pelayanan kesehatan untuk masyarakat terdampak bencana.
8. Melaksanakan sosialisasi dan pendampingan pemenuhan kebutuhan masyarakat pasca bencana.
9. Melakukan monitoring dan evaluasi penanganan penanggulangan bencana.

Strategi penanganan kedaruratan bencana adalah pedoman pelaksanaan umum bagaimana kebijakan diimplementasikan selama operasi guna mencapai efektivitas kebijakan. Strategi-strategi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Mengaktifkan Sistem Komando Penanggulangan Darurat Bencana (SKPDB).
2. Meningkatkan akses informasi satu data dalam penanganan penanggulangan bencana.
3. Melaksanakan pencarian dan pertolongan jiwa yang terdampak.
4. Memenuhi kebutuhan dasar masyarakat terdampak.

5. Perbaikan sarana prasarana (sarpras) vital serta pemulihan fungsi layanan umum dan layanan pemerintahan di wilayah terdampak bencana.
6. Pembuatan pos bantuan.
7. Pengerahan personil pencarian dan pertolongan yang terlatih, sarana pencarian dan evakuasi yang mencukupi dengan melibatkan masyarakat, relawan dan pemberi bantuan.
8. Pemanfaatan semua fasilitas umum yang aman milik pemerintah atau masyarakat sebagai tempat evakuasi.
9. Pelayanan kesehatan bagi korban bencana dan *Psychological First Aid (PFA)*
10. Mendistribusikan cadangan logistik untuk pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat terdampak bencana.
11. Monitoring dan evaluasi penanganan penanggulangan bencana disemua sektor.

1.6. Pendekatan, Metode, dan Tahapan Proses

A. Pendekatan dan Metode

Pendekatan yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif. Metode pengumpulan data yang dipergunakan dalam penyusunan rencana kontingensi tanah longsor di Kabupaten Ponorogo adalah metode Angket dan metode dokumentasi.

1. Metode Angket

Metode Angket merupakan cara atau strategi pengumpulan data melalui pengajuan pertanyaan-pertanyaan tertulis kepada subyek penelitian, responden, atau sumber data dan jawabannya diberikan pula secara tertulis (Budiyono, 2003)

2. Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi diperlukan dalam penyusunan rencana kontingensi tanah longsor di Kabupaten Ponorogo. Metode dokumentasi dipergunakan untuk menggali data tertulis berkaitan dengan profile desa/kelurahan, ketersediaan sumber daya, dan lain-lain yang dimiliki instansi terkait.

B. Tahapan proses/ kegiatan penyusunan

1. Penyamaan persepsi bagi semua pihak yang terkait tentang urgensi rencana kontingensi bencana tanah longsor
2. Rapat dalam rangka persiapan tim penyusun renkon Bencana Tanah Longsor Kabupaten Ponorogo
3. FGD tahap I yang dilaksanakan bersama para OPD, TNI/POLRI, Kecamatan dan Relawan yang bertujuan memberikan persepsi dan pemahaman yang sama.
4. FGD tahap II yang dilakukan bersama para OPD, TNI/POLRI, Kecamatan dan Relawan dalam rangka finalisasi data yang telah terkumpul selama penyusunan dokumen
5. Pengesahan Peraturan Bupati mengenai Rencana Kontingensi ini.

C. Para pihak yang terlibat dalam proses penyusunan

1. Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Ponorogo.
2. TNI/POLRI.
3. Kecamatan
4. Relawan

1.7. Umpan Balik

Dalam rangka memastikan bahwa Rencana Kontingensi sesuai dengan kondisi dan situasi yang terkini maka perlu adanya masukan-masukan dari masyarakat terkait dengan data-data dengan metode partisipatif. Adapun strategi yang dilakukan untuk mendapatkan feedback adalah dengan dilaksanakan kegiatan berupa lokakarya atau rapat konsultasi yang diinisiasi bahkan kemudian oleh multipihak antara lain oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, TNI/POLRI, Kecamatan dan Relawan. sedangkan review sampai dengan pemutakhiran perencanaan kontingensi dikoordinasikan BPBD Kabupaten Ponorogo.

1.8. Masa Berlaku dan Pemutakhiran

Adapun Dokumen Rencana Kontingensi Bencana Tanah Longsor Kabupaten Ponorogo ini berlaku selama tiga (3) tahun. Untuk memastikan bahwa

rencana Kontingensi konsisten dengan situasi saat ini, misalnya perubahan dinamika skala bencana, perubahan ukuran dan bentuk atau jenis kerentanan, perubahan kapasitas atau kapabilitas sumber daya dapat direvisi atau diperbarui data sesuai dengan kebutuhan

1.9. Konversi Rencana Kontingensi menjadi Rencana Operasi

Rencana kontingensi ini menjadi dasar penyusunan rencana operasi penanganan darurat bencana tanah longsor di Kabupaten Ponorogo. Aktivasi rencana kontingensi diikuti dengan pengumpulan data dan analisis kajian cepat bencana di wilayah rentan, yang kemudian digunakan oleh Forkopimda untuk mengambil keputusan dalam menentukan status darurat intervensi di tingkat kabupaten.

BAB II. SITUASI

2.1. Karakteristik Bahaya

Bencana tanah longsor merupakan salah satu bencana yang sering terjadi di Indonesia, termasuk di Kabupaten Ponorogo. Kabupaten Ponorogo terletak pada koordinat geografis di antara $111^{\circ} 17'$ - $111^{\circ} 52'$ BT dan $7^{\circ} 49'$ - $8^{\circ} 20'$ LS, dengan ketinggian antara 92 sampai dengan 2.563 meter di atas permukaan laut dan memiliki luas wilayah 1.371,78 km². Kabupaten Ponorogo merupakan daerah yang berpotensi mengalami bencana tanah longsor karena bentuk morfologi yang bervariasi seperti dataran tinggi dan perbukitan.

Kajian bahaya tanah longsor yang dilakukan adalah untuk mengetahui potensi sebaran dan tingkat bencana tersebut. Kajian bahaya dilakukan dengan melibatkan parameter-parameter yang dianggap memiliki pengaruh terhadap terjadinya longsor. Sehingga dapat ditentukan luas dan kelas bahaya berdasarkan administrasi yang berpotensi terdampak bencana tanah longsor di Kabupaten Ponorogo. Kabupaten Ponorogo tanah longsor yang sangat besar terjadi di Desa Banaran Kecamatan Pulung. Tingginya angka kejadian longsor tersebut karena potensi curah hujan yang tinggi, kondisi geologis, batuan yang lapuk, kedalaman solum tanah yang cukup tebal, adanya bidang gelincir yaitu lapisan batuan yang tidak tembus air (*impermeable layers*) di dalam tanah, dan adanya kemiringan lereng lebih dari 30° (lereng curam), serta penggunaan lahan yang kurang sesuai.

2.2. Skenario Kejadian

Tabel 2.1. Skenario Kejadian Tanah Longsor di Desa Banaran

Waktu kejadian	Sabtu, 1 april 2017 pukul 07.40
Lokasi	9 kecamatan di Kab. Ponorogo yaitu Pulung, Ngrayun, Pudak, Badegan, Sambit, Sawoo, Slahung, Sooko, dan Ngebel
Pemicu	Di Kecamatan Pulung, lahan milik perhutani dengan bentuk kemiringan beralih fungsi untuk pertanian jahe, bagian atas mengalami retakan kurang lebih 30 cm. Retakan tersebut berangsur-angsur mengalami penambahan penurunan menjadi 9 m dalam kurun waktu 1 minggu. Dan 15 meter dalam kurun waktu 3 minggu , terakhir 20 meter dalam kurun waktu 4 minggu. Kemudian hujan dengan intensitas tinggi selama 2 hari berturut – turut membuat air masuk ke dalam retakan sehingga memicu terjadinya tanah longsor. Hujan tersebut juga memicu terjadinya tanah longsor di 6 kecamatan lainnya yaitu Ngrayun, Pudak, Badegan, Sambit, Sawoo, dan Slahung.
Bahaya primer	Material tanah bercampur batu dan lumpur yang longsor menyebabkan lahan pertanian, rumah, dan infrastruktur lainnya rusak bahkan mengancam jiwa penduduk sekitar lokasi tanah longsor.
Peringatan Dini Bencana	1. Rekahan tanah 2. Hujan selama 2 hari berturut-turut dengan intensitas tinggi 3. Peta perkiraan gerakan tanah PVMBG melalui Portal MBG pada laman https://vsi.esdm.go.id/portalmbg/
Cakupan wilayah terdampak	9 kecamatan di wilayah Kabupaten Ponorogo
Bahaya sekunder	Depresi akibat kehilangan rumah dan anggota keluarga yang meninggal
Bahaya pendamping	Timbulnya wabah penyakit karena rawan tertular penyakit di pengungsian

2.3. Asumsi Dampak

A. Aspek Kependudukan

Jumlah penduduk yang akan terancam di sembilan Kecamatan di Kabupaten Ponorogo berdasarkan sumber dari data tiap Kecamatan tahun 2023 adalah 196.995 jiwa. Berikut disajikan data perkiraan korban yang ditimbulkan karena bencana tanah longsor untuk setiap kecamatan.

Berikut asumsi jumlah penduduk terpapar tersebar di Kecamatan Ngrayun, Pudak, Pulung, dan Badegan:

a. Kecamatan Ngrayun

Asumsi lokasi terparah berada di Desa Temon, Desa Selur, Desa Mrayan, Desa Cepoko, Desa Wonodadi, Desa Sendang, Desa Ngrayun, Desa Gedangan, Desa Binade, Desa Baosan Kidul, dan Desa Baosan Lor dengan jumlah penduduk terancam sebanyak 61.784 jiwa. Adapun perkiraan dampak korban yang ditimbulkan sebagai berikut:

Jiwa Terancam	: -
Meninggal	: -
Hilang	: -
Mengungsi	: 95
Luka Berat	: -
Luka Ringan	: 26

b. Kecamatan Pudak

Asumsi lokasi terparah berada di Desa Krisik, Desa Banjerejo, Desa Tambang, Desa Pudak Kulon, Desa Pudak Wettan dan Desa Bareng dengan jumlah penduduk terancam sebanyak 9.189 jiwa. Adapun perkiraan dampak korban yang ditimbulkan sebagai berikut:

Jiwa Terancam	: -
Meninggal	: -
Hilang	: -
Mengungsi	: 170
Luka Berat	: 22
Luka Ringan	: 383

c. Kecamatan Pulung

Asumsi lokasi terparah berada di Desa Wagir Kidul, Desa Munggun, Desa Banaran, Desa Wayang, Desa Singgahan, dan Desa Bekiring dengan jumlah penduduk terancam sebanyak 8.455 jiwa. Adapun perkiraan dampak korban yang ditimbulkan sebagai berikut:

Jiwa Terancam	: -
Meninggal	: -
Hilang	: -
Mengungsi	: 30
Luka Berat	: -
Luka Ringan	: -

d. Kecamatan Badegan

Asumsi lokasi terparah berada di Desa Dayakan dengan jumlah penduduk terancam sebanyak 3.858 jiwa. Adapun perkiraan dampak korban yang ditimbulkan sebagai berikut:

Jiwa Terancam	: -
Meninggal	: -
Hilang	: -
Mengungsi	: 50
Luka Berat	: -
Luka Ringan	: -

e. Kecamatan Sambit

Asumsi lokasi terparah berada di Desa Gajah dan Jrakah dengan jumlah penduduk terancam sebanyak 6.210 jiwa. Adapun perkiraan dampak korban yang ditimbulkan sebagai berikut.

Jiwa Terancam	: -
Meninggal	: -
Hilang	: -
Mengungsi	: ada
Luka Berat	: -
Luka Ringan	: -

f. Kecamatan Sawoo

Asumsi lokasi terparah berada di Desa Sriti dan Desa Tumpuk dengan jumlah penduduk terancam sebanyak 39.560 jiwa. Adapun perkiraan dampak korban yang ditimbulkan sebagai berikut:

Jiwa Terancam	: -
Meninggal	: -
Hilang	: -
Mengungsi	: 194
Luka Berat	: -
Luka Ringan	: -

g. Kecamatan Slahung

Asumsi lokasi terparah berada di Desa Tugurejo, Desa Senepo, Desa Caluk, Desa Wates, Desa Slahung, Desa Ngilo Ilo dengan jumlah penduduk terancam sebanyak 19.158 jiwa. Adapun perkiraan dampak korban yang ditimbulkan sebagai berikut:

Jiwa Terancam	: -
Meninggal	: -
Hilang	: -
Mengungsi	: 351
Luka Berat	: 20
Luka Ringan	: 39

h. Kecamatan Sooko

Asumsi lokasi terparah berada di Desa Sriti dan Tumpuk dengan jumlah penduduk terancam sebanyak 26.129 jiwa. Adapun perkiraan dampak korban yang ditimbulkan sebagai berikut:

Jiwa Terancam	: -
Meninggal	: -
Hilang	: -
Mengungsi	: 74
Luka Berat	: -
Luka Ringan	: 18

i. Kecamatan Ngebel

Asumsi lokasi terparah berada di Talun, Ngrogung, Pupus, Gondowido, Sahang, Wagir Lor, Ngebel, dan Sempu dengan jumlah penduduk terancam sebanyak 22.612 jiwa. Adapun perkiraan dampak korban yang ditimbulkan sebagai berikut:

Jiwa Terancam	: -
Meninggal	: -
Hilang	: -
Mengungsi	: 104 KK
Luka Berat	: -
Luka Ringan	: -

B. Aspek Fisik

Berdasarkan skenario longsor diperkirakan akan mengancam fasilitas dan sarana prasarana umum seperti sarana transportasi, jalan, jembatan, pasar, dan rumah sakit di 9 Kecamatan.

1. Kecamatan Ngrayun

Tabel 2.2. Proyeksi Sarana Prasarana Terdampak Kecamatan Ngrayun

No	Infrastruktur	Tingkat Kerusakan	Jumlah
1	Permukiman/Perumahan		
	Rumah	Rusak Berat /Hilang	8
		Rusak Sedang	34
		Rusak Ringan	13
2	Jalan		
2.1	Jalan Provinsi		
		Rusak Berat /Hilang	-
		Rusak Sedang	-
		Rusak Ringan	-
2.2	Jalan Kabupaten		
		Rusak Berat /Hilang	1
		Rusak Sedang	-

No	Infrastruktur	Tingkat Kerusakan	Jumlah
		Rusak Ringan	-
2.3	Jalan Desa/Kelurahan		
		Rusak Berat / Hilang	1
		Rusak Sedang	1
		Rusak Ringan	-
3	Jembatan	RB / RS / RR	
3.1	Jembatan	RR	1
		RS	1
4	Fasilitas Perkantoran	RB / RS / RR	
4.1	Perkantoran Pemerintahan	RR	4
4.2	Perkantoran Swasta		-
5	Fasilitas Layanan Kesehatan	RB / RS / RR	
5.1	Rumah Sakit Pemerintah		-
5.2	Rumah Sakit Swasta		-
5.3	Rumah Sakit Bersalin		-
5.4	Puskesmas	RR	9
5.5	Klinik		-
5.6	Apotek		-
	Dan lainnya		-
6	Fasilitas Layanan Pendidikan	RB / RS / RR	
6.1	Perguruan Tinggi		-
6.2	SMA / Sederajat	RR	4
6.3	SMP / Sederajat	RR	13
6.4	SD / Sederajat	RR	26
6.5	Pondok Pesantren		-
6.6	TK/PAUD	RR	24
7	Fasilitas publik		
7.1	GOR		-
7.2	Lapangan	RR	2
8	Infrastruktur PLN		
			-
9	Infrastruktur Telekomunikasi		
			-
10	Fasilitas Energi		
10.1	SPBU		-
10.2	SPBE		-
11	Fasilitas Air Bersih		

No	Infrastruktur	Tingkat Kerusakan	Jumlah
11.1	PDAM atau badan usaha milik daerah sejenisnya		-
11.2	Sumur gali	RR	21
	Dan lainnya		-
12	Infrastruktur/Fasilitas perekonomian		
12.1	Kantor layanan perbankan		-
12.2	Pasar	RR	13
12.3	Mall		-
12.4	Restoran		-
	Dan lainnya		-
13	Infrastruktur/Fasilitas Peribadatan		
13.1	Masjid	RR	26
13.2	Gereja		-
13.3	Vihara		-
13.4	Mushola	RR	24

2. Kecamatan Pudak

Tabel 2.3. Proyeksi Sarana Prasarana Terdampak Kecamatan Pudak

No	Infrastruktur	Tingkat Kerusakan	Jumlah
1	Permukiman/Perumahan		
	Rumah	Rusak Berat / Hilang	72
		Rusak Sedang	128
		Rusak Ringan	163
2	Jalan		
2.2	Jalan Provinsi		
		Rusak Berat / Hilang	-
		Rusak Sedang	-
		Rusak Ringan	-
2.3	Jalan Kabupaten		
		Rusak Berat / Hilang	1
		Rusak Sedang	7
		Rusak Ringan	2
2.4	Jalan Desa/Kelurahan		
		Rusak Berat / Hilang	19
		Rusak Sedang	18

No	Infrastruktur	Tingkat Kerusakan	Jumlah
		Rusak Ringan	18
3	Jembatan	RB / RS / RR	
3.1		RB	8
		RS	10
		RR	3
4	Fasilitas Perkantoran	RB / RS / RR	
4.1	Perkantoran Pemerintahan	RS	5
4.2	Perkantoran Swasta		-
5	Fasilitas Layanan Kesehatan	RB / RS / RR	
5.1	Rumah Sakit Pemerintah		-
5.2	Rumah Sakit Swasta		-
5.3	Rumah Sakit Bersalin		-
5.4	Puskesmas	RS	1
5.5	Klinik		-
5.6	Apotek		-
5.7	Pustu	RR	1
	Dan lainnya	RR	1
		RS	3
6	Fasilitas Layanan Pendidikan	RB / RS / RR	
6.1	Perguruan Tinggi		-
6.2	SMA / Sederajat		-
6.3	SMP / Sederajat		-
6.4	SD / Sederajat	RR	4
		RS	3
6.5	Pondok Pesantren		-
6.6	TK/PAUD	RS	6
		RB	1
7	Fasilitas public		
7.1	GOR		-
7.2	Lapangan	RS	3
		RR	1
8	Infrastruktur PLN	RR	2
		RS	8
9	Infrastuktur Telekomunikasi	RR	1
		RS	6
10	Fasilitas Enegi		
10.1	SPBU		-
10.2	SPBE		-
11	Fasilitas Air Bersih		

No	Infrastruktur	Tingkat Kerusakan	Jumlah
11.1	PDAM atau badan usaha milik daerah sejenisnya	RS	5
11.2	Sumur gali		-
	Dan lainnya	RS	8
12	Infrastruktur/Fasilitas perekonomian		
12.1	Kantor layanan perbankan		-
12.2	Pasar	RS	1
12.3	Mall		-
12.4	Restoran		-
	Dan lainnya		-
12	Infrastruktur/Fasilitas Peribadatan		
12.1	Masjid	RR	21
12.2	Gereja		-
12.3	Vihara		-
12.4	Mushola	RR	36

3. Kecamatan Pulung

Tabel 2.4. Proyeksi Sarana Prasarana Terdampak Kecamatan Pulung

No	Infrastruktur	Tingkat Kerusakan	Jumlah
1	Permukiman/Perumahan		
	Rumah	Rusak Berat / Hilang	39
		Rusak Sedang	22
		Rusak Ringan	8
2	Jalan		
2.2	Jalan Provinsi		
		Rusak Berat / Hilang	4
		Rusak Sedang	4
		Rusak Ringan	6
2.3	Jalan Kabupaten		
		Rusak Berat / Hilang	3
		Rusak Sedang	3
		Rusak Ringan	
2.4	Jalan Desa/Kelurahan		
		Rusak Berat / Hilang	13
		Rusak Sedang	15
		Rusak Ringan	6

No	Infrastruktur	Tingkat Kerusakan	Jumlah
3	Jembatan	RB / RS / RR	
3.1		Rusak Berat / Hilang	2
		Rusak Sedang	3
		Rusak Ringan	2
4	Fasilitas Perkantoran	RB / RS / RR	
4.1	Perkantoran Pemerintahan		2
4.2	Perkantoran Swasta		-
5	Fasilitas Layanan Kesehatan	RB / RS / RR	
5.1	Rumah Sakit Pemerintah		-
5.2	Rumah Sakit Swasta		-
5.3	Rumah Sakit Bersalin		-
5.4	Puskesmas		-
5.5	Klinik		-
5.6	Apotek		-
	Pustu	RS	1
	Dan lainnya	RB	1
6	Fasilitasi Layanan Pendidikan	RB / RS / RR	
6.1	Perguruan Tinggi		-
6.2	SMA / Sederajat	RS	1
6.3	SMP / Sederajat	RS	1
6.4	SD / Sederajat	RS	6
6.5	Pondok Pesantren	RS	1
6.6	TK/PAUD		1
7	Fasilitas public		
7.1	GOR		-
7.2	Lapangan	RS	2
8	infrastruktur PLN		
	Jaringan Listik	RB	2
9	Infrastuktur Telekomunikasi		
			-
10	Fasilitas Enegi		
10.1	SPBU		-
10.2	SPBE		-
11	Fasilitas Air Bersih		
11.1	PDAM atau badan usaha milik daerah sejenisnya	RB	2
		RS	1
11.2	Sumur gali		-
	Dan lainnya		

No	Infrastruktur	Tingkat Kerusakan	Jumlah
12	Infrastruktur/Fasilitas perekonomian		
12.1	Kantor layanan perbankan		-
12.2	Pasar		-
12.3	Mall		-
12.4	Restoran		-
	Dan lainnya		-
13	Infrastruktur/Fasilitas Peribadatan		
13.1	Masjid	RS	5
13.2	Gereja	RS	1
13.3	Vihara		-
13.4	Mushola	RR	5
		RB	2

4. Kecamatan Badegan

Tabel 2.5. Proyeksi Sarana Prasarana Terdampak Kecamatan Badegan

No	Infrastruktur	Tingkat Kerusakan	Jumlah
1	Permukiman/Perumahan		
	Rumah	Rusak Berat / Hilang	10
		Rusak Sedang	17
		Rusak Ringan	9
2	Jalan		
2.2	Jalan Provinsi		
		Rusak Berat / Hilang	2
		Rusak Sedang	2
		Rusak Ringan	-
2.3	Jalan Kabupaten		
		Rusak Berat / Hilang	-
		Rusak Sedang	-
		Rusak Ringan	-
2.4	Jalan Desa/Kelurahan		
		Rusak Berat / Hilang	2
		Rusak Sedang	4
		Rusak Ringan	-

No	Infrastruktur	Tingkat Kerusakan	Jumlah
3	Jembatan	RB / RS / RR	
3.1	Plat Deker	RB	1
	Jembatan	RS	3
4	Fasilitas Perkantoran	RB / RS / RR	
4.1	Perkantoran Pemerintahan		-
4.2	Perkantoran Swasta		-
5	Fasilitas Layanan Kesehatan	RB / RS / RR	
5.1	Rumah Sakit Pemerintah		-
5.2	Rumah Sakit Swasta		-
5.3	Rumah Sakit Bersalin		-
5.4	Puskesmas		-
5.5	Klinik		-
5.6	Apotek		-
	Dan lainnya		-
6	Fasilitasi Layanan Pendidikan	RB / RS / RR	
6.1	Perguruan Tinggi		-
6.2	SMA / Sederajat		-
6.3	SMP / Sederajat		-
6.4	SD / Sederajat	RS	1
6.5	Pondok Pesantren		-
6.6	TK/PAUD		1
7	Fasilitas public		
7.1	GOR		-
7.2	Lapangan	RS	2
8	infrastruktur PLN		
	Tiang Listrik		4
9	Infrastuktur Telekomunikasi		
9.1	Repeater Wii		1
10	Fasilitas Enegi		
10.1	SPBU		-
10.2	SPBE		-
11	Fasilitas Air Bersih		
11.1	PDAM atau badan usaha milik daerah sejenisnya		-
11.2	Sumur gali		1

No	Infrastruktur	Tingkat Kerusakan	Jumlah
11.3	Jaringan pipanisasi		7
12	Infrastruktur/Fasilitas perekonomian		
12.1	Kantor layanan perbankan		-
12.2	Pasar		-
12.3	Mall		-
12.4	Restoran		-
	Dan lainnya		-
13	Infrastruktur/Fasilitas Peribadatan		
13.1	Masjid		10
13.2	Gereja		-
13.3	Vihara		-
13.4	Mushola		-

5. Kecamatan Sambit

Tabel 2.6. Proyeksi Sarana Prasarana Terdampak Kecamatan Sambit

No	Infrastruktur	Tingkat Kerusakan	Jumlah
1	Permukiman/Perumahan		
	Rumah	Rusak Berat / Hilang	-
		Rusak Sedang	-
2	Jalan		
2.2	Jalan Provinsi		
		Rusak Berat / Hilang	-
		Rusak Sedang	-
2.3	Jalan Kabupaten		
		Rusak Berat / Hilang	-
		Rusak Sedang	1
2.4	Jalan Desa/Kelurahan		
		Rusak Berat / Hilang	-
		Rusak Sedang	1
3	Jembatan	RB / RS / RR	
4	Fasilitas Perkantoran	RB / RS / RR	

No	Infrastruktur	Tingkat Kerusakan	Jumlah
4.1	Perkantoran Pemerintahan		-
4.2	Perkantoran Swasta	Rusak sedang	-
5	Fasilitas Layanan Kesehatan	RB / RS / RR	
5.1	Rumah Sakit Pemerintah		-
5.2	Rumah Sakit Swasta		-
5.3	Rumah Sakit Bersalin		-
5.4	Puskesmas		-
5.5	Klinik		-
5.6	Apotek		-
	Dan lainnya		-
6	Fasilitasi Layanan Pendidikan	RB / RS / RR	
6.1	Perguruan Tinggi		-
6.2	SMA / Sederajat		-
6.3	SMP / Sederajat		-
6.4	SD / Sederajat		-
6.5	Pondok Pesantren		-
6.6	TK/PAUD		-
7	Fasilitas public		
7.1	GOR		-
7.2	Lapangan		-
8	Infrastruktur PLN		
9	Infrastuktur Telekomunikasi		
10	Fasilitas Enegi		
10.1	SPBU		-
10.2	SPBE		-
11	Fasilitas Air Bersih		
11.1	PDAM atau badan usaha milik daerah sejenisnya		-
11.2	Sumur gali		-
	Dan lainnya		-
12	Infrastruktur/Fasilitas perekonomian		
12.1	Kantor layanan perbankan		-
12.2	Pasar		-
12.3	Mall		-

No	Infrastruktur	Tingkat Kerusakan	Jumlah
12.4	Restoran		-
	Dan lainnya		-
13	Infrastruktur/Fasilitas Peribadatan		
13.1	Masjid		-
13.2	Gereja		-
13.3	Vihara		-
13.4	Mushola		-

6. Kecamatan Sawoo

Tabel 2.7. Proyeksi Sarana Prasarana Terdampak Kecamatan Sawoo

No	Infrastruktur	Tingkat Kerusakan	Jumlah
1	Permukiman/Perumahan		
	Rumah	Rusak Berat / Hilang	50
		Rusak Sedang	92
		Rusak Ringan	120
2	Jalan		
2.2	Jalan Provinsi		
		Rusak Berat / Hilang	-
		Rusak Sedang	-
		Rusak Ringan	-
2.3	Jalan Kabupaten		
		Rusak Berat / Hilang	3
		Rusak Sedang	1
		Rusak Ringan	-
2.4	Jalan Desa/Kelurahan		
		Rusak Berat / Hilang	4
		Rusak Sedang	6
		Rusak Ringan	-
3	Jembatan	RB / RS / RR	
3.1		RS	2
4	Fasilitas Perkantoran	RB / RS / RR	
4.1	Perkantoran Pemerintahan		

No	Infrastruktur	Tingkat Kerusakan	Jumlah
4.2	Perkantoran Swasta	Rusak sedang	-
5	Fasilitas Layanan Kesehatan	RB / RS / RR	
5.1	Rumah Sakit Pemerintah		-
5.2	Rumah Sakit Swasta		-
5.3	Rumah Sakit Bersalin		-
5.4	Puskesmas		-
5.5	Klinik		-
5.6	Apotek		-
	Dan lainnya		-
6	Fasilitas Layanan Pendidikan	RB / RS / RR	
6.1	Perguruan Tinggi		-
6.2	SMA / Sederajat		-
6.3	SMP / Sederajat		-
6.4	SD / Sederajat		1
6.5	Pondok Pesantren		-
6.6	TK/PAUD		-
6	Fasilitas public		
	GOR		-
	Lapangan		-
7	Infrastruktur PLN		
8	Infrastruktur Telekomunikasi		
9	Fasilitas Energi		
9.1	SPBU		-
9.2	SPBE		-
10	Fasilitas Air Bersih		
10.1	PDAM atau badan usaha milik daerah sejenisnya		-
10.2	Sumur gali		-
	Dan lainnya		-
11	Infrastruktur/Fasilitas perekonomian		
11.1	Kantor layanan perbankan		-
11.2	Pasar		-

No	Infrastruktur	Tingkat Kerusakan	Jumlah
11.3	Mall		-
11.4	Restoran		-
	Dan lainnya		-
12	Infrastruktur/Fasilitas Peribadatan		
	Masjid		-
	Gereja		-
	Vihara		-
	Mushola		1

7. Kecamatan Slahung

Tabel 2.8. Proyeksi Sarana Prasarana Terdampak Kecamatan Slahung

No	Infrastruktur	Tingkat Kerusakan	Jumlah
1	Permukiman/Perumahan		
	Rumah	Rusak Berat / Hilang	16
		Rusak Sedang	43
		Rusak Ringan	33
2	Jalan		
2.2	Jalan Provinsi		
		Rusak Berat / Hilang	2
		Rusak Sedang	1
		Rusak Ringan	1
2.3	Jalan Kabupaten		
		Rusak Berat / Hilang	1
		Rusak Sedang	1
		Rusak Ringan	1
2.4	Jalan Desa/Kelurahan		
		Rusak Berat / Hilang	4
		Rusak Sedang	11
		Rusak Ringan	13
3	Jembatan	RB / RS / RR	
3.1		RB	-
		RS	2
4	Fasilitas Perkantoran	RB / RS / RR	

No	Infrastruktur	Tingkat Kerusakan	Jumlah
4.1	Perkantoran Pemerintahan		2
4.2	Perkantoran Swasta		-
5	Fasilitas Layanan Kesehatan	RB / RS / RR	
5.1	Rumah Sakit Pemerintah		-
5.2	Rumah Sakit Swasta		-
5.3	Rumah Sakit Bersalin		1
5.4	Puskesmas	RR	1
		RS	2
5.5	Klinik		-
5.6	Apotek		-
	Dan lainnya		
6	Fasilitas Layanan Pendidikan	RB / RS / RR	
6.1	Perguruan Tinggi		-
6.2	SMA / Sederajat	RR	1
6.3	SMP / Sederajat	RR	1
6.4	SD / Sederajat	RB	4
		RR	2
6.5	Pondok Pesantren	RS	-
6.6	TK/PAUD	RS	2
			2
7	Fasilitas publik		
7.1	GOR		-
7.2	Lapangan	RR	1
8	Infrastruktur PLN		
			-
9	Infrastuktur Telekomunikasi		
			-
10	Fasilitas Enegi		
10.1	SPBU		-
10.2	SPBE		-
11	Fasilitas Air Bersih		
11.1	PDAM atau badan usaha milik daerah sejenisnya		-
11.2	Sumur gali	RB	4
	Dan lainnya		5
12	Infrastruktur/Fasilitas perekonomian		

No	Infrastruktur	Tingkat Kerusakan	Jumlah
12.1	Kantor layanan perbankan		-
12.2	Pasar	RS	1
		RR	1
12.3	Mall		-
12.4	Restoran		-
	Dan lainnya		-
13	Infrastruktur/Fasilitas Peribadatan		
13.1	Masjid	RS	6
		RR	1
13.2	Gereja		1
13.3	Vihara		-
13.4	Mushola	RB	7
		RR	2

8. Kecamatan Sooko

Tabel 2.9. Proyeksi Sarana Prasarana Terdampak Kecamatan Sooko

No	Infrastruktur	Tingkat Kerusakan	Jumlah
1	Permukiman/Perumahan		
	Rumah	Rusak Berat / Hilang	6
		Rusak Sedang	12
		Rusak Ringan	33
2	Jalan		
2.2	Jalan Provinsi		
		Rusak Berat / Hilang	
		Rusak Sedang	
		Rusak Ringan	
2.3	Jalan Kabupaten		
		Rusak Berat / Hilang	3
		Rusak Sedang	0
		Rusak Ringan	0
2.4	Jalan Desa/Kelurahan		
		Rusak Berat / Hilang	1 titik

No	Infrastruktur	Tingkat Kerusakan	Jumlah
		Rusak Sedang	2 titik
		Rusak Ringan	
3	Jembatan	RB / RS / RR	
3.1	Plat Deker	RR	1 titik
	Jembatan	RS	
4	Fasilitas Perkantoran	RB / RS / RR	
4.1	Perkantoran Pemerintahan	RR	2
4.2	Perkantoran Swasta		0
5	Fasilitas Layanan Kesehatan	RB / RS / RR	
5.1	Rumahsakit Pemerintah		0
5.2	Rumahsakit Swasta		0
5.3	Rumahsakit Bersalin		0
5.4	Puskesmas	RR	1
5.5	Klinik		0
5.6	Apotek		0
	Dan lainnya		0
6	Fasilitas Layanan Pendidikan	RB / RS / RR	
6.1	Perguruan Tinggi		0
6.2	SMA / Sederajat	RR	1
6.3	SMP / Sederajat	RR	3
6.4	SD / Sederajat	RR	22
6.5	Pondok Pesantren		0
6.6	TK/PAUD	RR	20
7	Fasilitas publik		
7.1	GOR		0
7.2	Lapangan	RR	2
8	Infrastuktur PLN		
8.1	Tiang Listrik		0
9	Infrastuktur Telekomunikasi		
9.1	Repeater Wii		0
10	Fasilitas Enegi		
10.1	SPBU		0
10.2	SPBE		0

No	Infrastruktur	Tingkat Kerusakan	Jumlah
11	Fasilitas Air Bersih		
11.1	PDAM atau badan usaha milik daerah sejenisnya		0
11.2	Sumur gali		0
	Jaringan pipanisasi		0
12	Infrastruktur/Fasilitas perekonomian		
12.1	Kantor layanan perbankan		0
12.2	Pasar	RR	3
12.3	Mall		0
12.4	Restoran		0
	Dan lainnya		
13	Infrastruktur/Fasilitas Peribadatan		
13.1	Masjid	RR	15
13.2	Gereja	RR	1
13.3	Vihara		0
13.4	Mushola	RR	20

9. Kecamatan Ngebel

Tabel 2.10. Proyeksi Sarana Prasarana Terdampak Kecamatan Ngebel

No	Infrastruktur	Tingkat Kerusakan	Jumlah
1	Permukiman/Perumahan		
	Rumah	Rusak Berat / Hilang	2
		Rusak Sedang	48
		Rusak Ringan	22
2	Jalan		
2.2	Jalan Provinsi		
		Rusak Berat / Hilang	
		Rusak Sedang	
		Rusak Ringan	
2.3	Jalan Kabupaten		
		Rusak Berat / Hilang	1
		Rusak Sedang	11

No	Infrastruktur	Tingkat Kerusakan	Jumlah
		Rusak Ringan	5
2.4	Jalan Desa/Kelurahan		
		Rusak Berat / Hilang	19
		Rusak Sedang	10
		Rusak Ringan	
3	Jembatan	RB / RS / RR	
3.1	Plat Deker	RR	9 titik
	Jembatan	RS	15 titik
4	Fasilitas Perkantoran	RB / RS / RR	
4.1	Perkantoran Pemerintahan	RR	1
4.2	Perkantoran Swasta		0
5	Fasilitas Layanan Kesehatan	RB / RS / RR	
5.1	Rumahsakit Pemerintah		0
5.2	Rumahsakit Swasta		0
5.3	Rumahsakit Bersalin		0
5.4	Puskesmas		0
5.5	Klinik		0
5.6	Apotek		0
	Dan lainnya		0
6	Fasilitas Layanan Pendidikan	RB / RS / RR	
6.1	Perguruan Tinggi		0
6.2	SMA / Sederajat		0
6.3	SMP / Sederajat		0
6.4	SD / Sederajat	RB	1
6.5	Pondok Pesantren		0
6.6	TK/PAUD	RR	1
7	Fasilitas publik		
7.1	GOR		0
7.2	Lapangan		
8	Infrastuktur PLN		
8.1	Tiang Listrik		27 titik
9	Infrastuktur Telekomunikasi		
9.1	Repeater Wii		
10	Fasilitas Enegi		

No	Infrastruktur	Tingkat Kerusakan	Jumlah
10.1	SPBU		0
10.2	SPBE		0
11	Fasilitas Air Bersih		
11.1	PDAM atau badan usaha milik daerah sejenisnya		0
11.2	Sumur gali		
	Jaringan pipanisasi		
12	Infrastruktur/Fasilitas perekonomian		
12.1	Kantor layanan perbankan		0
12.2	Pasar		0
12.3	Mall		0
12.4	Restoran		0
	Dan lainnya		
13	Infrastruktur/Fasilitas Peribadatan		
13.1	Masjid		1
13.2	Gereja		0
13.3	Vihara		0
13.4	Mushola		6

C. ASPEK EKONOMI

Asumsi kerusakan fasilitasi ekonomi yang ditimbulkan di mana akan membuat kegiatan ekonomi terganggu adalah sebagai berikut:

1. Kecamatan Ngrayun

Tabel 2.11. Dampak pada Ekonomi Kecamatan Ngrayun

NO	JENIS	STATUS	JUMLAH
1	Toko	Swasta	38
2	Warung	Swasta	43
3	KUD	-	1
4	Pasar	Swasta	15
5	Bank	-	-

2. Kecamatan Pudak

Tabel 2.12. Dampak pada Ekonomi Kecamatan Pudak

NO	JENIS	STATUS	JUMLAH
1	Toko	Swasta	39
2	Warung	Swasta	11
3	KUD	-	-
4	Pasar	-	1
5	Bank	-	-

3. Kecamatan Pulung

Tabel 2.13. Dampak pada Ekonomi Kecamatan Pulung

NO	JENIS	STATUS	JUMLAH
1	Toko	Swasta	20
2	Warung	Swasta	6
3	KUD	-	-
4	Pasar	-	-
5	Bank	-	-

4. Kecamatan Badegan

Tabel 2.14. Dampak pada Ekonomi Kecamatan Badegan

NO	JENIS	STATUS	JUMLAH
1	Toko	Swasta	7
2	Warung	-	-
3	KUD	-	-
4	Pasar	-	-
5	Bank	-	-

5. Kecamatan Sambit

Tabel 2.15. Dampak pada Ekonomi Kecamatan Sambit

NO	JENIS	STATUS	JUMLAH
1	Toko	Swasta	-
2	Warung		-
3	KUD		-
4	Pasar		-
5	Tempat pelelangan ikan		-
6	Bank		-

6. Kecamatan Sawoo

Tabel 2.16. Dampak pada Ekonomi Kecamatan Sawoo

NO	JENIS	STATUS	JUMLAH
1	Toko	Swasta	-
2	Warung		-
3	KUD		-
4	Pasar		-
5	Tempat pelelangan ikan		-
6	Bank		-

7. Kecamatan Slahung

Tabel 2.17. Dampak pada Ekonomi Kecamatan Slahung

NO	JENIS	STATUS	JUMLAH
1	Toko	Swasta	12
2	Warung	Swasta	13
3	KUD	-	1
4	Pasar	Desa	3
5	Tempat pelelangan ikan	-	-

8. Kecamatan Sooko

Tabel 2.18. Dampak pada Ekonomi Kecamatan Slahung

NO	JENIS	STATUS	JUMLAH
1	Toko	Swasta	7
2	Warung		-
3	KUD		-
4	Pasar		-
5	Tempat pelelangan ikan		-
6	Toko		-

9. Kecamatan Ngebel

Tabel 2.19. Dampak pada Ekonomi Kecamatan Ngebel

NO	JENIS	STATUS	JUMLAH
1	Toko	Swasta	7
2	Warung		-
3	KUD		-
4	Pasar		-
5	Tempat pelelangan ikan		-
6	Bank		-

D. ASPEK LINGKUNGAN

Asumsi kerusakan lingkungan yang ditimbulkan adalah sebagai berikut:

1. Kecamatan Ngrayun

Tabel 2.20. Dampak pada Lingkungan Kecamatan Ngrayun

NO	JENIS	DAMPAK KERUSAKAN DAN GANGGUAN FUNGSI AKIBAT TANAH LONGSOR
1	Mata Air	Mata Air jadi keruh /kekurangan air bersih
2	Tanaman / Hutan	Tanaman mengalami kerusakan/tumbang
3	Saluran Air	Saluran air tersumbat
4	Pencemaran Lingkungan	Limbah-limbah banyak yang masuk rumah
5	Jalan	Jalan banyak rusak
6	Jembatan	Jembatan retak-retak

2. Kecamatan Pudak

Tabel 2.21. Dampak pada Lingkungan Kecamatan Pudak

NO	JENIS	DAMPAK KERUSAKAN DAN GANGGUAN FUNGSI AKIBAT TANAH LONGSOR
1	Mata Air	Mata Air Menjadi Keruh/Kotor, Mata Air tersumbat karena Longsor
2	Tanaman / Hutan	Hilangnya pepohonan sebagai penyangga sumber air dan longsor
3	Saluran Air	Terputusnya saluran air dari sumber air ke bak penampungan dan saluran distribusi ke warga/lingkungan
4	Pencemaran Lingkungan	Tercemarnya air sungai akibat dari limbah yang tidak menguap karena hujan
5	Jalan	Terdapat jalan yang dimungkinkan putus akibat longsor, terdapat permukaan jalan yang masih berupa tanah belum diperkeras sehingga jalan licin dan rawan
6	Jembatan	Putusnya jembatan di jalan desa dan lingkungan

3. Kecamatan Pulung

Tabel 2.22. Dampak pada Lingkungan Kecamatan Pulung

NO	JENIS	DAMPAK KERUSAKAN DAN GANGGUAN FUNGSI AKIBAT TANAH LONGSOR
1	Mata Air	Keruh/ Kotor
2	Tanaman / Hutan	Roboh
3	Saluran Air	Putus
4	Pencemaran Lingkungan	-
5	Jalan	Putus/Amblas
6	Jembatan	Rusak

4. Kecamatan Badegan

Tabel 2.23. Dampak pada Ekonomi Kecamatan Badegan

NO	JENIS	DAMPAK KERUSAKAN DAN GANGGUAN FUNGSI AKIBAT TANAH LONGSOR
1	Mata Air	Keruh/ Kotor
2	Tanaman / Hutan	-
3	Saluran Air	Tersumbat
4	Pencemaran Lingkungan	Air Bersih keruh
5	Jalan	akses terputus
6	Jembatan	Hanyut, erosi pondasi

5. Kecamatan Sambit

Tabel 2.24. Dampak pada Ekonomi Kecamatan Sambit

NO	JENIS	DAMPAK KERUSAKAN DAN GANGGUAN FUNGSI AKIBAT TANAH LONGSOR
1	Mata Air	Keruh/ Kotor
2	Tanaman / Hutan	
3	Saluran Air	
4	Pencemaran Lingkungan	
5	Jalan	
6	Jembatan	

6. Kecamatan Sawoo

Tabel 2.25. Dampak pada Ekonomi Kecamatan Sawoo

NO	JENIS	DAMPAK KERUSAKAN DAN GANGGUAN FUNGSI AKIBAT TANAH LONGSOR
1	Mata Air	Keruh/ Kotor
2	Tanaman / Hutan	
3	Saluran Air	
4	Pencemaran Lingkungan	
5	Jalan	Longsor / Ambrol
6	Jembatan	Putus / Amrol

7. Kecamatan Slahung

Tabel 2.26. Dampak pada Ekonomi Kecamatan Slahung

NO	JENIS	DAMPAK KERUSAKAN DAN GANGGUAN FUNGSI AKIBAT TANAH LONGSOR
1	Mata Air	Keruh/ Kotor
2	Tanaman / Hutan	Tanaman rusak
3	Saluran Air	Saluran Air Tersumbat
4	Pencemaran Lingkungan	limbah-limbah banyak,
5	Jalan	Jalan banyak rusak
6	Jembatan	Jembatan retak-retak

8. Kecamatan Sooko

Tabel 2.27. Dampak pada Ekonomi Kecamatan Sooko

NO	JENIS	DAMPAK KERUSAKAN DAN GANGGUAN FUNGSI AKIBAT GEMPA – TSUNAMI
1	Mata Air	Keruh/ Kotor
2	Tanaman / Hutan	-
3	Saluran Air	Tersumbat
4	Pencemaran Lingkungan	Air Bersih keruh
5	Jalan	akses terputus
6	Jembatan	Hanyut, erosi pondasi

9. Kecamatan Ngebel

Tabel 2.28. Dampak pada Ekonomi Kecamatan Ngebel

NO	JENIS	DAMPAK KERUSAKAN DAN GANGGUAN FUNGSI AKIBAT GEMPA – TSUNAMI
1	Mata Air	Keruh/ Kotor
2	Tanaman / Hutan	-
3	Saluran Air	Tersumbat
4	Pencemaran Lingkungan	Air Bersih keruh
5	Jalan	akses terputus
6	Jembatan	Hanyut, erosi pondasi

E. ASPEK LAYANAN PUBLIK/PEMERINTAHAN

Dampak bencana longsor menyebabkan aktivitas pemerintahan berpotensi mengalami gangguan fungsi layanan. Utamanya, wilayah yang akan terdampak paling krusial di daerah Kecamatan Ponorogo yang merupakan pusat layanan dan pemerintahan Kabupaten Ponorogo.

1. Layanan pemerintahan
2. Layanan Pendidikan
3. Layanan Kesehatan
4. Layanan Keamanan dan Ketertiban

BAB III. TUGAS POKOK DAN FUNGSI POKOK ORGANISASI KOMANDO PENANGGULANGAN DARURAT BENCANA

3.1. Tugas Pokok

1. Nama Organisasi Komando

Komando Penanganan Darurat Bencana Tanah Longsor Kabupaten Ponorogo

2. Batasan waktu operasi

Berdasarkan Pedoman Status Keadaan Darurat Bencana, masa berlaku status keadaan darurat bencana sebagai berikut:

- a. Status keadaan darurat bencana Kabupaten/ Kota dapat diberlakukan antara tujuh sampai dengan empat belas hari bahkan bisa lebih, tergantung dengan perkiraan penyelesaian penanganan dampak ancaman/ kejadian bencana atau dapat diperpanjang sesuai dengan hasil kajian perkembangan situasi di lapangan.
- b. Status keadaan darurat bencana Provinsi dapat diberlakukan antara empat belas sampai dengan satu bulan atau dapat diperpanjang sesuai dengan hasil kajian perkembangan situasi di lapangan.
- c. Status keadaan darurat bencana nasional dapat diberlakukan antara satu bulan sampai dengan tiga bulan atau dapat diperpanjang sesuai dengan hasil kajian perkembangan situasi di lapangan.
- d. Masa berlaku status keadaan darurat bencana juga dapat diperpendek atau diperpanjang setelah mempertimbangkan hasil kajian perkembangan situasi di lapangan. Untuk perpanjangan masa waktu keadaan darurat bencana harus dibuatkan surat keputusan perpanjangannya.
- e. Pemerintah/ Pemerintah Daerah selaku penyelenggara penanganan darurat bencana wajib membuat pernyataan secara resmi untuk disampaikan kepada masyarakat terkait dengan berakhirnya status keadaan darurat bencana. Pernyataan tersebut atas rekomendasi BNPB dan atau BPBD setempat.

3. Tujuan-tujuan operasi antara lain; a) penyelamatan jiwa; b) penyelamatan aset warga dan pemerintah; dan c) pemenuhan kebutuhan dasar pengungsi/penyintas di wilayah terpapar.

4. Prinsip-prinsip pelaksanaan operasi

Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2016 tentang Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana, menerangkan bahwa penyelenggaraan penanganan darurat bencana dilaksanakan berdasarkan prinsip:

- a. Pengutamaan peran aktif pemerintah daerah kabupaten/kota; dan
- b. Pemerintah dan pemerintah daerah provinsi bertanggung jawab melakukan pendampingan terhadap pemerintah daerah kabupaten/kota.

3.2. Sasaran

1. Tersusunnya rencana operasi penanganan darurat bencana dalam waktu 24 jam.
2. Terselenggaranya koordinasi yang melibatkan *pentahelix* dan 9 Kecamatan
3. Terlaksananya pemenuhan kebutuhan dasar warga terdampak dengan setidaknya 80% sumber daya dan anggarannya bersumber dari Dana Siap Pakai (DSP) dan Belanja Tidak Terduga (BTT) Propinsi/Kabupaten.
4. Terkerahkan 90% sumber daya dari seluruh pihak terkait yang telah berkomitmen dalam operasi penanganan darurat bencana.
5. Terselenggaranya 100% evakuasi warga terdampak atau korban.
6. Terselenggaranya 100% pemulihan fungsi sementara (rehabilitasi) sarana-prasarana vital meliputi jaringan listrik, air, dan komunikasi.
7. Terlaksananya 14 hari operasi penanganan darurat bencana atau lebih dengan tanggung jawab dan bertanggung gugat penuh

BAB IV PELAKSANAAN

4.1. Konsep Operasi dan Sasaran Tindakan

Tabel 4.1. Konsep Operasi dan Sasaran Tindakan

No	Instansi	Siaga Darurat	Tanggap Darurat	Transisi Darurat
1	Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Ponorogo	Mendukung penyusunan produk hukum daerah yang dibutuhkan dalam penanganan bencana	Mendukung penyusunan produk hukum daerah yang dibutuhkan dalam penanganan bencana	Mendukung penyusunan produk hukum daerah yang dibutuhkan dalam penanganan bencana
2	Dinas Kesehatan	Membentuk disaster medical team	Mengerahkan sdm kesehatan dan	Penyuluhan kesehatan kepada masyarakat
		Menyiagakan ambulance gawat darurat	Disaster medical team (dmt).	Memastikan penerapan protokol kesehatan
		Menyiapkan dan melatih sumber daya kesehatan dalam pelayanan kesehatan saat terjadi bencana	Mengerahkan ambulance untuk evakuasi	Covid-19 berlangsung berkelanjutan selama
		Menyiagakan rumah sakit jika sewaktu - waktu terjadi bencana tanah longsor	Melakukan pelayanan kesehatan.	Ada pengungsian.
			Melakukan Rujukan Ke Rumah Sakit.	Memastikan Pelaksanaan Dukungan Psikososial.
			Koordinasi Dengan Dinkes Provinsi Terkait Dengan Pembangunan Rumah Sakit Lapangan.	Penanganan Klinis Penyakit Pasca Bencana
			Membentuk Tim Peningkatan Kapasitas Penerapan Protokol Kesehatan Covid-19 untuk Pengungsian	
3	Perum Perhutani KPH MADIUN	Peringatan dini dan pemasangan papan peringatan	Penyelamatan dan evakuasi terhadap korban terdampak	Bantuan darurat, pendirian posko komando bantuan

		Sosialisasi tanggap darurat di lokasi rawan bencana	Pemenuhan kebutuhan dasar	Inventarisasi kerusakan dan kerugian
		Pelatihan penanggulangan bencana	Perlindungan terhadap korban	Evakuasi kerusakan
		Membentuk regu penggulungan bencana alam (PBA)	Identifikasi kemungkinan bahaya	Pemulihan/rehabilitasi
		Merencanakan tempat, peta dan jalur evakuasi terdekat	Prosedur evakuasi bencana	Penentuan status keadaan darurat bencana
		Bekali diri dengan alat keselamatan dan pengetahuan tentang P3K	Tidak panik dalam kondisi penyelamatan yang urgen	Rekontruksi
		Koordinasi dengan BPBD, kodim, polres dan intansi terkait lainnya	Menyelamatkan diri sendiri sebelum menyelamatkan orang lain	Pemantauan secara berkala
			Mengendalikan Diri, Emosi, Dan Rasa Kekawatiran	
4	OPD Satpol PP Kab. Ponorogo	Koordinasi dengan BPBD dan internal satpol serta kecamatan dan desa yang berdampak bencana dan penyiapan peralatan pendukungnya	Pengumpulan personil linmas dan peralatannya	Membantu evakuasi bencana dan bergotong-royong membantu renovasi rumah-rumah warga yang terdampak pasca bencana
5	Dinas Lingkungan Hidup		Memastikan Adanya Fasilitator Koordinasi Untuk Melakukan Kajian Kebutuhan Penyehatan Lingkungan Dalam Pengungsian	Memastikan Sistem Perlindungan Untuk Para Penyintas Di Pengungsian Terintegrasi Dengan Rencana Aksi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pasca Bencana
			Melaksanakan rencana pengelolaan sampah dan penyehatan lingkungan dalam pengungsian terlaksana	Memastikan rencana pengaturan pengelolaan limbah/sampah dalam penutupan pengungsian yang terintegrasi dengan rencana aksi rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana

			Melakukan kajian inventarisasi titik-titik evakuasi limbah/sampah tanggap darurat bencana dan pengungsian	Monitoring dan evaluasi aspek-aspek pengelolaan lingkungan hidup pada lokasi pengungsian yang ditetapkan
			Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan limbah/sampah dalam situasi darurat dan di pengungsian guna penyempurnaan tindak lanjut	Memastikan adanya rencana pemindahan lokasi pengelolaan limbah/sampah yang terintegrasi dengan rencana penutupan pengungsian
6	DINAS PERDAGANGAN KOPERASI DAN UKM	Potensi terjadinya bencana, tanah longsor, dan ber koordinasi dengan pemangku kebijakan baik BPBD maupun TAGANA	Kegiatan yg dilakukan saat terjadinya bencana untuk menghindari dampak buruk yang di timbulkan, mengenai ketersediannya pemenuhan kebutuhan dasar (bahan Pokok) dan ber koordinasi dengan Dinas dipertahankan	Keadaan ketika ancaman bencana sudah menurun mereda exkalasinya/telah berakhir
				melakukan pendataan tentang kebutuhan baik kebutuhan pokok maupun kebutuhan yg lain seperti tersediannyabahan bakar (gas elpigi),beras,lauk pauk dll dan mendata Koperasi, IKM DAN UKM yg terdampak bencana
7	BPPKAD	Memastikan jumlah ketersediaan anggaran pendanaan yang dapat dialokasikan untuk fase tanggap darurat, transisi darurat dan pemulihan dini menuju rehabilitasi dan rekonstruksi yang bersumber baik dari APBD, APBN, CSR maupun dana bantuan masyarakat sesuai dengan aturan perundang-undangan dengan memperhatikan	Melakukan pendampingan dan fasilitasi proses percepatan pencairan dana dalam rangka penanganan dampak bencana.	Membantu proses pergeseran anggaran kepada OPD yang membutuhkan sesuai dengan tugas dan fungsi guna mengakomodir laporan keuangan yang tetap sesuai dengan peraturan perundang undangan dalam fase kebencanaan

		persetujuan TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah).		
			Memastikan terlibat aktif dalam struktur PDB Kabupaten.	
			Koordinasi dan pendataan objek wajib pajak dan retribusi yang terdampak bencana baik skala ringan, sedang bahkan berat yang sangat mempengaruhi capaian PAD.	Melaksanakan sosialisasi, upaya penyesuaian kebijakan dan penguatan kepada wajib pajak dan retribusi bagi yang terdampak bencana.
8	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Selalu Siap Memfasilitasi ADMINDUK Bagi Masyarakat yang Terdampak bencana	Melakukan kaji cepat penyusunandata terpilah kependudukan dari wilayah terdampak.	Memastikan adanya pemutakhiran berkala data dan informasi kependudukan bagi masyarakat terdampak bencana.
			Melakukan pemutakhiran berkala data kependudukan masyarakatterdampak bencana.	
			Menetapkan fasilitator koordinasi terlibat aktif dalam Posko PDB khususnya bagian data dan informasi.	
9	Perum Perhutani KPH Lawu Ds	Peringatan dini, pemasangan papan peringatan	Penyelamatan dan evakuasi terhadap korban terdampak	Bantuan darurat, pendirian posko komando bantuan
		Memberikan sosialisasi tanggap darurat di lokasi rawan bencana	Pemenuhan kebutuhan dasar	Inventarisasi kerusakan dan kerugian

		Pelatihan penanggulangan bencana	Perlindungan terhadap korban	Evakuasi kerusakan
		Pengecekan personil guna mendapatkan data kesiapan anggota	Identifikasi kemungkinan bahaya	Pemulihan/Rehabilitasi
		Peka dan amati lingkungan dan jalur evakuasi terdekat	Prosedur evakuasi bencana	Penentuan status keadaan darurat bencana
		Bekali diri dengan alat keselamatan dan pengetahuan tentang P3K	Tidak panik dalam kondisi penyelamatan yang urgen	Rekontruksi
		Melakukan koordinasi dengan instansi terkait (BPBD, Kodim, Polres)	Menyelamatkan diri sendiri sebelum menyelamatkan orang lain	Pemantauan secara berkala
			Mengendalikan diri, emosi, dan rasa kekawatiran	
10	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan		Melakukan pendataan ketersediaan cadangan pangan di wilayah lahan pertanian terdampak bencana dan sekitarnya	Berkoordinasi dengan Dinas Sosial untuk memastikan jumlah kebutuhan pangan yang tersedia untuk memenuhi kebutuhan tanggap darurat dipengungsian
			Melakukan pendataan lahan pertanian yang terdampak bencana	Melakukan perbaikan sarana dan prasarana dilokasi lahan pertanian
			Melakukan pendataan distribusi pangan dan kebutuhan dilokasi pengusian.	Melakukan pemeriksaan hewan ternak yang kena dampak bencana.
			Melakukan pendataan dan evakuasi di wilayah yang terdampak bencana	Berperan aktif dalam rencana pemulihan ekonomi dibidang pertanian dilingkungan terdampak bencana
11	FPRB	SDM Relawan PB	Mengerahkan SDM Relawan PB	Melakukan Trauma Helling

		Sosialisasi Tanggap Bencana	Melibatkan Masyarakat Sadar Bencana	Melakukan Pemulihan
		Mitigasi Bencana	Memaksimalkan Relawan PB	
12	KODIM 0802/PONOROGO	Berkoordinasi dengan BPBD untuk mengfungsikan sistem peringatan dini serta memaksimalkan peran dan fungsi Babinsa dalam system peringatan dini tanah longsor khususnya di wilayah desa yang berpotensi terdampak.	Memastikan kegiatan pencarian, penyelamatan dan evakuasi korban terlaksana dengan maksimal. Serta penerapan rencana evakuasi harta benda para penyintas bencana, terpenuhinya upaya perlindungan dan pengamanan terhadap penyintas bencana.	Terpenuhinya upaya membantu pemulihan sarana, prasarana, khususnya untuk wilayah yang juga termasuk dalam "objek vital" Pemerintah setempat. Memastikan terpenuhinya pendataan dan pengamanan terhadap para penyintas bencana.
13	PMI Kabupaten Ponorogo	Memberikan penyuluhan dan pelatihan untuk meningkatkan pengetahuan dan kewaspadaan bagi masyarakat dalam menghadapi bencana tanah longsor	Membuka posko dan penggalangan bantuan.	Mengumpulkan segala permasalahan untuk melanjutkan kegiatan pada tahap rehabilitasi
		Menyiapkan kader-kader di tingkat kecamatan atau desa dalam rangka membantu tugas pelayanan PMI.	Memberikan bantuan dan pertolongan kepada para korban (mulai dari tindakan pertolongan pertama, evakuasi, pelayanan kesehatan, penampungan sementara, sampai dengan pembukaan dapur umum).	Melakukan kegiatan konseling untuk meningkatkan kesadaran fungsi sosial masyarakat melalui pendekatan tatap muka.
		Pendataan daerah rawan bencana.	Melakukan asesment untuk mengidentifikasi dampak bencana serta melakukan pengkajian kebutuhan korban.	Mencatat dan mendata kembali sarana prasarana, daya dan dana
		Menyiapkan sarana dan prasarana penanggulangan bencana dengan baik.	Distribusi bantuan kepada para korban sesuai dengan hasil asesment.	Mengevaluasi kegiatan penanggulangan bencana sebagai bahan perbaikan untuk kegiatan penanganan bencana yang akan datang.

		Meningkatkan kerjasama dengan lintas sektoral	Bekerjasama dengan instansi terkait dalam upaya penanganan bencana tanah longsor	
14	Dinas Pendidikan Kabupaten Ponorogo		<ul style="list-style-type: none"> • Memastikan adanya fasilitator koordinasi untuk kajian kebutuhan dan penyelenggaraan pengungsian dan perlindungan • Melaksanakan pendataan tenaga pengajar dan peserta didik di wilayah terdampak bencana 	
			<ul style="list-style-type: none"> • Memastikan adanya layanan pendidikan dalam situasi darurat setelah terjadi bencana 	Memberikan pemenuhan kebutuhan lingkungan belajar yang aman serta jaminan perlindungan dari segala kekerasan, penelantaran dan eksploitasi serta pendampingan psikososial; anak-anak yang terdampak
			<ul style="list-style-type: none"> • Melaksanakan strategi respon yang dirancang dan dilaksanakan dengan cara yang tidak merugikan masyarakat atau penyedia layanan Pendidikan dan tidak memperburuk dampak situasi darurat 	Memastikan penyelenggaraan pendidikan dalam situasi darurat terlaksana sesuai perencanaan yang sudah dibuat dan disepakati bersama
			<ul style="list-style-type: none"> • Berkoordinasi dengan tim Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB) untuk melakukan strategi pembelajaran darurat bencana, inventarisasi satuan pendidikan terdampak dan penyediaan sarana prasarana sekolah darurat 	<ul style="list-style-type: none"> • Pemenuhan kebutuhan guru dan tenaga kependidikan bagi penyelenggaraan satuan pendidikan dalam situasi darurat
			<ul style="list-style-type: none"> • Mengkoordinasikan pemangku kepentingan dengan menyediakan program yang saling menunjang sehingga penyelenggaraan satuan 	<ul style="list-style-type: none"> • Pemenuhan kebutuhan pendampingan psikososial bagi guru

			pendidikan darurat dapat dilakukan secara optimal	<ul style="list-style-type: none"> • Pengelolaan satuan pendidikan darurat mempromosikan ruang belajar sahabat anak
15	RSUD Dr. Harjono S. Ponorogo	Melakukan koordinasi dengan bidang atau bagian di RSUD dalam mempersiapkan penanganan jika ada bencana tanah longsor sewaktu-waktu	Melakukan koordinasi dengan BPBD terkait penanganan korban yang dibawa ke RSUD Dr. Harjono S. Ponorogo	Melakukan koordinasi dengan dinas terkait untuk penanganan bencana tanah longsor utamanya pada penyintas bencana
		Mempersiapkan fasilitas yang dibutuhkan seperti IGD, Ruang Jenazah, Otopsi, dan lain-lain	Mengatur tempat dan jadwal petugas yang ditugaskan dalam penanganan bencana	
			Mengecek fasilitas dan alat yang tersedia yang sekiranya digunakan untuk penanganan	
			Melakukan penanganan korban yang dibawa ke RSUD	
			Mempersiapkan obat-obatan untuk para korban bencana	
			Mempersiapkan tenda darurat di RSUD untuk korban jika dibutuhkan	
			Mempersiapkan ruang jenazah dan tempat otopsi untuk korban yang tidak terkenali	

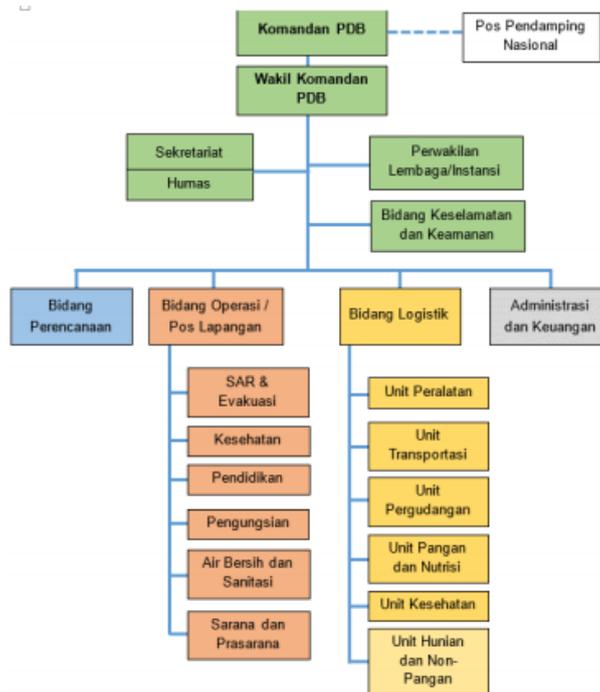
4.2. SASARAN TINDAKAN

Tabel 4.2. Sasaran Tindakan

Fase	Sasaran Tindakan	
Tanggap Darurat	1	Terselenggaranya kaji cepat di kawasan terdampak tanah longsor.
	2	Tersedianya data hasil kaji cepat yang diperbarui setiap hari.
	3	Tersedianya Surat Keputusan Bupati tentang Status Tanggap Darurat Bencana Tanah Longsor.
	4	Terselenggaranya rapat penyusunan rencana operasi tanah longsor
	5	Tersedianya rencana operasi Penanganan Darurat Bencana. (PDB) tanah longsor
	6	Terbentuknya SKPDB tanah longsor Kabupaten Ponorogo.
	7	Terselenggaranya posko PDB tanah longsor.
	8	Terselenggaranya pemenuhan kebutuhan dasar dan perlindungan sosial penyintas.
	9	Terselenggaranya pengamanan aset penyintas di kawasan rawan bencana tanah longsor.
Transisi Darurat ke Pemulihan	1	Diterbitkannya Keputusan Bupati tentang Status Transisi Darurat ke Pemulihan.
	2	Berfungsinya sementara sarana-prasarana layanan publik
	3	Terpenuhinya kebutuhan masa transisi penyintas
	4	Pengakhiran status dari transisi darurat ke pemulihan yang dilanjutkan dengan rehabilitasi dan rekonstruksi.

4.2. Struktur Organisasi Komando

Struktur Organisasi Komando Tanggap Darurat Bencana Kabupaten Ponorogo:



Gambar 4.1 Struktur Organisasi Komando

Sumber: Pedoman 5.0 Perencanaan Kontingensi

4.3. Fungsi dan Kegiatan Pokok

1. Komando Tanggap Darurat Bencana memiliki tugas pokok sebagai berikut.
 - a. Merencanakan operasi penanganan tanggap darurat bencana.
 - b. Mengajukan permintaan kebutuhan bantuan.
 - c. Melaksanakan dan mengkoordinasikan pengerahan sumberdaya untuk penanganan tanggap darurat bencana secara cepat tepat, efisien dan efektif.
 - d. Melaksanakan pengumpulan informasi dengan menggunakan rumusan pertanyaan (lihat Lampiran-1), sebagai dasar perencanaan Komando Tanggap Darurat Bencana tingkat kabupaten/kota/provinsi/nasional.
 - e. Menyebarkan informasi mengenai kejadian bencana dan penanganannya kepada media massa dan masyarakat luas.
2. Fungsi Komando Tanggap Darurat Bencana adalah mengkoordinasikan, mengintegrasikan dan mensinkronisasikan seluruh unsur dalam organisasi komando tanggap darurat untuk penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan pengurusan pengungsi, penyelamatan serta pemulihan sarana dan prasarana dengan segera pada saat kejadian bencana.

4.4. Tugas-Tugas Bidang

Tabel 4.3. Tugas-tugas Bidang

Fungsi	Penjabaran Tugas	Pelaksana Sub-Bidang/ Unit/ Seksi	Penjabaran Tugas
<p>1. Komando, Kendali, Koordinasi, Komunikasi, dan informasi.</p>	<p>a) Mengaktifkan dan meningkatkan Pusat Pengendalian Operasi (Pusdalops) menjadi Pos Komando Tanggap Darurat BPBD Kabupaten/ Kota/ Provinsi atau BNPB, sesuai dengan jenis, lokasi dan tingkatan bencana.</p> <p>b) Membentuk Pos Lapangan (Poslap) di lokasi bencana di bawah komando Pos Komando Tanggap Darurat Bencana BPBD Kabupaten/ Kota/ Provinsi atau BNPB. Contoh tata letak Poslap, lihat Lampiran-6.</p> <p>c) Membuat rencana strategis dan taktis, mengorganisasikan, melaksanakan dan mengendalikan operasi tanggap darurat bencana.</p> <p>d) Melaksanakan komando dan pengendalian untuk pengerahan</p>	<p>Wakil Komando, Kendali, Koordinasi, Komunikasi dan informasi.</p>	<p>a. Membantu Komandan Tanggap Darurat Bencana dalam merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan dan mengendalikan komando tanggap darurat bencana.</p> <p>b. Mengkoordinir tugas-tugas sekretariat, humas, keselamatan dan keamanan serta perwakilan instansi/ lembaga.</p> <p>c. Mewakili Komandan Tanggap Darurat Bencana, apabila Komandan Tanggap Darurat Bencana berhalangan.</p> <p>d. Wakil Komandan Tanggap Darurat Bencana bertanggung jawab langsung kepada Komandan Tanggap Darurat Bencana.</p>

Fungsi	Penjabaran Tugas	Pelaksana Sub-Bidang/ Unit/ Seksi	Penjabaran Tugas
	<p>sumber daya manusia, peralatan, logistik dan penyelamatan serta berwenang memerintahkan para pejabat yang mewakili instansi/lembaga/organisasi yang terkait dalam memfasilitasi aksesibilitas penanganan tanggap darurat bencana.</p> <p>e) Komandan Tanggap Darurat Bencana bertanggung jawab langsung kepada Kepala BNPB/BPBD Provinsi/ Kabupaten/Kota, sesuai dengan tingkat dan kewenangannya.</p>		
		Sekretariat	<p>a. Menyelenggarakan administrasi umum dan pelaporan.</p> <p>b. Pelayanan akomodasi dan konsumsi bagi personil Komando Tanggap Darurat Bencana.</p> <p>c. Bertugas dan bertanggung jawab atas pengumpulan, evaluasi, analisis data dan informasi yang berhubungan dengan penanganan tanggap darurat bencana serta</p>

Fungsi	Penjabaran Tugas	Pelaksana Sub-Bidang/ Unit/ Seksi	Penjabaran Tugas
			<p>menyiapkan dokumen rencana tindakan operasi tanggap darurat.</p> <p>d. Sekretaris bertanggung jawab langsung kepada Komandan Tanggap Darurat Bencana.</p>
		Humas	<p>a. Menghimpun data dan informasi penanganan bencana yang terjadi.</p> <p>b. Membentuk jaringan informasi dan komunikasi serta menyebarkan informasi tentang bencana tersebut ke media massa dan masyarakat luas.</p> <p>c. Memastikan adanya mekanisme umpan balik yang kredibel dan bisa dipertanggungjawabkan.</p> <p>d. Kepala Humas bertanggung jawab langsung kepada Komandan Tanggap Darurat Bencana.</p>
		Perwakilan Lembaga/instansi	<p>a. Perwakilan instansi/ lembaga bertugas untuk membantu Komandan Tanggap Darurat Bencana berkaitan dengan permintaan dan pengerahan sumberdaya yang dibutuhkan dari instansi/lembaga.</p> <p>b. Perwakilan instansi/lembaga secara operasional bertanggung jawab langsung</p>

Fungsi	Penjabaran Tugas	Pelaksana Sub-Bidang/ Unit/ Seksi	Penjabaran Tugas
			kepada Komandan Tanggap Darurat Bencana atas pelaksanaan tugasnya dan secara administratif bertanggung jawab kepada pimpinan instansi/lembaga terkait.
		Bidang Keselamatan dan Keamanan	<ul style="list-style-type: none"> a. Menjamin kesehatan dan keselamatan seluruh personil Komando Tanggap Darurat Bencana dalam menjalankan tugasnya. b. Menjaga keamanan penanganan tanggap darurat bencana serta mengantisipasi hal-hal di luar dugaan atau suatu keadaan yang berbahaya. c. Kepala Keselamatan dan Keamanan bertanggung jawab langsung kepada Komandan Tanggap Darurat Bencana.
2. Administrasi dan Keuangan	<ul style="list-style-type: none"> a. Melaksanakan semua administrasi keuangan. b. Menganalisis kebutuhan dana dalam rangka penanganan tanggap darurat bencana yang terjadi. c. Mendukung keuangan yang dibutuhkan dalam rangka 		

Fungsi	Penjabaran Tugas	Pelaksana Sub-Bidang/ Unit/ Seksi	Penjabaran Tugas
	<p>komando tanggap darurat bencana yang terjadi</p> <p>d. Kepala Bidang Administrasi dan Keuangan bertanggung jawab langsung kepada Komandan Tanggap Darurat Bencana.</p>		
3. Perencanaan	<p>a. Bidang operasi bertugas dan bertanggungjawab dalam penyiapan, penyusunan, dan perencanaan tindakan penanganan tanggap darurat bencana.</p> <p>b. Kepala Perencanaan bertanggung jawab langsung kepada Komandan Tanggap Darurat Bencana.</p>		
4. Bidang Operasi/ Pos Lapangan	<p>a. Bidang Operasi bertugas dan bertanggung jawab atas semua pelaksanaan operasi penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan pengurusan pengungsi,</p>	SAR & Evakuasi.	<p>a. Mengkoordinir unsur satuan/ organisasi/ instansi yang terlibat dalam pencarian dan penyelamatan korban serta pertolongan darurat.</p> <p>b. Mengkoordinir kegiatan evakuasi, pengungsian dan pengaturan tempat korban bencana yang telah di tentukan.</p>

Fungsi	Penjabaran Tugas	Pelaksana Sub-Bidang/ Unit/ Seksi	Penjabaran Tugas
	<p>penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana dengan cepat, tepat, efisien dan efektif berdasarkan satu kesatuan rencana tindakan penanganan tanggap darurat bencana.</p> <p>b. Kepala Bidang Operasi bertanggung jawab langsung kepada Komandan Tanggap Darurat Bencana.</p>		<p>c. Menyiapkan sarana dan prasarana/ peralatan yang berkaitan dengan kegiatan evakuasi dan pengungsian.</p> <p>d. Melaksanakan evaluasi setiap selesai kegiatan dalam pelaksanaan tugas.</p> <p>e. Bertanggung jawab dan melaporkan kegiatan kepada Komandan Tanggap Darurat.</p>
		Kesehatan	<p>a. Mengkoordinasikan tugas tugas medis dengan instansi lain yang berkaitan dengan tugas penanggulangan bencana alam.</p> <p>b. Melaksanakan evaluasi medis pada setiap selesai kegiatan dalam pelaksanaan tugas.</p> <p>c. Memastikan terpenuhinya kebutuhan penerapan protokol kesehatan terhadap COVID-19 dalam operasi TDB.</p> <p>d. Bertanggung jawab dan melaporkan kegiatan kepada Komandan Tanggap Darurat.</p>
		Pendidikan	<p>a. Memilah pendataan terkait anak sesuai dengan jenis kelamin dan usia sekolah.</p>

Fungsi	Penjabaran Tugas	Pelaksana Sub-Bidang/ Unit/ Seksi	Penjabaran Tugas
			<ul style="list-style-type: none"> b. Memilah dan menganalisis kebutuhan pendidikan anak pada masa TDB. c. Memastikan terpenuhinya kebutuhan Pendidikan anak di masa TDB. d. Melakukan evaluasi setiap selesai kegiatan dalam pelaksanaan tugas. e. Melaporkan hasil kegiatan kepada kepala bidang operasi
		Pengungsian	<ul style="list-style-type: none"> a. Melakukan pendataan persebaran penyintas dan pengungsian. b. Memastikan adanya fasilitator koordinasi dan komite warga penyintas di pengungsian. c. Mengkoordinasikan kebutuhan dan lokasi/ tempat untuk pengungsian. d. Memastikan adanya tempat dan mekanisme untuk mendukung penerapan Prokes Covid-19 mulai dari tempat karantina mandiri, baik yang berada di shelter pengungsian terkonsentrasi (Komunal) maupun shelter yang terpisah dari pengungsian. e. Memastikan pengumpulan data terpilah berdasarkan jenis kelamin, usia, disabilitas, kebutuhan perempuan (hamil dan menyusui),

Fungsi	Penjabaran Tugas	Pelaksana Sub-Bidang/ Unit/ Seksi	Penjabaran Tugas
			<p>tingkat risiko (dalam konteks covid-19; <i>suspect, probable/</i> terkonfirmasi, ODHA).</p> <p>f. Mengkoodinir pendataan, pendistribusian dan pendampingan pendistribusian terkait pemenuhan kebutuhan dasar bagi pengungsi dan analisis kebutuhan bagi kelompok berisiko tinggi.</p> <p>g. Memastikan pengungsi tercukupi kebutuhannya serta tidak tumpang tindih dalam pemberian layanan.</p> <p>h. Memastikan pengungsi ikut berpartisipasi aktif dalam upaya penyediaan pemberi layanan di pengungsian.</p> <p>i. Memastikan berfungsinya manajemen informasi terkait dengan bidang pengungsian dan perlindungan maupun terintegrasi dengan bagian data dan informasi dalam SKPDB.</p> <p>j. Melakukan evaluasi setiap selesai kegiatan dalam pelaksanaan tugas.</p> <p>k. Mengkoordinasikan hasil kegiatan kepada kepala bidang operasi</p>

Fungsi	Penjabaran Tugas	Pelaksana Sub-Bidang/ Unit/ Seksi	Penjabaran Tugas
		Air Bersih dan Sanitasi	<ul style="list-style-type: none"> a. Menyiapkan personil dan melakukan kajian kebutuhan air yang akan di gunakan dalam pengungsian maupun operasi TDB. b. Berkoordinasi dengan bidang lain terkait pengadaan air bersih dan sanitasi. c. Memastikan dan mendukung penyelenggaraan pemenuhan kebutuhan air dengan kualitas yang memadai untuk pribadi maupun rumah tangga. d. Tersedianya air untuk mendukung pencapaian penerapan protocol Kesehatan Covid-19. e. Memastikan dan mendukung bantuan dalam bentuk pengadaan air beserta fasilitas pendukungnya. f. Memastikan bantuan air yang dapat diminum langsung sesuai standar bantuan dan standar minimum bantuan. g. Memastikan dan mendukung pelayanan kesehatan lingkungan yang berkaitan dengan saluran air (<i>drainase</i>) pengelolaan limbah cair dan limbah padat serta pembuangan tinja. h. Melakukan evaluasi setiap selesai kegiatan dalam pelaksanaan tugas.

Fungsi	Penjabaran Tugas	Pelaksana Sub-Bidang/ Unit/ Seksi	Penjabaran Tugas
			i. Mengkoordinasikan hasil kegiatan dengan kepala bidang operasi
		Sarana & Prasarana.	a. Menyiapkan personil dan peralatan yang berkaitan dengan kebutuhan sarpras sesuai dengan skala prioritas. b. Berkoordinasi dengan instansi lain yang berkaitan dengan sarpras yang dapat digunakan dalam pemulihan fasilitas umum dan fasilitas kritis. c. Melaksanakan evaluasi pada setiap selesai kegiatan dalam pelaksanaan tugas. d. Bertanggung jawab dan melaporkan kegiatan kepada Komandan Tanggap Darurat.
4. Logistik	a. Penyediaan fasilitas, jasa, dan bahan-bahan serta perlengkapan tanggap darurat. b. Melaksanakan penerimaan, penyimpanan, pendistribusian dan transportasi bantuan logistik dan peralatan. c. Melaksanakan penyelenggaraan dukungan dapur umum, air bersih dan sanitasi umum.	Unit Peralatan.	a. Melakukan pendataan awal segala bentuk alat pada pemerintah daerah, dunia usaha dan masyarakat yang tersedia untuk membantu kegiatan pencarian, penyelamatan, dan evakuasi masyarakat yang terdampak bencana, serta bisa digunakan untuk membantu pemenuhan kebutuhan dasar dalam rangka pemulihan segera sarana dan prasarana vital dalam rangka melaksanakan penanggulangan bencana secara, cepat, tepat, terpadu dan akuntabel.

Fungsi	Penjabaran Tugas	Pelaksana Sub-Bidang/ Unit/ Seksi	Penjabaran Tugas
	<p>d. Mengkoordinasikan semua bantuan logistik dan peralatan dari instansi/lembaga/organisasi yang terkait.</p> <p>e. Kepala bidang logistik dan peralatan bertanggung jawab langsung kepada Komandan Tanggap Darurat Bencana.</p>		<p>b. Memastikan penyediaan peralatan yang tersedia dan layak pakai sesuai data untuk kegiatan pencarian, penyelamatan dan evakuasi, pemenuhan kebutuhan dasar, proses pemulihan sarana dan prasarana vital yang terdampak bencana;</p> <p>c. Mengambil keputusan secara cepat dan tepat sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam kondisi tertentu demi meminimalisir dampak dari bencana tanah longsor.</p> <p>d. Melakukan kegiatan evaluasi dan koordinasi lintas sektor secara rinci secara berkala sesuai dengan kondisi guna pengambilan keputusan selanjutnya dalam masa tanggap darurat;</p>

Fungsi	Penjabaran Tugas	Pelaksana Sub-Bidang/ Unit/ Seksi	Penjabaran Tugas
		Unit Transportasi.	<ul style="list-style-type: none"> a. Melakukan pendataan awal seluruh alat transportasi pada pemerintah daerah, dunia usaha dan masyarakat yang tersedia dan siap digunakan dalam rangka penanggulangan bencana secara, cepat, tepat, terpadu dan akuntabel. b. Mengkoordinir pengoperasian alat transportasi yang siap digunakan untuk memobilisasi masyarakat korban bencana tanah longsor ke tempat yang aman/ TES/ TEA. c. Membantu satuan yang bertugas dalam kegiatan pencarian, penyelamatan, dan evakuasi. d. Melakukan kegiatan evaluasi dan koordinasi lintas sektor secara rinci secara berkala sesuai dengan kondisi guna pengambilan keputusan selanjutnya dalam masa tanggap darurat.
		Unit Pergudangan.	<ul style="list-style-type: none"> a. Memastikan ketersediaan cadangan BBM untuk pengoperasian alat-alat transportasi yang digunakan dalam proses penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat. b. Memastikan kesiapan dan melakukan pemeliharaan peralatan yang digunakan untuk kegiatan penanggulangan bencana.

Fungsi	Penjabaran Tugas	Pelaksana Sub-Bidang/ Unit/ Seksi	Penjabaran Tugas
			<ul style="list-style-type: none"> c. Berkoordinasi secara berkala dengan TNI dan POLRI secara terpadu untuk memastikan kesiapan dan ketersediaan logistik. d. Memastikan tersedia gudang yang memadai untuk menyimpan kebutuhan makanan dan kebutuhan lainnya untuk korban bencana. e. Memastikan pengelola melakukan pengadministrasian logistik dengan baik.
		Unit Pangan dan Nutrisi.	<ul style="list-style-type: none"> a. Melaksanakan inventarisasi dan penyediaan makanan siap saji dalam operasi PDB dan kebutuhan penyintas. b. Memastikan ketersediaan bahan makanan sudah sesuai kebutuhan nutrisi untuk para personil yang menjalankan operasi PDB dan penyintas. c. Membuat sistem pengendalian, penyaluran, penyimpanan, dan pemeliharaan di dalam unit Pangan dan Nutrisi. d. Mendata kesenjangan yang muncul dalam memenuhi kebutuhan pangan dan nutrisi penyintas yang muncul.

Fungsi	Penjabaran Tugas	Pelaksana Sub-Bidang/ Unit/ Seksi	Penjabaran Tugas
			<ul style="list-style-type: none"> e. Memastikan terpenuhinya bantuan pangan dan nutrisi dalam bentuk makan dan atau masakan yang disediakan oleh dapur umum. f. Memastikan bantuan pangan bagi kelompok rentan dalam bentuk khusus. g. Membuat suatu penganggaran kebutuhan pangan atas dasar kesenjangan yang muncul di tingkat kabupaten. h. Berkoordinasi dengan Seksi pengungsian untuk mendapatkan data terpilah untuk kebutuhan nutrisi para penyintas. i. Berkoordinasi dengan Seksi air bersih dan sanitasi, dalam rangka pemenuhan kebutuhan air bersih untuk operasional kebutuhan pangan dan nutrisi. j. Memastikan terpenuhinya standar pelayanan minimal dalam pemenuhan kebutuhan dasar. k. Memastikan ketersediaan bantuan pangan bagi kelompok berisiko tinggi.
		Unit Kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> a. Mengkoordinir unit-unit kesehatan yang terlibat dalam operasi penanggulangan bencana.

Fungsi	Penjabaran Tugas	Pelaksana Sub-Bidang/ Unit/ Seksi	Penjabaran Tugas
			b. Menyiapkan personel dan peralatan yang berkaitan dengan kegiatan pengobatan dan pertolongan medis.
		Unit Hunian dan Non Pangan	a. Membuat sistem pengendalian, penyaluran, penyimpanan, dan pemeliharaan di dalam unit Non-Pangan. b. Menginventarisasi jumlah berbagai macam jenis tenda pada pemerintah daerah, dunia usaha dan masyarakat yang tersedia yang siap difungsikan sebagai hunian sementara pada saat tanggap darurat. c. Memastikan terpenuhinya bantuan nonpangan kepada pengungsi di tempat hunian sementara dalam bentuk peralatan masak, bahan bakar, penerangan dan alat-alat perkakas.

4.5 Instruksi Koordinasi

1. Pengkajian Cepat Akibat Bencana Tanah Longsor.

BPBD Kabupaten Ponorogo melakukan pengkajian cepat untuk menilai akibat langsung dari bencana longsor. Pengkajian dilakukan dengan pengumpulan data primer dan sekunder. Data primer dilakukan dengan menugaskan dan mengerahkan Tim Reaksi Cepat ke lokasi terdampak bencana. Data sekunder dihimpun dari pelaporan, media massa, instansi/lembaga terkait, masyarakat, internet, dan informasi lainnya yang relevan. Lingkup kaji cepat meliputi hal-hal sebagai berikut:

- a. Apa : Jenis bencana.
- b. Bilamana : Hari, tanggal, bulan, tahun, jam, waktu setempat.
- c. Di mana : Tempat/lokasi/daerah bencana.
- d. Berapa : Jumlah korban, kerusakan sarana dan prasarana.
- e. Penyebab : Penyebab terjadinya bencana.
- f. Bagaimana : Upaya yang telah dilakukan.

2. Penetapan Status / Tingkat Bencana

Bupati Kabupaten Ponorogo menetapkan Status Darurat Bencana Longsor Kabupaten Ponorogo dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut.

- a. Laporan BPBD Kabupaten Ponorogo atas hasil pengkajian cepat bencana tanah longsor.
- b. Pertimbangan para pihak dalam forum rapat dengan instansi/lembaga/organisasi.
- c. Penerbitan Surat Keputusan Bupati tentang Status Darurat Bencana Kabupaten Ponorogo.
 - 1) Surat Keputusan Bupati sekaligus sebagai keputusan mengaktifasi rencana kontingensi operasi penanganan kedaruratan, melalui pemutakhiran atau penyesuaian situasi dan dampak kejadian yang ada, menjadi Rencana Operasi Penanganan Darurat Bencana.
 - 2) Dalam Surat Keputusan Bupati sekaligus menegaskan keputusan aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Kabupaten

Ponorogo dan personil-personil yang diberi mandat sebagai pengampu tugas pendukung penanganan kedaruratan bencana longsor.

- 3) Dalam Surat Keputusan Bupati sekaligus memastikan dan menegaskan pemerintah kabupaten merupakan pengampu utama penanganan kedaruratan melalui Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Kabupaten Ponorogo dan Pos Komando Kabupaten Ponorogo.
- 4) Dalam Surat Keputusan Bupati sekaligus memastikan penggunaan relokasi anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Ponorogo untuk penanganan kedaruratan bencana.

3. Penyusunan Rencana Operasi

Penyusunan Rencana Operasi Penanganan Kedaruratan Bencana berdasarkan Rencana Kontingensi yang disesuaikan dengan fakta dampak langsung bencana di lokasi kejadian.

4. Penyelenggaraan Operasi

Penanganan Kedaruratan Bencana longsor, meliputi hal-hal sebagai berikut:

- a. Pengerahan sumberdaya di Kabupaten Ponorogo.
- b. Aktivasi Pos Lapangan.
- c. Aktivasi Jaringan Komunikasi.

5. Pengorganisasian

Sistem Komando Tanggap Darurat Bencana Kabupaten Ponorogo.

5.1. Administrasi

Mekanisme administrasi dalam pendukung penangan darurat bencana longsor di Kabupaten Ponorogo adalah sebagai berikut:

1. Pada saat awal kejadian bencana, seluruh sumber daya lokal Kabupaten Ponorogo dioptimalkan baik dari sektor pemerintah, lembaga usaha, lembaga sosial dan juga masyarakat (seperti APBD, APBDes, membuka rekening donasi dari ASN, swasta, lembaga sosial dan masyarakat umum).
2. Jika sumberdaya keuangan Kabupaten Ponorogo tidak mencukupi dalam penanganan bencana maka Pemerintah Kabupaten Ponorogo dapat meminta bantuan pada Pemerintah Pusat.
3. Pemerintah Pusat, melalui BNPB, dapat memberikan instruksi pada pemerintah provinsi terdekat yang memiliki kapasitas untuk membantu penanganan darurat bencana di Kabupaten Ponorogo.
4. Pemerintah Kabupaten Ponorogo dapat meminta dukungan penanganan darurat bencana ke Pemerintah Pusat terkait Dana Siap Pakai (DSP), Biaya Tidak Terduga (BTT), Pendampingan administrasi kegiatan, serta logistik dan peralatan yang tidak dapat dipenuhi oleh Kabupaten Ponorogo.
 - a. Mekanisme Pencairan Belanja Tidak Terduga (BTT) berdasarkan Permendagri No 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah:
 - 1) Penetapan SK Tanggap Darurat.
 - 2) Penetapan SK Struktur Komando Penanggulangan Darurat.
 - 3) Penetapan SK Pengguna Anggaran dan bendahara penerima.
 - 4) BPBD Provinsi Jawa Timur mengajukan surat permohonan dan rencana kebutuhan belanja kepada Badan Keuangan Daerah (BKD) selaku Bendahara Umum Daerah (BUD).
 - 5) Badan Keuangan Daerah (BKD) selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) mencairkan dana kebutuhan belanja kepada BPBD Provinsi Jawa Timur.

- 6) Badan Keuangan Daerah (BKD) selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) mencairkan dana kebutuhan belanja paling lambat 1 hari kerja terhitung sejak menerimanya rencana kebutuhan belanja.
- b. Mekanisme pencairan Dana Siap Pakai (DSP) berdasarkan Perka BNPB No 6A Tahun 2011 tentang Pedoman Penggunaan Dana Siap Pakai:
- 1) Penetapan SK Tanggap Darurat.
 - 2) Penetapan SK Struktur Komando Penanggulangan Darurat.
 - 3) Surat Usulan Gubernur tentang bantuan Dana Siap Pakai (DSP) ke BNPB.
 - 4) Penetapan SK Pengguna Anggaran dan Bendahara Penerima.
 - 5) Surat pernyataan siap menerima dana hibah.
 - 6) Kwitansi dan berita acara penyerahan bantuan.
 - 7) Kepala BPBD Kabupaten Ponorogo berwenang mengelola bantuan Dana Siap Pakai (DSP).

Adapun jenis sumber keuangan Penanganan Darurat Bencana Longsor di Kabupaten Ponorogo adalah sebagai berikut:

Tabel 5.1. Sumber Keuangan Penanganan Darurat

No	Jenis	Sumber Keuangan Penanganan Darurat Bencana Tanah Longsor
1	APBN	Dana Siap Pakai: BNPB
2	APBD Provinsi	Belanja Tak Terduga: Pemprov Jawa Timur
3	APBD Kabupaten	Belanja Tak Terduga: Kabupaten Ponorogo
4	APBDesa	Belanja Tak Terduga: Pemerintah Desa Terdampak
5	Swasta	Donasi tidak mengikat dari CSR Lembaga Usaha
6	NGO/CSO	Donasi tidak mengikat dari Lembaga Mitra
7	Masyarakat	Donasi tidak mengikat dari Penggalangan Dana Masyarakat Ponorogo dan terbuka untuk umum.

5.2. Logistik

Mekanisme logistik dalam mendukung penanganan darurat bencana di wilayah di Kabupaten Ponorogo adalah sebagai berikut:

1. Menyiapkan *buffer stock* (persediaan/cadangan) kebutuhan dasar yang disiapkan oleh Dinas Sosial untuk mendukung operasi penanganan di tiap kabupaten jika diperlukan.
2. Melakukan koordinasi ke OPD, Instansi vertikal hingga tingkat Provinsi Jawa Timur yang terkait.
3. Memfasilitasi dan mengkoordinir kerjasama multipihak untuk pengadaan logistik.
4. Memfasilitasi dan mengkoordinir bantuan dengan kabupaten terdekat.
5. Permintaan bantuan ke provinsi terdekat (kebutuhan dasar dan peralatan)
6. Mendistribusikan kebutuhan tepat sasaran dan tepat waktu.
7. Memastikan penerimaan bantuan dan relawan masuk dalam satu pintu tercatat dan termonitor dalam sistem Posko.
8. Menjaga alur penerimaan bantuan dan relawan dengan membangun mekanisme pelaporan ke Posko.
9. Sistem pelaporan dan pencatatan di lapangan agar memisahkan antar relawan dan bantuan barang kemanusiaan untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas laporan.
10. Memberikan laporan kegiatan kepada Komandan PDB Provinsi Jawa Timur.

BAB VI PENGENDALIAN

6.1. Komando

Komando Operasi Penanganan Darurat Bencana Tanah Longsor di Kabupaten Ponorogo Provinsi Jawa Timur dipimpin Bupati/Wakil Bupati dan/atau Komandan yang ditunjuk oleh Bupati:

a. Pos Komando

Pos Komando Tanggap Darurat Bencana Kabupaten Ponorogo, selanjutnya disebut Pos Komando/Posko berfungsi sebagai pusat komando operasi darurat bencana untuk mengkoordinasikan, mengendalikan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan darurat bencana, berkedudukan di Pusdalops BPBD Kabupaten Ponorogo (Sebelah Kantor Bupati Ponorogo) dengan koordinat - 7.872041589053598, 111.49161061777679

b. Pos Lapangan

Pos Lapangan Penanganan Darurat Bencana Kabupaten Ponorogo, selanjutnya disebut Pos Lapangan PDB, berfungsi sebagai pelaksana operasi pendukung penanganan darurat bencana kepada SKPDB Kecamatan, berkedudukan dan lebur dalam Komando SKPDB di masing-masing Pos Lapangan Kecamatan.

Tabel 6.1. Pos Lapangan

Kecamatan (Untuk Renkon)	Pos Lapangan	Koordinat	
		Lintang	Bujur
Ngrayun	Kantor Kecamatan Ngrayun	-8.072466194710797	111.44679013926553
Pudak	Kantor Kecamatan Pudak	-7.870977051074354	111.71287357049546
Pulung	Kantor Kecamatan Pulung	-7.8757593463663795	111.61731567975463
Badegan	Kantor Kecamatan	-7.872284697336199	111.32723381126
Sawoo	Kantor Kecamatan Sawoo	-7.967706044195881	111.55596366069204
Slahung	Kantor Kecamatan	-8.032692717388755	111.41479656174334
Sooko	Kantor Kecamatan Sooko	-7.909265366937933	111.67286110000002
Ngebel	Kantor Kecamatan Ngebel	-7.791507095748299	111.63629313558258
Sambit	Kantor Kecamatan Sambit	-7.961162159110355	111.51005345892102

6.2. Kendali

Komandan PDB melaksanakan fungsi pengendalian untuk pengerahan sumber daya manusia, peralatan, logistik dan operasi penanganan darurat bencana.

6.3. Koordinasi

Koordinasi melibatkan perwakilan seluruh SKPDB bersifat wajib, dipimpin oleh komandan dan dilaksanakan di Pos Komando Tanggap Darurat 1 (satu) kali setiap hari selama masa darurat pada waktu yang disepakati. Koordinasi membahas laporan perkembangan oleh setiap bidang operasi serta alternatif-alternatif solusi.

6.4. Komunikasi

Sarana dan prasarana komunikasi merupakan salah satu fasilitas komando darurat bencana untuk mengatur jalur informasi, mendukung arus komunikasi, kendali, koordinasi secara internal maupun eksternal. Komandan melakukan komunikasi kepada semua unsur organisasi, pos lapangan, para pihak yang terkait. Komandan PDB bertanggung jawab atas kejelasan arus komunikasi untuk mendukung efektivitas operasi darurat longsor dan menyampaikan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan dengan dibantu oleh Bagian Data Informasi melalui media dan alat komunikasi. Moda komunikasi dalam komando penanganan darurat bencana Kabupaten Ponorogo adalah sebagai berikut:

1. Pos Komando
 - a. Telepon hotline; 0812 5975 2500
 - b. Telepon genggam/ HP/ Whatsapp/ Telegram dari masing – masing Kepala Bidang yang bertugas dalam struktur SKPDB aktif.
 - c. Radio
 - 1) Frekuensi RAPI: 142.90
2. Pos Lapangan
 - a. Telepon genggam/ HP/ Whatsapp/ Telegram Kepala Kantor Kecamatan atau Camat di seluruh wilayah terdampak bencana.

6.5. Informasi

Informasi dapat diperoleh dan dianalisis dari berbagai sumber termasuk laporan aparat desa dan kecamatan serta berbagai media sosial secara *real-time*. Informasi tersebut dapat dijadikan acuan untuk pengambilan

keputusan oleh Komandan Operasi dan yang terlibat di dalam Struktur Komando Penanggulangan Darurat Bencana. Pengelolaan informasi tidak hanya mencakup pengolahan data saja, tetapi juga sistem dan aplikasi yang digunakan.

BAB VII RENCANA TINDAK LANJUT

7.1. Komitmen Para Pihak dalam Penanganan Kedaruratan dan Terhadap Rencana Kontingensi Tanah Longsor

Tabel 7.1. Komitmen Para Pihak dalam Penanganan Kedaruratan dan Terhadap Rencana Kontingensi Tanah Longsor

NO	INSTANSI	KEGIATAN	KOORDINATOR	PELAKU
1	DINAS KESEHATAN	1. Melakukan pelatihan tentang kesiapsiagaan bencana	1. Dinas Kesehatan	1. Rumah Sakit
		2. Pembentukan disaster medical team (DMT)	2. BPBD	2. Puskesmas
		3. Menyiapkan protap darurat bencana tanah longsor		3. Klinik Kesehatan
		4. Simulasi penanganan korban bencana tanah longsor		4. Organisasi Profesi Kesehatan
		5. Simulasi Renkon tanah longsor		5. Potensi - potensi di bidang kesehatan (PMI, Pramuka, Relawan, Orari)
		6. Mensosialisasikan Renkon tanah longsor ke seluruh Puskesmas, klinik kesehatan, apotek, dan RSUD di Wilayah Ponorogo		6. Tim Disaster Medical Team (DMT)
		7. Meyiapkan fasilitas kesehatan yang tidak termasuk zona tanah longsor sebagai penyangga pelayanan kesehatan		7. Lintas Sektor (BPBD, TNI, POLRI, DINSOS, dll)
		8. Koordinasi dengan Dinas terkait untuk pembangunan RS lapangan dalam situasi darurat		
		9. Memastikan penerapan Protokol COVID-19 dalam pengelolaan pengungsian		
		10. Koordinasi dengan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur terkait dengan pemenuhan kebutuhan logistik (obat, alkes, SDM tenaga kesehatan)		

NO	INSTANSI	KEGIATAN	KOORDINATOR	PELAKU
2	BPPKAD	Koordinasi dengan Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat, dan para pelaku dunia usaha untuk memastikan ketersediaan bantuan dana di luar APBD yang sudah dianggarkan untuk operasi tanggap darurat bencana.		
		Dalam fase darurat bencana, memfasilitasi dan memastikan proses pencairan dana yang bersumber dari BTT APBD sesuai dengan PKB dari OPD yang membutuhkan sesuai dengan tugas dan fungsi serta mengacu pada prosedur tata aturan yang berlaku.		
		Menyusun mekanisme pergeseran atau perubahan anggaran kepada OPD yang membutuhkan sesuai dengan tugas dan fungsinya.		
		Mensosialisasikan dokumen Renkon Tanah Longsor kepada wajib pajak dan retribusi.		
3	Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Ponorogo	Mendukung proses harmonisasi dan sinkronisasi terhadap produk hukum daerah yang terkait penanganan bencana	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Ponorogo	Bagian Hukum Sekretariat Daerah Ponorogo
4	DINAS INDAKOP	Menyalurkan bantuan dari pelaku bisnis baik Koperasi, IKM maupun UMKM	Kepala Dinas Indakop	karyawan dinas perdakum
5	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil(DISDUKCAPIL)	Penyiapan data penduduk yang berada di wilayah rawan terdampak bencana tanah longsor.	DISDUKCAPIL	Operator computer bagian pendataan DISDUKCAPIL.

NO	INSTANSI	KEGIATAN	KOORDINATOR	PELAKU
		Dalam fase darurat bencana tanah longsor, menunjuk salah satu Pejabat DISDUKCAPIL untuk menjadi seorang fasilitator koordinasi yang terlibat aktif dalam SKPDB Kabupaten khususnya dalam urusan pendataan terpilah dan	DISDUKCAPIL	DISDUKCAPIL
		Pemutakhiran data terpilah kependudukan wilayah terdampak bencana.		
		Mengarsipkan Renkon Longsor dalam bentuk digital untuk kemudian disebarluaskan kepada para pelaku usaha pariwisata di wilayah Ponorogo khususnya di wilayah yang berpotensi terdampak bencana Tanah Longsor.	DISDUKCAPIL	UPT DISBUDPARPORA, Pokdarwis, Wisatawan.
6	Dinas Lingkungan Hidup	Identifikasi Personil untuk menjadi fasilitator koordinsi dan terlibat aktif dalam SKPBD Kabupaten	Kepala Bidang PSP DLH	Tim teknis yang ditunjuk kepala bidang
		Identifikasi peralatan/sarana prasarana DLH	Kepala Bidang PSP DLH	Tim teknis yang ditunjuk kepala bidang
		Menyusun tim emergency response dan fasilitator koordinasi untuk terlibat aktif dalam SKPBD Kabupaten khususnya bidang pengungsian dan perlindungan		
		Menyusun /memutakhirkan rencana evakuasi internal DLH		
		Menyusun /memutakhirkan rencana pengelolaan limbah dan penyehatan lingkungan untuk lokasi pengungsian penyintas bencana		

NO	INSTANSI	KEGIATAN	KOORDINATOR	PELAKU
7	Perum Perhutani KPH Lawu Ds	Inventarisasi lokasi rawan bencana alam	Wakil ADM/KSKPH Ponorogo	Danru Polhut Mob dan Anggota
		Sosialisasi tindakan menghadapi bencana alam		Asper/KBKPH
		Pelatihan dan simulasi evakuasi dalam menghadapi bencana alam		KRPH (Kepala Kesatuan Pemangkuan Hutan)
		Menetapkan lokasi rawan bencana alam		Mandor Polter
		Membentuk Tim Siaga Bencana Alam		Satgas Penanggulangan Bencana
		Menyiapkan sarpra penanggulangan bencana		
		Koordinasi dengan Instansi terkait (BPBD, Kodim, Polres)		
8	Perum Perhutani KPH MADIUN	Inventarisasi lokasi rawan bencana alam	Wakil ADM/KSKPH Madiun Selatan	Danru Polhut Mob dan Anggota
		Sosialisasi tindakan menghadapi bencana alam		Asper/KBKPH
		Pelatihan dan simulasi evakuasi dalam menghadapi bencana alam		KRPH (Kepala Resort Pemangkuan Hutan)
		Menetapkan lokasi rawan bencana alam		Mandor Polhutter (Polisi Hutan Teritorial)
		Membentuk Tim Siaga Bencana Alam		Satgas Penanggulangan Bencana
		Menyiapkan sarpra penanggulangan bencana		
		Koordinasi dengan Forkopinda (BPBD, Kodim, Polres dan instansi terkait lainnya)		
9	Satpol PP Kab. Ponorogo	Penyiapan personil baik linmas kabupaten, kecamatan, desa beserta peralatannya	Satpol PP (Linmas)	Anggota Linmas Kabupaten, Kecamatan, Desa

NO	INSTANSI	KEGIATAN	KOORDINATOR	PELAKU
10	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan	Menyiapkan data penduduk, jumlah Ternak, luas Lahan Pertanian dan data pendukung lainnya	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan	Operator computer Dinas
11	FPRB PONOROGO	Sosialisasi Penanggulangan Bencana	FPRB	MASYARAKAT
		Penguatan Dan Pelatihan Relawan		RELAWAN
		Pemetaan Lokasi Bencana		FPRB
12	KODIM 0802/PONOROGO	Pengerahan pasukan dan personil untuk terlibat aktif dalam operasi tanggap darurat khususnya bidang SAR.	Kodim 0802/Ponorogo	Anggota Koramil 01 s/d 21
		Monitoring wilayah rawan bencana.		
		Membantu instansi terkait dalam pemulihan wilayah terdampak.		
		Terlibat aktif dalam pengamanan dan keselamatan relawan, personil PDB, distribusi bantuan dan penyintas bencana.		
		Melaksanakan sosialisasi Renkon bencana tanah longsor oleh Babinsa di kewilayahan.		
13	PMI PONOROGO	Pelatihan Relawan PMI	PMI	Relawan PMI (Pelajar dan Mahasiswa)
14	Dinas Pendidikan Kabupaten Ponorogo	Pembentukan Tim Satuan Pendidikan Aman Bencana tingkat Kabupaten	Subbag Umum dan Kepegawaian	ASN di bawah Dinas Pendidikan
		Penilaian kondisi sekolah dan fasilitas sekolah di wilayah berpotensi terdampak bencana tanah longsor	Subbag Umum dan Kepegawaian	LSM Pendidikan

NO	INSTANSI	KEGIATAN	KOORDINATOR	PELAKU
		Inventarisasi jumlah siswa, guru dan tenaga kependidikan lainnya yang berpotensi terdampak bencana tanah longsor	Bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan	ASN di bawah Dinas Pendidikan
		Perencanaan kegiatan belajar dan mengajar dalam situasi darurat bencana tanah longsor	Bidang Pembinaan SD dan SMP	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Pendidikan • Masyarakat
		Pelatihan bagi masyarakat/guru/relawan dalam situasi darurat khususnya di pengungsian mengenai : a. Perlindungan anak b. Pendidikan dalam situasi darurat	Bidang Pembinaan PAUD dan PNF	Dinas Pendidikan
		Membuat perencanaan dan perkiraan ruang/kelas belajar sementara di situasi darurat, transisi darurat dan rehabilitasi dan rekonstruksi	Subbag Umum dan Kepegawaian	Dinas Pendidikan
		Perumusan dan Penyusunan Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dalam situasi Darurat Bencana	Subbag Umum dan Kepegawaian, Bidang Pembinaan SD dan SMP	Dinas Pendidikan
		Membuat perencanaan keterlibatan masyarakat, LSM bidang pendidikan serta relawan pendidikan dalam pelaksanaan Satuan Pendidikan Aman Bencana	Subbag Umum dan Kepegawaian	Dinas Pendidikan
15	RSUD Dr. Harjono S. Ponorogo	Bersama dengan BPBD menentukan jenis bencana yang kemungkinan terjadi dan konsekuensi bahaya, ancaman dan kejadian	(RSUD) Kabid Pelayanan Medis	Kabid dan staf YanMed
		Menentukan integritas struktural dan nonstruktural dilingkungan pelayanan pasien yang ada dan bagaimana bila terjadi bencana	(RSUD) Kabid Pelayanan Medis dan Kabid Keperawatan	Kabid dan staf Yanmed dan Keperawatan
		Rumah sakit berperan dalam peristiwa atau kejadian bencana		Tim siaga bencana RSUD

NO	INSTANSI	KEGIATAN	KOORDINATOR	PELAKU
		Menentukan strategi komunikasi pada waktu kejadian	(RSUD) Kepala bagian Hubungan Masyarakat	Kabid dan staf Humas
		Mengelola sumberdaya selama kejadian termasuk sumber-sumber alternatif	(RSUD) Kepala bagian Umum, Kepala Bagian Pelayanan Penunjang medik dan Kepala Bagian Penunjang non medik	Kabag/Kabid dan staf masing-masing bagian/bidang
		Mengelola kegiatan klinis selama kejadian termasuk tempat pelayanan alternatif pada waktu kejadian	(RSUD) Kepala bidang Pelayanan medis dan Kepala bagian Penunjang medik dan Kepala bagian penunjang non medik	Kabag/Kabid dan staf masing-masing bagian/bidang
		Mengidentifikasi dan penetapan peran serta tanggungjawab staf selama kejadian	(RSUD) Kepala bagian Perencanaan	Kabag dan staf Perencanaan
		Mengelola keadaan darurat ketika terjadi konflik antara tanggungjawab pribadi staf dan tanggungjawab rumah sakit untuk tetap menyediakan pelayanan pasien termasuk kesehatan mental dari staf	(RSUD) Kepala bagian SDM dan Diklat	Kabag dan staf SDM dan Diklat

7.2. Penyiapan Kesiapsiagaan

Setelah disusun dan dikaji ulang, rencana kontingensi perlu diuji dengan berbagai cara di bawah ini. Uji ini bertujuan memastikan bahwa rencana kontingensi sesuai untuk dilaksanakan dan para pemangku kepentingan memahami apa saja peran mereka dan mengetahui kapan serta bagaimana menjalankan peran tersebut.

1. Simulasi Rapat Koordinasi

Kegiatan ini merupakan finalisasi Rencana Kontingensi tingkat daerah. Ketentuan simulasi adalah sebagai berikut.

- a. Dipimpin oleh Kepala Daerah/Sekretaris Daerah
- b. Diawali dengan paparan setiap bidang operasi tentang kesiapan sumberdaya
- c. Merumuskan hasil Rencana Kontingensi final disepakati bersama

2. Kegiatan *Table Top Exercise* (TTX)

Kegiatan ini merupakan latihan di dalam ruangan, untuk menguji kemampuan peran para pihak dalam kedaruratan didasarkan pada rencana kontingensi.

3. Kegiatan Uji Posko/Geladi Posko

Kegiatan diikuti oleh setiap unsur pemangku kepentingan yang terlibat dalam rencana kontingensi sesuai bidang masing-masing. Uji/geladi posko ini bertujuan memastikan setiap peserta mengetahui/memahami peran masing-masing dan bagaimana mekanisme dan tata cara koordinasi antar instansi/lembaga maupun antar bidang operasi

4. Kegiatan Uji Lapang/Geladi Lapang

Merupakan latihan di lapangan bertujuan untuk menguji/evaluasi perencanaan bidang operasi. Geladi lapang melibatkan sumberdaya yang ada di wilayah.

DAFTAR PUSTAKA

BNPB. 2016. *Pedoman Penetapan Status Keadaan Darurat Bencana*.

BNPB. 2021. *Pedoman Versi 5 Perencanaan Kontingensi*.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ponorogo. 2019. *Dokumen Kajian Risiko Bencana Kabupaten Ponorogo 2019-2023*.

Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 2 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ponorogo

Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2016 tentang Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana

LAMPIRAN

Lampiran 1. Konversi Rencana Kontingensi menjadi Rencana Operasi: Penyusunan Rencana Operasi Penanganan Darurat

Rencana Operasi Penanganan Darurat

RENCANA OPERASI DARURAT BENCANA Lembar No.....dari.....lembaran

Nama Lokasi (koordinat peta) :
Tanggal waktu pembuatan :
Rencana Operasi

RENCANA OPERASI:

Nomor:

PENUNJUKAN :

1. Peta : Nasional/Wilayah/Daerah
2. Skala : *(skala peta)*
3. Tahun : *(tahun pengeluaran peta)*
4. Daerah Waktu : WIB / WITA / WIT
5. Landasan Hukum : *(landasan hukum pembuatan Rencana Operasi)*
6. Dokumen : **Rencana Kontingensi.....**

DAERAH WAKTU : WIB/WITA/WIT

SANDI OPERASI :

SUSUNAN TUGAS:

1. Situasi
2. Tugas Pokok
3. Pelaksanaan
 - a. Konsep Operasi dan Sasaran Operasi
 - b. Struktur Organisasi dan Penjabaran Komando Tanggap Darurat Bencana
 - c. Intruksi dan Koordinasi
 - d. Administrasi dan Logistik
 - e. Pengendalian
 - f. Penutup

Tanggal..... (penetapan)

Ditetapkan oleh: Komandan Darurat Bencana

Lampiran 2. Proyeksi Wilayah dan Penduduk Terdampak

No	Wilayah (Penduduk Terpapar)	Kriteria						
		K1	K2	K3	K4	K5	K6	K7
1	Kecamatan Ngrayun							
	Desa Baosan Kidul	-	-	15	-	4	-	-
	Desa Baosan Lor	-	-	10	-	3	-	-
	Desa Binade	-	-	10	-	3	-	-
	Desa Cepoko	-	-	12	-	2	-	-
	Desa Gedangan	-	-	12	-	2	-	-
	Desa Mrayan	-	-	10	-	2	-	-
	Desa Ngrayun	-	-	4	-	1	-	-
	Desa Selur	-	-	10	-	2	-	-
	Desa Sendang	-	-	5	-	1	-	-
	Desa Temon	-	-	4	-	2	-	-
	Desa Wonodadi	-	-	3	-	4	-	-
	Total	0	0	95	0	26	0	0

No	Wilayah (penduduk terpapar)	Kriteria						
		K1	K2	K3	K4	K5	K6	K7
2	Kecamatan Puduk							
	Desa Banjarejo	-	-	-	-	250	-	-
	Desa Bareng	-	4	35	5	35	-	-
	Desa Krisik	-	-	6	-	4	-	-
	Desa Puduk Kulon	-	-	50	10	60	-	-
	Desa Puduk Wettan	-	-	59	-	12	-	-
	Desa Tambang	-	-	20	7	22	-	-
	Total		4	170	22	383		

No	Wilayah (penduduk terpapar)	Kriteria						
		K1	K2	K3	K4	K5	K6	K7
3	Kecamatan Pulung							
	Desa Banaran	-	-	-	-	-	-	-
	Desa Bekiring	-	-	36	-	-	-	-
	Desa Munggun	-	-	-	-	-	-	-
	Desa Singgahan	-	-	-	-	-	-	-
	Desa Wagir Kidul	-	-	-	-	-	-	-
	Desa Wayang			30				

No	Wilayah (penduduk terpapar)	Kriteria						
		K1	K2	K3	K4	K5	K6	K7
4	Kecamatan Badegan							
	Desa Dayakan	-	-	50	-	-	-	-

No	Wilayah (penduduk terpapar)	Kriteria						
		K1	K2	K3	K4	K5	K6	K7
5	Kecamatan Sambit							
	Desa Gajah	-	-	-	-	-	-	-
	Desa Jrasah	-	-	-	-	-	-	-

No	Wilayah (penduduk terpapar)	Kriteria						
		K1	K2	K3	K4	K5	K6	K7
6	Kecamatan Sawoo							
	Desa Sriti	-	-	55	-	-	-	-
	Desa tumpuk	-	-	139	-	-	-	-
	Total			194				

No	Wilayah (penduduk terpapar)	Kriteria						
		K1	K2	K3	K4	K5	K6	K7
7	Kecamatan SLAHUNG							
	Desa Caluk	-	-	4	-	1	-	-
	Desa Slahung	-	-	57	-	-	-	-
	Desa Ngilo-ilo	-	-	100	20	28	-	-
	Desa Senepo	-	-	150	-	-	-	-
	Desa Tugurejo	-	-	15	-	4	-	-
	Desa Wates	-	-	25	-	6	-	-
	Total	-	-	351	20	39	-	-

No	Wilayah (penduduk terpapar)	Kriteria						
		K1	K2	K3	K4	K5	K6	K7
8	Kecamatan Sooko							
	Desa Jurug	0	0	15	0	4	0	0
	Desa sooko			10		2		
	Desa Bedoho			10		3		
	Desa Klepu			12		3		
	Desa Suru			12		2		
	Desa Ngadirojo			15		4		
	TOTAL			74		18		

No	Wilayah (penduduk terpapar)	Kriteria						
		K1	K2	K3	K4	K5	K6	K7
9	Kecamatan Ngebel							
	Desa Talun	0	0	19	0	0	0	0
	Desa Ngrogung			10				
	Desa Pupus			10				
	Desa Gondowido			22				
	Desa Sahang			10				
	Desa Wagir Lor			22				
	Desa Ngebel			6				
	Desa Sempu			5				
	TOTAL			104				

Keterangan K1= Meninggal Dunia K2=Belum Ditentukan K3=Mengungsi
K4= Luka Berat K5=Luka Ringan K6=Wisatawan Asing
K7=Wisatawan Domestik

Catatan: Wisatawan baik lokal maupun asing belum ada data

Lampiran 3. Susunan Pelaksana Tugas Struktur Komando Penanganan Darurat Bencana

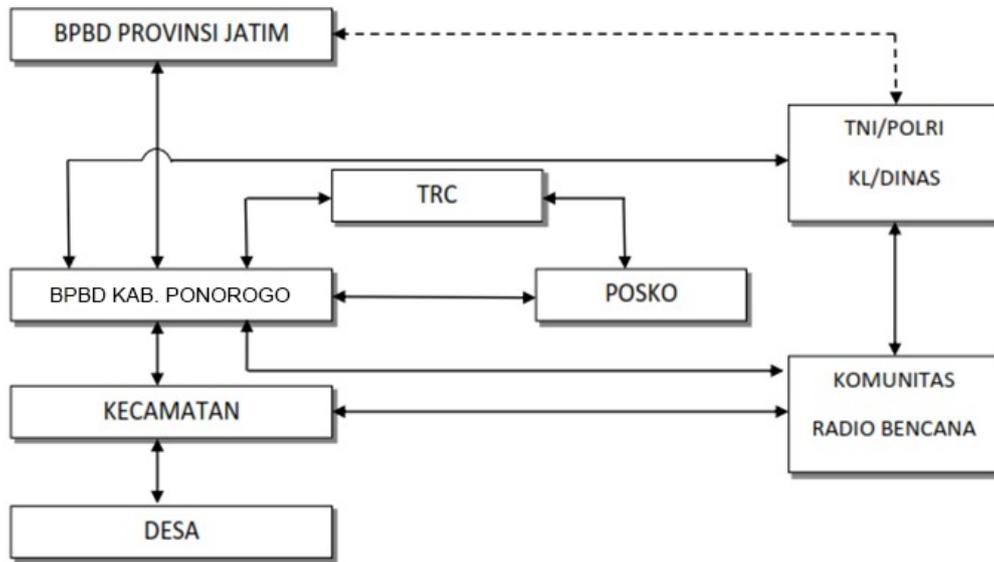
No	Fungsi/ Bidang/ Unit	Struktur	Organisasi
	Pengarah		Bupati
1	Komandan Tanggap Darurat		Wakil Bupati/ Dandim/ Kapolres
	Wakil Komandan		Sekretaris Daerah
2	Sekretariat	Pemimpin (<i>Lead</i>)	BPBD
		Pendukung	Dinas Kependudukan dan catatan sipil Bagian Hukum Sekda
3	Humas	Pemimpin (<i>Lead</i>)	Dinas Kominfo
		Pendukung	BPBD
4	Bidang Keamanan Dan Keselamatan	Pemimpin (<i>Lead</i>)	KODIM
		Pendukung	POLRES SATPOL PP
5	Perwakilan Lembaga/Institusi	Pemimpin (<i>Lead</i>)	BPBD
		Pendukung	FPRB
6	Bidang Perencanaan	Pemimpin (<i>Lead</i>)	BAPPEDA
		Pendukung	Dinas PUPKP PERUM PERHUTANI KPH Madiun PERHUTANI KPH LAWU DS
7	Bidang Operasi/Pos Lapangan	Koordinator	BPBD
	SAR dan Evakuasi	Pemimpin (<i>Lead</i>)	BPBD

No	Fungsi/ Bidang/ Unit	Struktur	Organisasi
		Pendukung	TNI/POLRI DINAS PU PMI SATPOL PP
	Kesehatan	Pemimpin (<i>Lead</i>)	DINKES
		Pendukung	RSUD PMI RS SWASTA PUSKESMAS
	Pendidikan	Pemimpin (<i>Lead</i>)	Dinas Pendidikan
		Pendukung	FPRB
			Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
	Pengungsian	Pemimpin (<i>Lead</i>)	Dinas Sosial
		Pendukung	BPBD Kecamatan
	Air Bersih dan Sanitasi	Pemimpin (<i>Lead</i>)	DINAS PUPKP
		Pendukung	Dinas Lingkungan Hidup
	Sarana dan Prasarana	Pemimpin (<i>Lead</i>)	DINAS PUPKP
		Pendukung	BPBD
8	Bidang logistic	Koordinator	Dinas Sosial
	Unit Peralatan	Pemimpin (<i>Lead</i>)	DINAS PUPKP

No	Fungsi/ Bidang/ Unit	Struktur	Organisasi
		Pendukung	BPBD
	Unit Transportasi	Pemimpin (Lead)	TNI/POLRI
		Pendukung	Satpol PP
	Unit Pergudangan	Pemimpin (Lead)	Dinas Sosial
		Pendukung	BPBD
	Unit Pangan dan Nutrisi	Pemimpin (Lead)	Dinas Kesehatan
		Pendukung	DPKPP Dinas Indakop
	Unit Kesehatan	Pemimpin (<i>Lead</i>)	Dinas Kesehatan
		Pendukung	RSUD PMI RS Swasta Puskesmas
	Unit Hunian dan Non Pangan	Pemimpin (<i>Lead</i>)	Dinas Sosial
		Pendukung	BPBD PUPKP Kecamatan
9	Administrasi dan Keuangan	Pemimpin (<i>Lead</i>)	BPPKAD
		Pendukung	BPBD Bagian Hukum Sekda

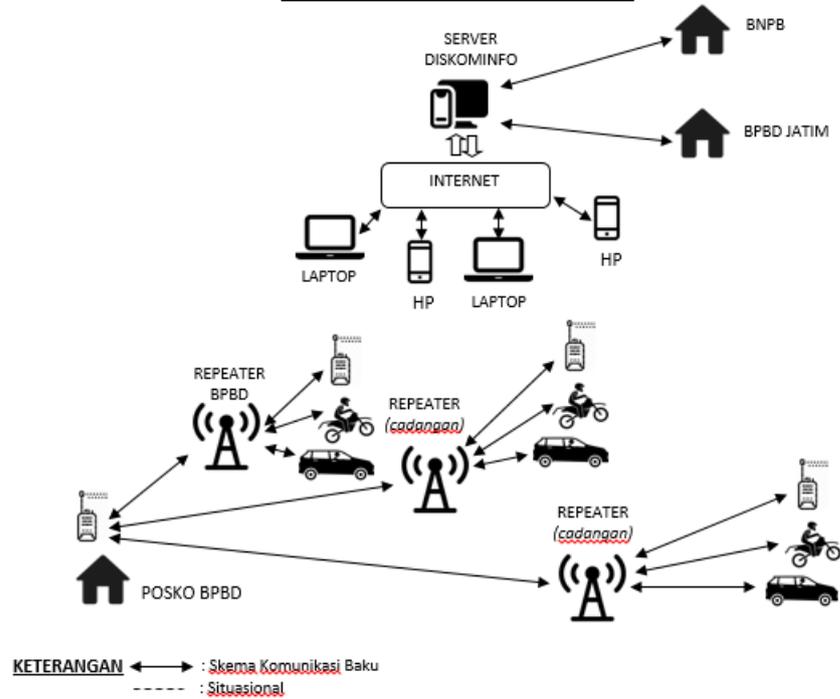
Lampiran 4. Jaring Komunikasi

DIAGRAM JARING KOMUNIKASI



Gambar 1. Diagram Jaring Komunikasi

MAPPING JARING KOMUNIKASI



Gambar 2. Mapping Jaringan Komunikasi

Lampiran 5. Estimasi Ketersediaan dan Kebutuhan Sumberdaya

5.1. Sumber Daya Manusia

No	Jenis Keahlian	Jumlah	Lokasi Personil	Kontak	Keterangan
1	Administrasi dan sekretariat				
		4	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan	085234657850	SUWITO, Staf UP Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kab. Ponorogo
				085213999793	RIZKA NUGRAHENI PUTRI, Staf PSP Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kab. Ponorogo
				082244034425	ALIFA AKAR WIJAYANTI, Petugas Penyuluh Lapangan Kec. Jetis
				081249074202	IRMA TRI WAHYUNI, Petugas Penyuluh Lapangan Kec. Ponorogo
		5	FPRB Kabupaten Ponorogo		
		5	Makodim	081334438417	Kapten Fachroji (Pasiops)
				085230232370	Peltu Zainal (Batiops)
				085233567527	Serma Roy (Baminops)
				081357512611	Koptu Danang (Operator)
				081332297500	Kopda Muridus (Operator)
		2	Palang Merah Indonesia Kabupaten Ponorogo	(0352) 481818	
	Bagian Hukum	1	Sekretariat Daerah Kabupaten Ponorogo	Rizky Wahyu Nugroho	Perancang Peraturan Perundang-Undangan 081334545460
				Indra Aji Saputra	Perancang Peraturan Perundang-Undangan 081335259447
		5	Dinas Dukcapil	08125914691	Ruly
				082240470398	Hery
				0816567719	Andik
		2	Dinas Kesehatan	08123419414	Sekretaris Dinas Kesehatan
				082271413307	Kasubag Hupeg

No	Jenis Keahlian	Jumlah	Lokasi Personil	Kontak	Keterangan
		1	Kantor Perhutani KPH Lawu Ds	085235900533	Danru Polhut Mob / Setyo Margono
		1	Kantor Perhutani KPH Madiun	082141801112	Danru Polhut Mob / Tito
	Bagian Keuangan	3	RSUD dr. HARJONO S	(0352) 489262	
	Bagian Umum	3	RSUD dr. HARJONO S	(0352) 489262	
2	Publikasi dan informasi				
		1	Sekretariat Daerah	081335521640	Rima Tri Retnoningtyas (Penyuluh Hukum)
				087736477789	Roni Mulyanto (Penata Laporan)
		2	Dinas Kesehatan	082334143023	Sub Koordinator PIH
				082301929999	Tim Kreatif
		2	Kantor Perhutani KPH Lawu Ds	082331774291	KSS HKAKP (Hukum Kepatuhan Agraria Komunikasi Perusahaan) / Darwitono
			Kantor Perhutani KPH Lawu Ds	081217001119	SP HKAKP (Hukum Kepatuhan Agraria Komunikasi Perusahaan)/Eko Santoso
		2	Kantor Perhutani KPH Madiun	085204859621	KSS HKAKP (Hukum Kepatuhan Agraria Komunikasi Perusahaan) /Edi Bambang
			Kantor Perhutani KPH Madiun	081231378427	SP HKAKP (Hukum Kepatuhan Agraria Komunikasi Perusahaan)/Rudi Winarto
		4	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan	081359010839	drh ROIIN UMayya, Medik Veteriner pada Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan

No	Jenis Keahlian	Jumlah	Lokasi Personil	Kontak	Keterangan
				085161801090	ROIDAH AFIFAH, Staf Bidang Ketahanan Pangan Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kab. Ponorogo
				081357102623	RICCO DIAZTIANTO, Staf Bidang PSP Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kab. Ponorogo
		2	Makodim	081286211923	Sertu Jaenuri
				081335454825	Sertu Zubaidi
		2	Palang Merah Indonesia Kabupaten Ponorogo		
	Bidang Humas	6	RSUD dr. HARJONO S	(0352) 489262	
3	Perencanaan dan pendataan				
		1	Sekretariat Daerah	081332429944	Habib Musta'an (Analisis Advokasi Hukum)
		3	Dinas Dukcapil	08125914691	Ruly
				082240470398	Hery
				0816567719	Andik
		4	Dinas Kesehatan	082334143023	Sub Koordinator PIH
				082141417358	Kabid Yankes
				081335470680	Subko Yankes Rujukan
				082301929999	Pj Program Krisis Kesehatan
		2	Posko Polhut Mob KPH Lawu Ds	085235900533	Danru Polhut Mob
			Posko Polhut Mob KPH Lawu Ds	088230477689	Anggota polhut Mob / Sugeng
		2	Posko Polhut Mob KPH Madiun	082141801112	Danru Polhut Mob / Tito

No	Jenis Keahlian	Jumlah	Lokasi Personil	Kontak	Keterangan
			Posko Polhut Mob KPH Madiun	085736866900	Anggota polhut Mob / David
		2	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan	081339675599	DICE ERIKA CANDRANINGRUM, Staf Sungram dan Pelaporan Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kab. Ponorogo
				081259996888	M. YUSUF ROMDONI, Staf Sungram dan Pelaporan Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kab. Ponorogo
		21	Koramil 01 s/d 21		Operator Koramil 01 s/d 21
		2	Palang Merah Indonesia Kabupaten Ponorogo		
	Bagian Perencanaan	3	RSUD dr. HARJONO S	(0352) 489262	
4	Operasi Tanggap Darurat				
	Tim Tanggap Darurat	12	Sekretariat Daerah	082328667227	Kabag Hukum
		5	Dinas Kesehatan	085230500080	Kadinkes
				082141417358	Kabid Yankes
				081335470680	Subko Yankes Rujukan
				081335070073	Subko Yankes Primer
				082301929999	Pj Program Krisis Kesehatan
		6	Dinas LH		
		4	Posko Polhut Mob KPH Lawu Ds	085235900533	Danru Polhut Mob / Setyo Margono
			Posko Polhut Mob KPH Lawu Ds	088230477689	Anggota polhut Mob / Sugeng

No	Jenis Keahlian	Jumlah	Lokasi Personil	Kontak	Keterangan
			Posko Polhut Mob KPH Lawu Ds	081217206364	Anggota polhut Mob / Didik S
			Posko Polhut Mob KPH Lawu Ds	081232524772	Anggota polhut Mob / Didik H
		35	BKPH dalam Sup Ponorogo KPH Lawu Ds	082338152990	Asper, KRPH, Polter BKPH WB, WS, PT, PS dan PB / Budi Prihartono
		36	Dalam Sub Ponorogo Perhutani KPH Lawu Ds	082301906495	MPA (Masyarakat Peduli Api) / Jumali
		4	Posko Polhut Mob KPH Madiun	082141801112	Danru Polhut Mob / Tito
			Posko Polhut Mob KPH Madiun	085736866900	Anggota polhut Mob / David
			Kantor Perhutani BKPH Pulung	081217734256	Asper KBKPH Pulung/ Engkus S
			Kantor Perhutani BKPH Bondrang	085730040400	Asper KBKPH Pulung/ A.Mukaris
			Kantor Perhutani BKPH Badegan	085334854084	
			BKPH: Pulung, Bondrang, Sukun, Badegan, Perhutani KPH Madiun	081217128436	Asper, KRPH, Polter / Purwanto
			Kantor BKPH Sukun	0881036685403	MPA (Masyarakat Peduli Api) / NurSahit
		1	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan	08125067003	AGUS SUSANTO, Kepala Bagian Kepegawaian

No	Jenis Keahlian	Jumlah	Lokasi Personil	Kontak	Keterangan
		333	Koramil 01 s/d 21		Babinsa Masing masing Desa
		30	Palang Merah Indonesia Kabupaten Ponorogo		
		98	Seluruh ASN dan non ASN di Dinas Pendidikan	0352-481479	Drs. H. Nurhadi Hanuri, MM
	Tim Ambulans	1	RSUD dr. HARJONO S	(0352) 489262	
	Tim Medis	1	RSUD dr. HARJONO S	(0352) 489262	
	Tim Penunjang	1	RSUD dr. HARJONO S	(0352) 489262	
	Tim Penanganan Emergency	1	RSUD dr. HARJONO S	(0352) 489262	
	Tim Kamar Operasi	1	RSUD dr. HARJONO S	(0352) 489262	
	Tim ICU	1	RSUD dr. HARJONO S	(0352) 489262	
	Tim Rawat Jalan	1	RSUD dr. HARJONO S	(0352) 489262	
	Tim Evakuasi	1	RSUD dr. HARJONO S	(0352) 489262	

5.2. Ketersediaan Alat

No	Peralatan	Jumlah	Kondisi	Lokasi	Kontak	Keterangan
1	Kendaraan					
1	Roda 4	1	Tidak layak	Dinas Dukcapil	0816567719	Andik
		1	Baik	Rumah dinas Waka ADM/KSKPH Lereng Lawu Wilis (PERHUTANI KPH LAWU)	08123267321	Judiono
		1	Baik	Rumah dinas Waka ADM/KSKPH Ponorogo	082132761990	Sutono
		1	Baik	Posko Polhut Mob	085235900533	Setyo Margono

No	Peralatan	Jumlah	Kondisi	Lokasi	Kontak	Keterangan
		1	Baik	Rumah dinas Wakil Adm/KSKPH Madiun Selatan	085735971954	Agus Haryono
		1	Baik	Posko Polhut Mob	082141801112	Tito
		7	Baik	Makodim	08125677830	Serka Jupri
		3	Baik	Dinas Pendidikan	0352-481479	Drs. H. Nurhadi Hanuri, MM
	Mobil Ambulan Gadar	38	Baik	Puskesmas (31) Rumah Sakit (7) (DINKES)	082301929999	
	Mobil Jenazah	7	Baik	Puskesmas Slahung + 6 Rumah Sakit	082301929999	
	Pusling	28	Baik	Puskesmas	082301929999	
	Mobil Toilet	1	Baik	Dinas LH		
2	Roda 2	2	Baik	Posko Polhut Mob	082141801112	Tito
3		133	Baik	Babinsa Masing masing Koramil		
2	Alat Berat					
1	Ekskavator	1	Baik	Makodim	085648300318	Pelda Kery
2	Backhoe					
3	Wheel loader					
3	Kendaraan Penyedia Air					
1	Truck tangki	1	Baik	Dinas LH		
2	Mobil tangki					
3						
3	Kendaraan Dapur Umum					

No	Peralatan	Jumlah	Kondisi	Lokasi	Kontak	Keterangan
1						
2						
3						
4	Kendaraan Pelayanan Kesehatan					
1	Mobil ambulance	1	Baik	Makodim	08125677830	Serka Jupri
		1	Baik	RSUD dr. HARJONO S	(0352) 489262	Ambulance Gawat Darurat dengan fasilitas lengkap (Monitor, alat suction, emergency kit, alat bidai udara, Stretcher, Tabung Oksigen, Obat Emergency)
2	Mobil Jenazah	2	Baik	RSUD dr. HARJONO S	(0352) 489262	
3	Pusling					
5	Peralatan Penyelamatan					
1	Kapal Boat	3	Baik	Makodim	081335049475	Peltu Sutrisno
2	Life Jacket					
6	Peralatan Penyelamatan					
1	Tenda Pleton	1	Baik	Posko Polhut Mob	085235900533	Setyo Margono
2	Tenda Regu	3	Baik	Posko Polhut Mob	085235900533	Setyo Margono
		2	Baik	Posko Polhut Mob	082141801112	Tito
3	Tenda Keluarga					
5	Velbed	5	Baik	Posko Polhut Mob	085235900533	Setyo Margono

No	Peralatan	Jumlah	Kondisi	Lokasi	Kontak	Keterangan
		5	Baik	Posko Polhut Mob	082141801112	Tito
6	Generator	1	Baik	Posko Polhut Mob	085235900533	Setyo Margono
		1	Baik	Posko Polhut Mob	082141801112	Tito
7	Lampu Lapangan					
5	Peralatan publikasi dan informasi					
1	Radio HT	42	Baik	Puskesmas (31), Command Center PSC (4) Rumah Sakit (7)	082301929999	
		4	Baik	Posko Polhut Mob	085235900533	Setyo Margono
2	Radio HT Digital	1	Baik	Posko Polhut Mob	085235900533	Setyo Margono
3	Radio Hig					
4	Radio SSB					
5	Repeater	1	Baik	Gedung Terpadu	082301929999	
		1	Baik	BKPH Wilis Barat	085235900533	Setyo Margono
6	Megaphone	1	Baik	Makodim		
6	Tempat pelayanan Kesehatan.					
1	Rumah Sakit Negeri	1	Baik	RSUD Harjono	082301929999	
2	Rumah Sakit Swasta	6	Baik	6 RS Swasta	082301929999	
3	Puskesmas	31	Baik	31 Puskesmas	082301929999	
4	Puskesmas Pembantu	56	Baik	56 Pustu	082301929999	
5	Polindes	283	Baik	283 Polindes	082301929999	
6	Klinik	51	Baik	51 Klinik	082301929999	
7	Gedung pemerintah.					
1						
2						
3						

5.3. Ketersediaan Bahan (Habis Pakai)

No	Jenis	Jumlah	Satuan	Kondisi	Lokasi	Kontak	Keterangan
1	Obat obatan						
1	Cairan infus dasar	100x51 desa = 5.100	Botol	Baik	Dinkes	Bagian Gudang Farmasi Dinkes	
2	Abalgesik	500x51 desa = 25.500	Biji	Baik		Nora Yustiananingrum	
3	Antipiretik (Turun Panas)	500x51 desa = 25.500	Biji	Baik		082245064080	
4	Vitamin	1000x51 desa = 51.000	Biji	Baik			
5	Obat Diare	200x51 desa = 10.200	Biji	Baik			
6	Obat Maag	100x51 desa = 5.100	Biji	Baik			
7	Anti Histamin	500x51 desa = 25.500	Biji	Baik			
8	Anti Inflamasi	500x51 desa = 25.500	Biji	Baik			
9	Antibiotik	1000x51 desa = 51.000	Biji	Baik			
10	Anti Hypertensi	500x51 desa = 25.500	Biji	Baik			
2	Pangan						
1	Logistik						
2	Sembako						
3	Air Minum						
4	Lauk Pauk						
3	Perlengkapan						
1	Family kit						
2	ATK	5	rim	baik	Dinas Pendidikan	0352-481479	Drs. H. Nurhadi Hanuri, MM
3	Food ware						

No	Jenis	Jumlah	Satuan	Kondisi	Lokasi	Kontak	Keterangan
4	Kid ware						
5	Paket sandang						
6							

PROYEKSI KEBUTUHAN SUMBERDAYA NGRAYUN

SIAGA DARURAT							
NO.	TUGAS/KEGIATAN (* KEGIATAN POKOK)	SUMBERDAYA			KETERANGAN		
		KATEGORI	JENIS	KEMAMPUAN	KETERSEDIAAN	KEBUTUHAN	KESENJANGAN
1	Menyiapkan tempat Evakuasi	Manusia:	Tenaga	Mendirikan Tenda Pengungsian	Tempat	Tenda	Belum tersedianya logistik
		Peralatan:	Tenda	Bisa menampung kapasitas 265 KK	Tempat	Logistik	
		Bahan:	Terpal				

TANGGAP DARURAT							
NO.	TUGAS/KEGIATAN (* KEGIATAN POKOK)	SUMBERDAYA			KETERANGAN		
		KATEGORI	JENIS	KEMAMPUAN	KETERSEDIAAN	KEBUTUHAN	KESENJANGAN
1	Ambulance	Manusia:	Sopir	88 orang	11 mobil	32 mobil	-
		Peralatan:	-	-	-	-	-
		Bahan:	-	-	-	-	-

TRANSISI PEMULIHAN							
NO.	TUGAS/KEGIATAN (* KEGIATAN POKOK)	SUMBERDAYA			KETERANGAN		
		KATEGORI	JENIS	KEMAMPUAN	KETERSEDIAAN	KEBUTUHAN	KESENJANGAN
1	Kegiatan Bidang Pertanian	Manusia:	Tenaga	Mencangkul	Lahan	Pupuk,bibit	Kelangkaan Pupuk
		Peralatan:	Cangkul,	-	-	-	-
		Bahan:	Bibit	-	-	-	-

PROYEKSI KEBUTUHAN SUMBERDAYA PUDAK

SIAGA DARURAT							
NO.	TUGAS/KEGIATAN (* KEGIATAN POKOK)	SUMBERDAYA			KETERANGAN		
		KATEGORI	JENIS	KEMAMPUAN	KETERSEDIAAN	KEBUTUHAN	KESENJANGAN
1	Penaman Pohon Dan Penghijauan BANJEREJO	Manusia:	Tenaga	Pembuatan Posko Dan Evakuasi	15	20	5
		Peralatan:	Alat pertanian/menanam	Peralatan Pertanian Untuk Kegiatan Penanaman Pohon Dan PENGHIJAUAN	1	4	3
		Bahan:	Bibit tanaman/pohon dan lahan	Tersedianya Lahan Untuk PENGHIJAUAN Dan Bibit Tanaman	1	10	9

SIAGA DARURAT							
NO.	TUGAS/KEGIATAN (* KEGIATAN POKOK)	SUMBERDAYA			KETERANGAN		
		KATEGORI	JENIS	KEMAMPUAN	KETERSEDIAAN	KEBUTUHAN	KESENJANGAN
2	Penaman Pohon Dan Penghijauan BARENG	Manusia:	tenaga	penanaman pohon	16	107	95
		Peralatan:	cangkul	1 tenda	7	17	7
		Bahan:	pohon	105	15	105	95
3	Penaman Pohon Dan Penghijauan KRISIK	Manusia:	tenaga	Penanaman Pohon	15	100	85
		Peralatan:	cangkul	10	5	15	5
		Bahan:	pohon	100	10	100	90
4	Penaman Pohon Dan Penghijauan PUDAK KULON	Manusia:	tenaga	Pananaman pohon	15	100	85
		Peralatan:	cangkul	10	5	15	5
		Bahan:	pohon	100	10	100	90
5	Penaman Pohon Dan Penghijauan PUDAK WETAN	Manusia:	tenaga	penanaman pohon	20	150	90
		Peralatan:	cangkul	15	10	20	5
		Bahan:	pohon	150	15	150	95
6	Penaman Pohon Dan Penghijauan TAMBANG	Manusia:	Tenaga	penanaman pohon	15	100	85
		Peralatan:	cangkul	10	5	15	5
		Bahan:	pohon	100	10	100	90
	TOTAL	Manusia:			96	577	445
		Peralatan:	Cangkul	45	33	86	30
		Bahan:	Pohon	555	61	565	469

TANGGAP DARURAT							
NO.	TUGAS/KEGIATAN (* Kegiatan Pokok)	SUMBERDAYA			KETERANGAN		
		KATEGORI	JENIS	KEMAMPUAN	KETERSEDIAAN	KEBUTUHAN	KESENJANGAN
1	Pembuatan Posko Bencana Banjerejo	Manusia:	Tenaga	Pembuatan Posko dan evakuasi	15	20	5
		Peralatan:	Tenda dan peralatan	Tersedia sejumlah peralatan	1	4	3
		Bahan:	Tenda, Tikar, Terpal	tersedia peralatan dari swadaya masyarakat	1	10	9
2	Pembuatan Posko Bencana Bareng	Manusia:	tenaga	membuat posko	15	25	7
		Peralatan:	alat tenda	tersedia 1 tenda	1	5	3
		Bahan:	terpal tikar	5	11	5	7
3	Pembuatan Posko Pengungsian Krisik	Manusia:	tenaga	membuat posko	15	20	5
		Peralatan:	alat tenda	tersedia 1 tenda	1	4	3
		Bahan:	terpal,tikar	5	10	5	5
4	Pembuatan Posko Bencana Puduk Kulon	Manusia:	tenaga	membuat posko	15	20	5
		Peralatan:	alat tenda,	tersedia 1 tenda	1	4	3
		Bahan:	terpal ,tikar	5	10	5	5
5	Pembuatan Posko Bencana Puduk Wetan	Manusia:	tenaga	membuat posko	20	25	5
		Peralatan:	alat tenda	tersedia 1 tenda	1	5	3

TANGGAP DARURAT							
NO.	TUGAS/KEGIATAN (* Kegiatan Pokok)	SUMBERDAYA			KETERANGAN		
		KATEGORI	JENIS	KEMAMPUAN	KETERSEDIAAN	KEBUTUHAN	KESENJANGAN
		Bahan:	terpal tika	5	10	7	5
6	Pembuatan Posko Bencana TAMBANG	Manusia:	Tenaga	membuat posko	8	15	5
		Peralatan:	alat tenda	tersedia 1 tenda	5	4	2
		Bahan:	terpal,tika	5	7	6	4
	TOTAL	Manusia:			88	125	32
		Peralatan:	Cangkul	0	10	26	17
		Bahan:	Pohon	25	49	38	35

TRANSISI PEMULIHAN							
NO.	TUGAS/KEGIATAN (* KEGIATAN POKOK)	SUMBERDAYA			KETERANGAN		
		KATEGORI	JENIS	KEMAMPUAN	KETERSEDIAAN	KEBUTUHAN	KESENJANGAN
1	Pembuatan Rumah Layak Huni Sementara	Manusia:	tenaga	Pembuatan Hunian Sementara	5	5	0
		Peralatan:	peralatan pertukangan	5	3	6	3
		Bahan:	kayu,pasir,pa ku,genteng	3	5	10	5
2		Manusia:					
		Peralatan:					

TRANSISI PEMULIHAN

NO.	TUGAS/KEGIATAN (* KEGIATAN POKOK)	SUMBERDAYA			KETERANGAN		
		KATEGORI	JENIS	KEMAMPUAN	KETERSEDIAAN	KEBUTUHAN	KESENJANGAN
		Bahan:					
3	Pembuatan Rumah Layak Huni Sementara	Manusia:	Tenaga	Kesiapan untuk Swadaya tenaga	25	50	25
		Peralatan:	Peralatan Pertukangan	tersedia peralatan pertukangan milik dari warga/kelompok masyarakat	25	50	25
		Bahan:	Kayu dan material bangunan	tersedia nya kayu di lahan milik warga	25	50	25
4	Pembuatan Rumah Hunian Baru/Sementara	Manusia:	tenaga	pembuatan hunian sementara	5	7	2
		Peralatan:	peralatan pertukangan	5	3	6	3
		Bahan:	kayu,pasir, paku, genteng	3	5	10	5
5	Pembuatan Rumah Hunian Baru/Sementara	Manusia:	tenaga	pembuatan hunian sementara	5	5	0
		Peralatan:	peralatan pertukangan	5	4	7	3
		Bahan:	kayu,pasir, paku,genteng	3	5		5

TRANSISI PEMULIHAN							
NO.	TUGAS/KEGIATAN (* KEGIATAN POKOK)	SUMBERDAYA			KETERANGAN		
		KATEGORI	JENIS	KEMAMPUAN	KETERSEDIAAN	KEBUTUHAN	KESENJANGAN
6	Pembuatan Rumah Hunian Baru	Manusia:	tenaga	pembuatan hunia sementara	5	6	2
		Peralatan:	peralatan pertukangan	5	3	5	3
		Bahan:	kayu,pasir,pa ku, genteng	3	5	8	5
	TOTAL	Manusia:			45	73	29
		Peralatan:	Cangkul	15	38	74	37
		Bahan:	Pohon	9	45	78	45

PROYEKSI KEBUTUHAN SUMBERDAYA PULUNG

SIAGA DARURAT							
NO.	TUGAS/KEGIATAN (* KEGIATAN POKOK)	SUMBERDAYA			KETERANGAN		
		KATEGORI	JENIS	KEMAMPUAN	KETERSEDIAAN	KEBUTUHAN	KESENJANGAN
1	Evakuasi	Manusia:	Satgas	9	9	30	21
		Peralatan:	Kendaraan Roda 2	1	0	5	4
		Bahan:	Kendaraan Roda 4	1	0	1	0

SIAGA DARURAT							
NO.	TUGAS/KEGIATAN (* KEGIATAN POKOK)	SUMBERDAYA			KETERANGAN		
		KATEGORI	JENIS	KEMAMPUAN	KETERSEDIAAN	KEBUTUHAN	KESENJANGAN
2	Sosialisasi Terhadap Masyarakat Tentang Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Manusia:	Tenaga	Panitia Pelaksanaan Sosialisasi	15	15	0
		Peralatan:	Alat-Alat Untuk Sosialisasi	Tersedianya Alat Untuk Sosialisasi	1	1	0
		Bahan:	Bahan Sosialisasi	Tersedianya Tempat Untuk Pelaksanaan Kegiatan	5	100	95
3	Pengadaan Sarana Dan Prasarana Keadaan Darurat	Manusia:	Tenaga	Pembuatan Sarana Dan Prasarana	5	20	15
		Peralatan:	Tersedianya Peralatan Untuk Pengadaan Sarana Dan Prasarana	Peralatan Pertukangan	1	5	4
		Bahan:	-	-	0	3	3
4	Penanaman Bibit Pertanian Khususnya Tanaman Kehutanan	Manusia:	Tenaga	Penanaman Bibit Pertanian	25	30	5
		Peralatan:	Peralatan Penanaman Bibit Pertanian	Peralatan Untuk Penanaman Bibit Pertanian	1	3	2

SIAGA DARURAT							
NO.	TUGAS/KEGIATAN (* KEGIATAN POKOK)	SUMBERDAYA			KETERANGAN		
		KATEGORI	JENIS	KEMAMPUAN	KETERSEDIAAN	KEBUTUHAN	KESENJANGAN
		Bahan:	Bibit Pertanian	Lahan Untuk Penanaman Bibit Pertanian	0	1000	1000
5	Sosialisasi Terhadap Masyarakat Tentang Bencana	Manusia:	Tenaga	Panitia Pelaksanaan Sosialisasi	10	10	0
		Peralatan:	Alat-Alat Untuk Sosialisasi	Tersedianya Alat Untuk Sosialisasi	1	1	0
		Bahan:	Bahan Sosialisasi	Tersedianya Tempat Untuk Pelaksanaan Kegiatan	4	90	80
6	Pengadaan Sarana Prasarana Keadaan Darurat	Manusia:	Tenaga		5	11	10
		Peralatan:	Tersedianya Peralatan Untuk Pengadaan Sarana Dan Prasarana	Peralatan Tukang	1	6	5
		Bahan:	-	-	0	4	4
7	Penanaman Bibit Pohon Dan Penghijauan	Manusia:	Tenaga	Penanaman Pohon	20	25	5
		Peralatan:	Peralatan Penanaman Pohon	Peralatan Untuk Penanaman Pohon	1	3	2

SIAGA DARURAT							
NO.	TUGAS/KEGIATAN	SUMBERDAYA			KETERANGAN		
	(* KEGIATAN POKOK)	KATEGORI	JENIS	KEMAMPUAN	KETERSEDIAAN	KEBUTUHAN	KESENJANGAN
		Bahan:	Bibit Pohon	Lahan Untuk Penanaman Pohon	0	500	500

TANGGAP DARURAT							
NO.	TUGAS/KEGIATAN	SUMBERDAYA			KETERANGAN		
	(* KEGIATAN POKOK)	KATEGORI	JENIS	KEMAMPUAN	KETERSEDIAAN	KEBUTUHAN	KESENJANGAN
1	Evakuasi	Manusia:	Tim Penyelamat	Membantu Evakuasi Warga	-	-	21
		Peralatan:					
		Bahan:					
2	Layanan Pengungsian	Manusia:	Satgas	2	9	2	0
		Peralatan:					
		Bahan:					
3	Layanan & Perlindungan Pengungsi	Manusia:	Dapur Umum	Membantu Pengungsi	1	1	0
			Nakes		2	2	0
			Logistik		10	50	40
		Peralatan:	Alat Masak	Bahan Pokok Yang Dibutuhkan	0	0	0
		Bahan:					

TANGGAP DARURAT							
NO.	TUGAS/KEGIATAN (* KEGIATAN POKOK)	SUMBERDAYA			KETERANGAN		
		KATEGORI	JENIS	KEMAMPUAN	KETERSEDIAAN	KEBUTUHAN	KESENJANGAN
4	Pembuatan Posko Tanggap Darurat	Manusia:	Tenaga	Tenaga Untuk Pembuatan Posko	15	30	15
		Peralatan:	Peralatan Pembuatan Posko	Peralatan Untuk Pembuatan Posko	2	5	3
		Bahan:	Lahan/Tempat Pembuatan Posko	Tersedianya Lahan/Tempat Untuk Posko	2	2	0
5	Realokasi Rumah Warga Yang Terdampak	Manusia:	Tenaga	Tenaga Kerja	15	40	25
		Peralatan:	Peralatan Pertukangan	Peralatan Bangunan	2	15	13
		Bahan:	Lahan/ Tempat Realokasi Dan Material Bangunan	Kayu Yang Ditanam Ditanah Warga	10	45	35
6	Tenaga Medis Beserta Sarana Dan Prasarana	Manusia:	Tenaga	Tersedianya Bantuan Tenaga Untuk Petugas Kesehatan	10	20	10
		Peralatan:	Peralatan Kesehatan	Tersedianya Mobil Siaga	1	5	4

TANGGAP DARURAT							
NO.	TUGAS/KEGIATAN (* KEGIATAN POKOK)	SUMBERDAYA			KETERANGAN		
		KATEGORI	JENIS	KEMAMPUAN	KETERSEDIAAN	KEBUTUHAN	KESENJANGAN
		Bahan:	Obat-Obatan, Vitamin Dll	-	0	1	1
7	Bantuan Bahan Makanan Dan Pakaian	Manusia:	Tenaga	Tenaga Untuk Pembuatan Dapur Umum	15	30	15
		Peralatan:	Dapur Umum	Peralatan Untuk Pembuatan Dapur Umun	2	5	3
		Bahan:	Tempat/ Lahan	Tersedianya Lahan Untuk Pembuatan Dapur Umun	2	2	0
8	Pembuatan Posko Pengungsian	Manusia:	Tenaga	Pembuatan Posko	15	20	8
		Peralatan:	Alat Pembuatan Posko	Peralatan Pembuatan Posko	2	4	3
		Bahan:	Lahan/Tempat Pembuatan Posko	Tersedianya Lahan/Tempat Posko	1	2	0
9	Tenaga Medis Beserta Sarana Dan Prasarana	Manusia:	Tenaga	Tersediannya Bahan	15	25	20
		Peralatan:	Peralatan Kesehatan	Tersediannya Mobil Siaga	1	5	4

TANGGAP DARURAT							
NO.	TUGAS/KEGIATAN (* KEGIATAN POKOK)	SUMBERDAYA			KETERANGAN		
		KATEGORI	JENIS	KEMAMPUAN	KETERSEDIAAN	KEBUTUHAN	KESENJANGAN
		Bahan:	Obat-Obatan, Vitamin, Dll	-	0	1	1
10	Bantuan Bahan Makanan Dan Pakaian	Manusia:	Tenaga	Tenaga Untuk Pembuatan Dapur Umum	10	25	15
		Peralatan:	Dapur Umum	Peralatan Untuk Peralatan Dapur Umum	2	6	3
		Bahan:	Tempat/Lahan	Tersediannya Lahan Untuk Pembuatan Dapur Umum	5	5	0

TRANSISI PEMULIHAN							
NO.	TUGAS/KEGIATAN (* KEGIATAN POKOK)	SUMBERDAYA			KETERANGAN		
		KATEGORI	JENIS	KEMAMPUAN	KETERSEDIAAN	KEBUTUHAN	KESENJANGAN
1	Hunian Tetap	Manusia:	Tukang	14	14	28	14
		Peralatan:	Peralatan Tukang	1	1	14	13
		Bahan:	Bahan Bangunan	14 Unit	0	14 Unit	14 Unit
2	AMPL (Air Minum & penyehat Lingkungan)	Manusia:	Tukang	14	14	28	14
		Peralatan:	Peralatan Tukang	1	1	14	13

TRANSISI PEMULIHAN							
NO.	TUGAS/KEGIATAN (* KEGIATAN POKOK)	SUMBERDAYA			KETERANGAN		
		KATEGORI	JENIS	KEMAMPUAN	KETERSEDIAAN	KEBUTUHAN	KESENJANGAN
		Bahan:	Bahan Bangunan	14 Unit	0	14 Unit	14 Unit
3	Rehabilitasi & rekontruksi	Manusia:	Semua Warga	75	75	100	25
		Peralatan:	Cangkul, Sekop, Sabit, Sorong	14	14	28	14
		Bahan:					
4	Edukasi Pemulihan Terhadap Warga Yang Terdampak	Manusia:	Tenaga	Pelaksana kegiatan	5	15	10
		Peralatan:	Sarana/Prasarana Kegiatan	Tempat/Lokasi Kegiatan	1	2	1
		Bahan:	-	-	0	3	3
5	Infrastruktur Jalan, Jembatan Maupun Infrastruktur Lainnya Yang Terdampak	Manusia:	Tenaga	Pekerja	50	50	0
		Peralatan:	Peralatan Tukang Bangunan	Alat Pekerja Bangunan	3	5	2
		Bahan:	Bahan Untuk Pembangunan	Kayu Dan Bambu Milik Warga	1	1	0
6	Lapangan Kerja Bagi Penduduk Yang Terdampak	Manusia:	Sumber Daya Manusia	Sumber Daya Manusia	0	50	50
		Peralatan:	-	-	0	50	50

TRANSISI PEMULIHAN							
NO.	TUGAS/KEGIATAN (* KEGIATAN POKOK)	SUMBERDAYA			KETERANGAN		
		KATEGORI	JENIS	KEMAMPUAN	KETERSEDIAAN	KEBUTUHAN	KESENJANGAN
		Bahan:	Modal Usaha	-	0	50	50
7	Edukasi Pemulihan Terhadap Warga Yang Terdampak	Manusia:	Tenaga	Pelaksanaan Kegiatan	5	20	10
		Peralatan:	Sarana/Prasaranan Kegiatan	Tempat/Lokasi Kegiatan	1	2	1
		Bahan:	-	-	0	4	4
8	Infrastruktur Jalan, Jembatan Maupun Infrastruktur Lainnya Yang Terdampak	Manusia:	Tenaga	Pekerja	45	45	0
		Peralatan:	Peralatan Tukang Pembangunan	Alat Bangunan	4	6	3
		Bahan:	Bahan Untuk Pembangunan	Kayu Dan Bambu Milik Warga	1	1	0
9	Lapangan Kerja Bagi Penduduk Yang Terdampak	Manusia:	Sumber Daya Manusia	Sumber Daya Manusia	0	45	45
		Peralatan:	-	-	0	45	45
		Bahan:	Modal Usaha	-	0	45	45

PROYEKSI KEBUTUHAN SUMBERDAYA KECAMATAN BADEGAN

SIAGA DARURAT							
NO.	TUGAS/KEGIATAN (* KEGIATAN POKOK)	SUMBERDAYA			KETERANGAN		
		KATEGORI	JENIS	KEMAMPUAN	KETERSEDIAAN	KEBUTUHAN	KESENJANGAN
1	Monitoring	Manusia:	Ketua RT	34	34	34	0
		Peralatan:	HT	4	4	34	30
			Senter	20	20	40	20
			Jas Hujan	20	20	40	20
			Sepatu Boot	20	20	40	20
			Helm	20	20	40	20
			RPU	1	1	1	0
		Bahan:	Baterai	0	0	40	40
2	Penyelamatan dan evakuasi	Manusia:	Relawan	10	10	40	30
			Tim Medis	3	3	6	3
		Peralatan:	Roda 4	1	1	4	3
			Roda 2	3	3	5	2
			Tambang	0	0	2	2
			Tandu	0	0	2	2
		Bahan:	Obat-obatan	0	0	1	1
			Rambu Evakuasi	5	5	10	5
3	Layanan Pengungsian	Manusia:	Relawan	30	30	40	10
			Tim Medis	3	3	5	2
		Peralatan:	Tenda	3	3	5	2
			Gedung	1	1	2	1
			Posko	1	1	1	0
			Sarana DU	0	0	10	10

SIAGA DARURAT							
NO.	TUGAS/KEGIATAN (* KEGIATAN POKOK)	SUMBERDAYA			KETERANGAN		
		KATEGORI	JENIS	KEMAMPUAN	KETERSEDIAAN	KEBUTUHAN	KESENJANGAN
			Sarana Transportasi	0	0	15	15
			Sarana MCK	0	0	10	10
			Terpal	3	3	12	9
			Selimut	0	0	50	50
		Bahan:	Bahan DU	0	0	1	1

TANGGAP DARURAT							
NO.	TUGAS/KEGIATAN (* KEGIATAN POKOK)	SUMBERDAYA			KETERANGAN		
		KATEGORI	JENIS	KEMAMPUAN	KETERSEDIAAN	KEBUTUHAN	KESENJANGAN
1	Evakuasi	Manusia:	Relawan	10	10	40	30
			Tim Medis	3	3	6	3
		Peralatan:	Roda 4	1	1	4	3
			Roda 2	3	3	5	2
			Tambang	0	0	2	2
			Tandu	0	0	2	2
		Bahan:	Obat-obatan	0	0	1	1
	Rambu Evakuasi	5	5	10	5		
2	Layanan Pengungsian	Manusia:	Relawan	20	20	30	10
			Tim Medis	3	3	5	2
		Peralatan:	Tenda	3	3	5	2
			Gedung	1	1	2	1
			Posko	1	1	1	0

TANGGAP DARURAT							
NO.	TUGAS/KEGIATAN (* KEGIATAN POKOK)	SUMBERDAYA			KETERANGAN		
		KATEGORI	JENIS	KEMAMPUAN	KETERSEDIAAN	KEBUTUHAN	KESENJANGAN
			Sarana DU	0	0	1	1
			Sarana MCK	0	0	10	10
			Tikar	0	0	30	30
			Papan Informasi	0	0	1	1
			Tempat Sampah	0	0	10	10
			Genset	1	1	2	1
		Bahan:	Obat P3K	50	50	100	50
			Bahan DU	0	0	1	1
3	Penanganan Dampak Buruk Bencana	Manusia:	Warga	50	50	100	50
		Peralatan:	Cangkul	0	0	10	10
			Artco	0	0	10	10
			Gergaji Mesin	0	0	1	1
			Alat Berat	0	0	1	1
			Tambang	0	0	10	10
		Bahan:	Konsumsi	0	0	1	1
TRANSISI PEMULIHAN							
NO.	TUGAS/KEGIATAN (* KEGIATAN POKOK)	SUMBERDAYA			KETERANGAN		
		KATEGORI	JENIS	KEMAMPUAN	KETERSEDIAAN	KEBUTUHAN	KESENJANGAN
1		Manusia:	Relawan	30	30	100	70

TANGGAP DARURAT							
NO.	TUGAS/KEGIATAN (* KEGIATAN POKOK)	SUMBERDAYA			KETERANGAN		
		KATEGORI	JENIS	KEMAMPUAN	KETERSEDIAAN	KEBUTUHAN	KESENJANGAN
	Rehabilitasi dan Rekonstruksi	Peralatan:	Peralatan bangunan	0	0	10	10
			Alat Berat	0	0	1	1
		Bahan:	Bahan Material	0	0	10	10
			Konsumsi	0	0	1	1

PROYEKSI KEBUTUHAN SUMBERDAYA KECAMATAN SAWOO

SIAGA DARURAT							
NO	TUGAS/KEGIATAN (* KEGIATAN POKOK)	SUMBERDAYA			KETERANGAN		
		KATEGORI	JENIS	KEMAMPUAN	KETERSEDIAAN	KEBUTUHAN	KESENJANGAN
1	Monitoring	Manusia:	Ketua RT	292	292	292	0
		Peralatan:	HT	16	16	292	276
			Senter	40	40	292	252
			Jas Hujan	51	51	292	241
			Sepatu Boot	55	55	292	237
			Helm	35	35	292	257
			RPU	7	7	7	0
		Bahan:	Baterai	0	0	292	292
2	Penyelamatan dan evakuasi	Manusia:	Relawan	80	80	292	212
			Tim Medis	28	28	42	14

SIAGA DARURAT							
NO	TUGAS/KEGIATAN N (* KEGIATAN POKOK)	SUMBERDAYA			KETERANGAN		
		KATEGORI	JENIS	KEMAMPUAN	KETERSEDIAAN	KEBUTUHAN	KESENJANGAN
		Peralatan:	Roda 4	14	14	27	13
			Roda 2	21	21	42	21
			Tambang	0	0	26	26
			Tandu	0	0	26	26
		Bahan:	Obat-obatan	0	0	7	7
			Rambu Evakuasi	28	28	70	42
3	Layanan Pengungsian	Manusia:	Relawan	70	70	292	222
			Tim Medis	28	28	42	14
		Peralatan:	Tenda	14	14	28	14
			Gedung	7	7	14	7
			Posko	6	6	6	0
			Sarana DU	0	0	70	70
			Sarana Transportasi	0	0	69	69
			Sarana Air Bersih dan MCK	0	0	80	80
			Terpal	21	21	105	84
			Selimut	0	0	750	750
	Bahan:	Bahan DU	0	0	7	7	

TANGGAP DARURAT							
NO.	TUGAS/KEGIATAN (* KEGIATAN POKOK)	SUMBERDAYA			KETERANGAN		
		KATEGORI	JENIS	KEMAMPUAN	KETERSEDIAAN	KEBUTUHAN	KESENJANGAN
1	Evakuasi	Manusia:	Relawan	115	115	292	177
			Tim Medis	28	28	42	14
		Peralatan:	Roda 4	9	9	26	17
			Roda 2	21	21	27	6
			Tambang	0	0	28	28
			Tandu	0	0	28	28
		Bahan:	Obat-obatan	0	0	7	7
			Rambu Evakuasi	28	28	54	26
2	Layanan Pengungsian	Manusia:	Relawan	140	140	292	152
			Tim Medis	28	28	42	14
		Peralatan:	Tenda	21	21	75	54
			Gedung	7	7	14	7
			Posko	7	7	28	21
			Sarana DU	0	0	28	28
			Sarana Air Bersih dan MCK	0	0	70	70
			Tikar	0	0	258	258
			Papan Informasi	0	0	10	10
			Tempat Sampah	0	0	62	62

			Genset	7	7	24	17
		Bahan:	Obat P3K	350	350	750	400
			Bahan DU	0	0	7	7
3	Penanganan Dampak Buruk Bencana	Manusia:	Warga	350	350	850	500
		Peralatan:	Cangkul	100	100	248	148
			Artco	0	0	58	58
			Gergaji Mesin	0	0	28	28
			Alat Berat	0	0	14	14
			Tambang	0	0	28	28
		Bahan:	Konsumsi	0	0	14	14

TRANSISI PEMULIHAN							
NO.	TUGAS/KEGIATAN (* KEGIATAN POKOK)	SUMBERDAYA			KETERANGAN		
		KATEGORI	JENIS	KEMAMPUAN	KETERSEDIAAN	KEBUTUHAN	KESENJANGAN
1	Rehabilitasi dan Rekonstruksi PANGKAL	Manusia:	Relawan	20	20	42	22
		Peralatan:	Peralatan bangunan	0	0	15	15
			Alat Berat	0	0	2	2
		Bahan:	Bahan Material	0	0	6	6
			Konsumsi	0	0	1	1
	SAWOO	Manusia:	Relawan	20	20	54	34
		Peralatan:	Peralatan bangunan	0	0	15	15
			Alat Berat	0	0	2	2
		Bahan:	Bahan Material	0	0	6	6

TRANSISI PEMULIHAN							
NO.	TUGAS/KEGIATAN (* KEGIATAN POKOK)	SUMBERDAYA			KETERANGAN		
		KATEGORI	JENIS	KEMAMPUAN	KETERSEDIAAN	KEBUTUHAN	KESENJANGAN
			Konsumsi	0	0	1	1
	SRITI	Manusia:	Relawan	20	20	28	8
		Peralatan:	Peralatan bangunan	0	0	15	15
			Alat Berat	0	0	2	2
		Bahan:	Bahan Material	0	0	6	6
			Konsumsi	0	0	1	1
	TEMON	Manusia:	Relawan	20	20	61	41
		Peralatan:	Peralatan bangunan	0	0	15	15
			Alat Berat	0	0	2	2
		Bahan:	Bahan Material	0	0	6	6
			Konsumsi	0	0	1	1
	TEMPURAN	Manusia:	Relawan	20	20	42	22
		Peralatan:	Peralatan bangunan	0	0	15	15
			Alat Berat	0	0	2	2
		Bahan:	Bahan Material	0	0	6	6
			Konsumsi	0	0	1	1
	TUMPAKPELEM	Manusia:	Relawan	20	20	31	11
		Peralatan:	Peralatan bangunan	0	0	15	15
			Alat Berat	0	0	2	2

TRANSISI PEMULIHAN							
NO.	TUGAS/KEGIATAN (* KEGIATAN POKOK)	SUMBERDAYA			KETERANGAN		
		KATEGORI	JENIS	KEMAMPUAN	KETERSEDIAAN	KEBUTUHAN	KESENJANGAN
		Bahan:	Bahan Material	0	0	6	6
			Konsumsi	0	0	1	1
	TUMPUK	Manusia:	Relawan	15	15	34	19
		Peralatan:	Peralatan bangunan	0	0	15	15
			Alat Berat	0	0	2	2
		Bahan:	Bahan Material	0	0	6	6
			Konsumsi	0	0	1	1
	TOTAL	Manusia:	Relawan	135	135	292	157
		Peralatan:	Peralatan bangunan	0	0	105	105
			Alat Berat	0	0	14	14
		Bahan:	Bahan Material	0	0	42	42
			Konsumsi	0	0	7	7

PROYEKSI KEBUTUHAN SUMBERDAYA KECAMATAN SLAHUNG

SIAGA DARURAT							
NO.	TUGAS/KEGIATAN (* KEGIATAN POKOK)	SUMBERDAYA			KETERANGAN		
		KATEGORI	JENIS	KEMAMPUAN	KETERSEDIAAN	KEBUTUHAN	KESENJANGAN
1	Menyiapkan tempat Evakuasi DESA CALUK	Manusia:	Tenaga	Mendirikan Tenda Pengungsian	0	6	0
		Peralatan:	Tenda	Menampung 8 Kk	0	6	0
		Bahan:	Terpal	Menampung 32 Orang	32	32	32
2	Menyiapkan tempat Evakuasi DESA SLAHUNG	Manusia:	Tenaga	Mendirikan Tenda Pengungsian	15	30	15
		Peralatan:	Tenda	Menampung 10 Kk	0	5	5
		Bahan:	Barak	Menampung 20 Orang	0	15	15
3	Menyiapkan tempat Evakuasi DESA NGILO-ILO	Manusia:	Tenaga	Mendirikan Tenda Pengungsian	8	15	0
		Peralatan:	Tenda	Menampung 8 Kk	8	15	0
		Bahan:	Terpal	Menampung 32 Orang	32	50	18
4	Menyiapkan tempat Evakuasi DESA SENEPO	Manusia:	Tenaga	Mendirikan Tenda Pengungsian	0	5	5
		Peralatan:	Terpal	Bisa Menampung Kapasitas 60 KK	0	8	8
		Bahan:	Logistik	150 Orang	0	150	150
5	Menyiapkan tempat Evakuasi DESA TUGUREJO	Manusia:	Tenaga	Mendirikan Tenda Pengungsian	Tempat	Tenda	Belum tersedianya logistik

SIAGA DARURAT							
NO.	TUGAS/KEGIATAN (* KEGIATAN POKOK)	SUMBERDAYA			KETERANGAN		
		KATEGORI	JENIS	KEMAMPUAN	KETERSEDIAAN	KEBUTUHAN	KESENJANGAN
		Peralatan:	Tenda	Bisa Menampung Kapasitas 25 KK	Tempat	Logistik	
		Bahan:	Terpal				
6	Menyiapkan Tempat Evakuasi DESA WATES	Manusia:	Tenaga	Mendirikan Tenda Pengungsian	0	5	5
		Peralatan:	Tenda	Bisa Menampung Kapasitas 15 KK	0	5	5
		Bahan:	Logistik	60 Orang	0	60	60
	Total	Manusia:	Tenaga	Mendirikan Tenda Pengungsian	23	61	25
		Peralatan:	Tenda		8	31	10
		Bahan:	Terpal		64	82	50
			Logistik			60	60
			Barak		15	15	

TANGGAP DARURAT							
NO.	TUGAS/KEGIATAN (* KEGIATAN POKOK)	SUMBERDAYA			KETERANGAN		
		KATEGORI	JENIS	KEMAMPUAN	KETERSEDIAAN	KEBUTUHAN	KESENJANGAN
1	Ambulance DESA CALUK	Manusia:	Sopir	2 orang	1 mobil	2	1
		Peralatan:	Drag Bar,P3k,Oksigen	1	1	2	1
		Bahan:	-	-	-	-	-
2		Manusia:	Sopir	2 orang	1 mobil	5	4

TANGGAP DARURAT							
NO.	TUGAS/KEGIATAN (* KEGIATAN POKOK)	SUMBERDAYA			KETERANGAN		
		KATEGORI	JENIS	KEMAMPUAN	KETERSEDIAAN	KEBUTUHAN	KESENJANGAN
	Bantuan Pangan Dan Bantuan Tenaga Kebersihan DESA SLAHUNG	Peralatan:	Drag Bar,P3k,Oksigen,	1	1	5	4
		Bahan:	-	-	-	-	-
3	Bantuan Pangan Dan Bantuan Tenaga Kebersihan DESA NGILO-ILO	Manusia:	Sopir	1 orang	1 mobil	2	1
		Peralatan:	Drag Bar,P3k,Oksigen,	1	1	2	1
		Bahan:	-	-	-	-	-
4	Ambulance DESA SENEPO	Manusia:	Sopir	2 ORANG	1	2	1
		Peralatan:	Oksigen, Dragbar, Tandu P3K	1 Orang	1	3	2
		Bahan:	-	-	-	-	-
5	Ambulance DESA TUGUREJO	Manusia:	Sopir	8 orang	1 mobil	3 mobil	-
		Peralatan:	-	-	-	-	-
		Bahan:	-	-	-	-	-
6	Ambulance DESA WATES	Manusia:	Sopir	2 ORANG	1	2	1
		Peralatan:	Oksigen, Dragbar, Tandu P3K	1 Orang	1	3	2
		Bahan:	-	-	-	-	-
Total	Total	Manusia:	Sopir	19	4	16	8
		Peralatan:	Oksigen, Dragbar, Tandu P3K	5	5	15	10
		Bahan:	-	-	-	-	-

TRANSISI PEMULIHAN							
NO.	TUGAS/KEGIATAN (* KEGIATAN POKOK)	SUMBERDAYA			KETERANGAN		
		KATEGORI	JENIS	KEMAMPUAN	KETERSEDIAAN	KEBUTUHAN	KESENJANGAN
1	Kegiatan Bidang Pertanian CALUK	Manusia:	Tenaga	bertani	2ha	3ha	1ha
		Peralatan:	Cangkul, trakctor	bertani	7	10	3
		Bahan:	Bibit	menanam	0	23	23
2	Kegiatan Bidang Pertanian SLAHUNG	Manusia:	Tenaga	bertani	4ha	5ha	1ha
		Peralatan:	Cangkul, trakctor	bertani	9	15	6
		Bahan:	Bibit	menanam	0	30	30
3	Kegiatan Bidang Pertanian NGILO- ILO	Manusia:	Tenaga	bertani	2ha	3ha	1ha
		Peralatan:	Cangkul, trakctor	bertani	8	15	7
		Bahan:	Bibit	menanam	0	23	23
4	Kegiatan Bidang Pertanian SENEPO	Manusia:	Tenaga	Bertani	10 Orang	10 Orang	0
		Peralatan:	Traktor, Cangkul	Bertani	5	5	5
		Bahan:	Bibit	Menanam	0	2500 Bibit	2500 Bibit
5	Kegiatan Bidang Pertanian TUGUREJO	Manusia:	Tenaga	Mencangkul	Lahan	Pupuk, bibit	Kelangkaan Pupuk
		Peralatan:	Cangkul,	-	-	-	-
		Bahan:	Bibit	-	-	-	-
6	Kegiatan Bidang Pertanian WATES	Manusia:	Tenaga	Bertani	10 Orang	10 Orang	0
		Peralatan:	Traktor, Cangkul	Bertani	5	5	5
		Bahan:	Bibit	Menanam	0	2500 Bibit	2500 Bibit
	TOTAL	Manusia:					
		Peralatan:					
		Bahan:					

PROYEKSI KEBUTUHAN SUMBERDAYA KECAMATAN SOOKO

SIAGA DARURAT							
NO.	TUGAS/KEGIATAN (* KEGIATAN POKOK)	SUMBERDAYA			KETERANGAN		
		KATEGORI	JENIS	KEMAMPUAN	KETERSEDIAAN	KEBUTUHAN	KESENJANGAN
1	Monitoring	Manusia:	Ketua RT	65	65	65	0
		Peralatan:	HT	4	4	65	61
			Senter	65	65	65	0
			Jas Hujan	65	65	65	0
			Sepatu Boot	2	2	65	63
			Helm	10	10	25	15
			RPU	1	1	1	0
		Bahan:	Baterai	0	0	65	65
2	Penyelamatan dan evakuasi	Manusia:	Relawan	30	30	30	0
			Tim Medis	2	2	6	4
		Peralatan:	Roda 4	4	4	8	4
			Roda 2	10	10	10	0
			Tambang	0	0	2	2
			Tandu	0	0	2	2
		Bahan:	Obat-obatan	0	0	1	1
			Rambu Evakuasi	0	0	10	10
3	Layanan Pengungsian	Manusia:	Relawan	30	30	30	0
			Tim Medis	2	2	6	4
		Peralatan:	Tenda	0	0	2	2
			Gedung	4	4	5	1
			Posko	1	1	1	0

SIAGA DARURAT							
NO.	TUGAS/KEGIATAN (* KEGIATAN POKOK)	SUMBERDAYA			KETERANGAN		
		KATEGORI	JENIS	KEMAMPUAN	KETERSEDIAAN	KEBUTUHAN	KESENJANGAN
			Sarana DU	1	1	1	0
			Sarana Transportasi	0	0	15	15
			Sarana MCK	0	0	10	10
			Terpal	0	0	10	10
			Selimut	0	0	50	50
		Bahan:	Bahan DU	0	0	1	1

TANGGAP DARURAT							
NO.	TUGAS/KEGIATAN (* KEGIATAN POKOK)	SUMBERDAYA			KETERANGAN		
		KATEGORI	JENIS	KEMAMPUAN	KETERSEDIAAN	KEBUTUHAN	KESENJANGAN
1	Evakuasi	Manusia:	Relawan	30	30	30	0
			Tim Medis	2	2	6	4
		Peralatan:	Roda 4	4	4	8	4
			Roda 2	10	10	10	0
			Tambang	0	0	2	2
			Tandu	0	0	2	2
		Bahan:	Obat-obatan	0	0	1	1
2	Layanan Pengungsian	Manusia:	Relawan	30	30	30	0
			Tim Medis	2	2	6	4

TANGGAP DARURAT							
NO.	TUGAS/KEGIATAN (* KEGIATAN POKOK)	SUMBERDAYA			KETERANGAN		
		KATEGORI	JENIS	KEMAMPUAN	KETERSEDIAAN	KEBUTUHAN	KESENJANGAN
		Peralatan:	Tenda	0	0	2	2
			Gedung	4	4	5	1
			Posko	1	1	1	0
			Sarana DU	1	1	1	0
			Sarana MCK	0	0	15	15
			Tikar	0	0	10	10
			Papan Informasi	0	0	10	10
			Tempat Sampah	0	0	50	50
			Genset	0	0	1	1
		Bahan:	Obat P3K	0	0	3	3
			Bahan DU	0	0	1	1
		3	Penanganan Dampak Buruk Bencana	Manusia:	Warga	100	100
Peralatan:	Cangkul			20	20	20	0
	Artco			0	0	10	10
	Gergaji Mesin			0	0	1	1
	Alat Berat			0	0	1	1
	Tambang			0	0	1	1
Bahan:	Konsumsi			0	0	100	100

TRANSISI PEMULIHAN							
NO.	TUGAS/KEGIATAN (* KEGIATAN POKOK)	SUMBERDAYA			KETERANGAN		
		KATEGORI	JENIS	KEMAMPUAN	KETERSEDIAAN	KEBUTUHAN	KESENJANGAN
1	Rehabilitasi dan Rekonstruksi	Manusia:	Relawan	30	30	30	0
		Peralatan:	Peralatan bangunan	0	0	20	20
			Alat Berat	0	0	1	1
		Bahan:	Bahan Material	0	0	10	10
			Konsumsi	0	0	100	100

PROYEKSI KEBUTUHAN SUMBERDAYA KECAMATAN NGEHEL

SIAGA DARURAT							
NO.	TUGAS/KEGIATAN (* KEGIATAN POKOK)	SUMBERDAYA			KETERANGAN		
		KATEGORI	JENIS	KEMAMPUAN	KETERSEDIAAN	KEBUTUHAN	KESENJANGAN
1	Monitoring	Manusia:	Ketua RT	34	34	34	0
		Peralatan:	HT	4	4	34	30
			Senter	20	20	40	20
			Jas Hujan	20	20	40	20
			Sepatu Boot	20	20	40	20
			Helm	20	20	40	20
			RPU	1	1	1	0
		Bahan:	Baterai	0	0	40	40
2	Penyelamatan dan evakuasi	Manusia:	Relawan	10	10	40	30
			Tim Medis	3	3	6	3

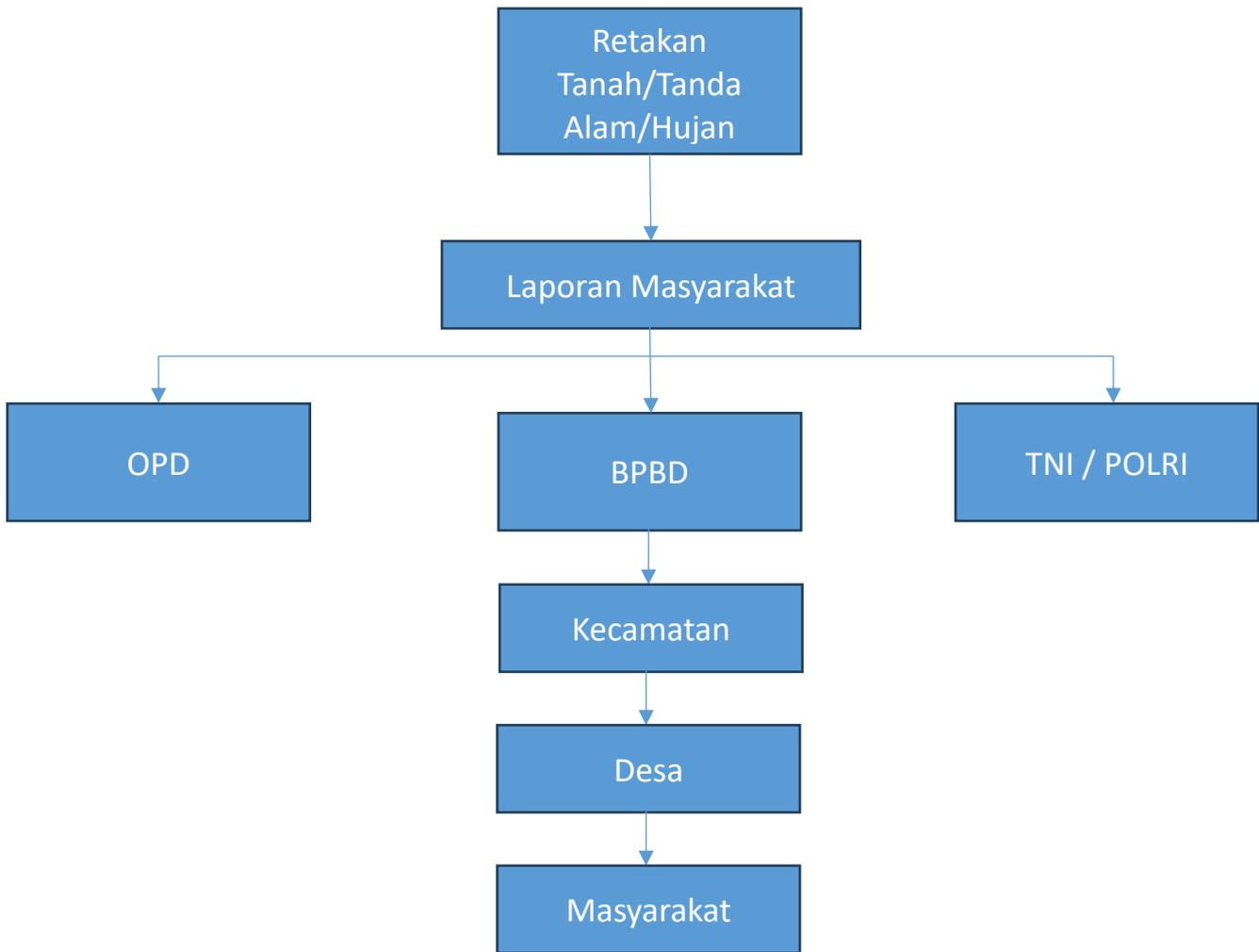
SIAGA DARURAT							
NO.	TUGAS/KEGIATAN (* KEGIATAN POKOK)	SUMBERDAYA			KETERANGAN		
		KATEGORI	JENIS	KEMAMPUAN	KETERSEDIAAN	KEBUTUHAN	KESENJANGAN
3	Layanan Pengungsian	Peralatan:	Roda 4	1	1	4	3
			Roda 2	3	3	5	2
			Tambang	0	0	2	2
			Tandu	0	0	2	2
		Bahan:	Obat-obatan	0	0	1	1
			Rambu Evakuasi	5	5	10	5
		Manusia:	Relawan	30	30	40	10
			Tim Medis	3	3	5	2
		Peralatan:	Tenda	3	3	5	2
			Gedung	1	1	2	1
			Posko	1	1	1	0
	Sarana DU	0	0	10	10		
	Sarana Transportasi	0	0	15	15		
	Sarana MCK	0	0	10	10		
	Terpal	3	3	12	9		
	Selimut	0	0	50	50		
Bahan:	Bahan DU	0	0	1	1		

TANGGAP DARURAT							
NO.	TUGAS/KEGIATAN (* KEGIATAN POKOK)	SUMBERDAYA			KETERANGAN		
		KATEGORI	JENIS	KEMAMPUAN	KETERSEDIAAN	KEBUTUHAN	KESENJANGAN
1	Evakuasi	Manusia:	Relawan	10	10	40	30
			Tim Medis	3	3	6	3
		Peralatan:	Roda 4	1	1	4	3
			Roda 2	3	3	5	2
			Tambang	0	0	2	2
			Tandu	0	0	2	2
		Bahan:	Obat-obatan	0	0	1	1
			Rambu Evakuasi	5	5	10	5
2	Layanan Pengungsian	Manusia:	Relawan	20	20	30	10
			Tim Medis	3	3	5	2
		Peralatan:	Tenda	3	3	5	2
			Gedung	1	1	2	1
			Posko	1	1	1	0
			Sarana DU	0	0	1	1
			Sarana MCK	0	0	10	10
			Tikar	0	0	30	30
			Papan Informasi	0	0	1	1
			Tempat Sampah	0	0	10	10
			Genset	1	1	2	1
		Bahan:	Obat P3K	50	50	100	50

TANGGAP DARURAT							
NO.	TUGAS/KEGIATAN (* KEGIATAN POKOK)	SUMBERDAYA			KETERANGAN		
		KATEGORI	JENIS	KEMAMPUAN	KETERSEDIAAN	KEBUTUHAN	KESENJANGAN
			Bahan DU	0	0	1	1
3	Penanganan Dampak Buruk Bencana	Manusia:	Warga	50	50	100	50
		Peralatan:	Cangkul	0	0	10	10
			Artco	0	0	10	10
			Gergaji Mesin	0	0	1	1
			Alat Berat	0	0	1	1
			Tambang	0	0	10	10
		Bahan:	Konsumsi	0	0	1	1

TRANSISI PEMULIHAN							
NO.	TUGAS/KEGIATAN (* KEGIATAN POKOK)	SUMBERDAYA			KETERANGAN		
		KATEGORI	JENIS	KEMAMPUAN	KETERSEDIAAN	KEBUTUHAN	KESENJANGAN
1	Rehabilitasi dan Rekonstruksi	Manusia:	Relawan	30	30	100	70
		Peralatan:	Peralatan bangunan	0	0	10	10
			Alat Berat	0	0	1	1
		Bahan:	Bahan Material	0	0	10	10
			Konsumsi	0	0	1	1

Lampiran 7. Peringatan Dini dan Status Tanggap Darurat



Gambar 4. Struktur Peringatan Dini dan Status Tanggap Darurat

Lampiran 8. Rencana Evakuasi

LOKASI TEMPAT EVAKUASI KECAMATAN NGRAYUN

No	Kecamatan	Desa	Tempat Evakuasi	Lintang	Bujur
1	Ngrayun	Baosan Kidul	Balai Desa	8'12245	111'4002E
2		Baosan Lor	Balai Desa	8'05217356	111'254
3		Binade	Balai Desa	8'078718	111'360318
4		Cepoko	Balai Desa	8'04'13,962	111'30'18,342
5		Gedangan	Balai Desa	8'09'26,424	111'25'17,8572
6		Desa Mrayan	Balai Desa	8'5'29,109	111'589945
7		Ngrayun	Balai Desa	8'0425,86	111,20,512988
8		Selur	Balai Desa Selur	8.094291	111470348
9		Desa Sendang	Balai Desa	8'144709885	111.43662872E
10		Temon	Balai Desa	8'06358619	111'27292032
11		Wonodadi	Balai Desa	8'09279828	111'273.368

LOKASI TEMPAT EVAKUASI KECAMATAN PUDAK

No	Kecamatan	Desa	Tempat Evakuasi	Lintang	Bujur
1	Pudak	Banjarejo	Balai Desa	-7 53 0, 59784 S	111 42 28, 814 E
2		Bareng	Balai Desa	-788,325.00	11,169,288
3		Krisik	Balai Desa	-75,159,814.00	1114230342"
4		Pudak Kulon	Balai Desa Pudak Kulon	-7,8705S	+111,7128E194S
5		Pudak Wetan	Balai Desa Pudakwetan	7.21'-7.31' LS	111.10'-111.40' BT
6		Tambang	Balai Desa	-7,872,592,837,840,970	11,170,070,536,783,200
7					

LOKASI TEMPAT EVAKUASI KECAMATAN PULUNG

No	Kecamatan	Desa	Tempat Evakuasi	Lintang	Bujur
1	Pulung	Bekiring	Tenda darurat	-7,849,049	111.659055
2		Munggung	Balai Desa	7865557	111633062
3		Munggung	Balai Dukuh	7857744	111635621
4		Wayang	balai desa	78510	11161719
5					

LOKASI TEMPAT EVAKUASI KECAMATAN BADEGAN

No	Kecamatan	Desa	Tempat Evakuasi	Lintang	Bujur
1	Badegan	Dayakan	Kantor Kepala Desa Dayakan	7°54'55.2"S	111°18'08.8"E
2		Dayakan	Lapangan Desa Dayakan	7°54'45.2"S	111°18'18.1"E
3		Dayakan	Halaman SDN 2 Dayakan	7°54'43.6"S	111°18'03.5"E

LOKASI TEMPAT EVAKUASI KECAMATAN SAWOO

No	Kecamatan	Desa	Tempat Evakuasi	Lintang	Bujur
1	Sawoo	Sawoo	Balai Desa		
2		Sriti	Pasar Desa		
3		Temon	Balai Desa		
4		Tempuran	Balai Desa Tempuran		
5		Tumpakpelem	Balai Desa		
6		Tumpuk	Tk Dharma Wanita		
7		Pangkal			

LOKASI TEMPAT EVAKUASI KECAMATAN SLAHUNG

No	Kecamatan	Desa	Tempat Evakuasi	Lintang	Bujur
1	Slahung	Caluk	Balai Desa	-803,831	11,140,099,237
2		Slahung	Kantor Desa	-8.032623	111.41495
3		Ngilo-Ilo	Kantor Desa	-7.9893570	111.3776430
4			Sdn 2 Ngilo-Ilo	-7.994525	111.368521
5			Sdn 3 Ngilo-Ilo	-8.002158	111.360943
6		Senepo	Balai Desa	80,430,345	111.3913395E
7		Wates	Balai Desa	8.0153 S	111.37954333333333 E

LOKASI TEMPAT EVAKUASI KECAMATAN SOOKO

No	Kecamatan	Desa	Tempat Evakuasi	Lintang	Bujur
1	Sooko	Jurug	Kantor Kepala Desa Jurug		
2	Sooko	Jurug	SDN Jurug		
3					
4					
5					
6					
7					

LOKASI TEMPAT EVAKUASI KECAMATAN NGEBEL

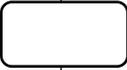
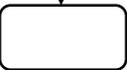
No	Kecamatan	Desa	Tempat Evakuasi	Lintang	Bujur
1	NGEBEL	TALUN	Kantor Kepala Desa Talun Halaman SDN talun		
2		Desa Ngrogung	Kanto Balai Desa Ngrogung		
3		Desa Pupus	Kanto Balai Desa Pupus		
4		Desa Gondowido	Kanto Balai Desa Gondowido		
5		Desa Sahang	Kanto Balai Desa Sahang		
6		Desa Wagir Lor	Kanto Balai Desa Wagir Lor		
7		Desa Ngebel	Kanto Balai Desa Ngebel		
			Lapangan Kecamatan Ngebel		

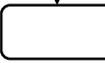
No	Kecamatan	Desa	Tempat Evakuasi	Lintang	Bujur
8		Desa Sempu	Kanto Balai Desa Sempu		

Lampiran 9. SOP / Prosedur Tetap

No	Kegiatan	Pelaksana						Mutu Baku		
		Petugas PUSDALOPS-PB	Kepala Seksi BPBD	Kepala Pelaksana BPBD	TRC (Tim Reaksi Cepat)	Tim Komando Penanganan Darurat Bencana	Bupati	Kelengkapan	Waktu	Output (Keluaran)
1	Menerima dan memastikan informasi masuk tentang kejadian bencana dan melaporkan ke Kepala Seksi BPBD		↓					Laporan Kejadian Bencana	2 menit.	Laporan kejadian bencana
2	Menerima Informasi kejadian bencana kemudian melaporkan kepada Kepala Pelaksana BPBD			↓				Laporan Kejadian Bencana	1 menit	Laporan kejadian bencana
3	Menerima informasi kejadian bencana kemudian menginstruksikan Tim Reaksi Cepat (TRC) dan mengeluarkan surat tugas untuk TRC yang ditugaskan.				↓			Form standar kaji cepat	5 menit	SPT TRC
4	Melakukan kaji cepat kejadian bencana, korban, kerusakan dan respon evakuasi korban.					↓		Laporan Kejadian Bencana	3 Jam	Hasil kaji cepat

No	Kegiatan	Pelaksana						Mutu Baku		
		Petugas PUSDALOPS-PB	Kepala Seksi BPBD	Kepala Pelaksana BPBD	TRC (Tim Reaksi Cepat)	Tim Komando Penanganan Darurat Bencana	Bupati	Kelengkapan	Waktu	Output (Keluaran)
5	Melaporkan hasil kaji cepat TRC kepada Bupati/ pimpinan tertinggi di tingkat Kabupaten.						↓ □	Laporan hasil kaji cepat Kejadian Bencana	1 jam	Rekomendasi dan tindak lanjut hasil kaji cepat.
6	Melakukan rapat koordinasi dengan instansi terkait dan Forkopimda untuk menentukan skala kejadian bencana.						↓ □	Hasil kaji cepat TRC.	1 jam	Skala kejadian dan status bencana
7	Menetapkan dan mempublikasikan status bencana yang terjadi.						↓ □	Status bencana	1 Jam	Status bencana resmi. Pemerintah dan masyarakat bersiap untuk tanggap darurat.
8	Menetapkan struktur organisasi Komando Penanganan Darurat Bencana Tanah Longsor .						↓ □	Draft struktur Komando penanganan darurat bencana.	2 Jam	SK Struktur Organisasi Komando Penanganan Darurat Bencana.

No	Kegiatan	Pelaksana						Mutu Baku		
		Petugas PUSDALOPS-PB	Kepala Seksi BPBD	Kepala Pelaksana BPBD	TRC (Tim Reaksi Cepat)	Tim Komando Penanganan Darurat Bencana	Bupati	Kelengkapan	Waktu	Output (Keluaran)
9	Menyusun Rencana Operasi (RENOPS) strategis, operasional dan taktis, mengkoordinasikan, melaksanakan dan mengendalikan operasi tanggap darurat.							Draft Rencana Operasi (RENOPS) Penanganan Darurat bencana.	2 Jam	Rencana Operasi Penanganan Darurat Bencana Tanah Longsor.
10	Menjalankan rencana operasi bidang SAR dan pos lapangan, Pengungsian dan Perlindungan, dan bidang logistik.							Rencana Operasi.	Tentatif Selama fase tanggap darurat.	Rencana Operasi masing – masing bidang.
11	Melaksanakan rapat strategis untuk peralihan fase transisi darurat menuju tahapan rehabilitasi dan rekonstruksi.							Laporan situasi kondisi pengungsian	Pelaksanaan maksimal 1 minggu sebelum fase tanggap darurat selesai dengan durasi 2 Jam	Kerangka Acuan Kerja (KAK) penyusunan JITUPASNA dan R3P (Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi).

No	Kegiatan	Pelaksana						Mutu Baku		
		Petugas PUSDALOPS-PB	Kepala Seksi BPBD	Kepala Pelaksana BPBD	TRC (Tim Reaksi Cepat)	Tim Komando Penanganan Darurat Bencana	Bupati	Kelengkapan	Waktu	Output (Keluaran)
12	Melaporkan pengakhiran masa tanggap darurat kepada Gubernur.							Laporan situasi penanganan darurat bencana	2 Jam	Rekomendasi SK Kepala Daerah tentang fase transisi darurat.
13	Menetapkan Surat Keputusan Penanganan Bencana memasuki tahapan transisi.							SK Kepala Daerah tentang fase transisi darurat.	30 Menit	SK Kepala Daerah tentang fase transisi darurat.

1. PROSEDUR TETAP PERAN PEMANGKU KEPENTINGAN DALAM SISTEM PERINGATAN DINI

No	Saran Tindak Evakuasi Masyarakat	Status PDB Waspada	PDB Status Siaga	Status Tanggap Darurat
1	BPPKAD	Berkoordinasi dengan BPBD untuk status peringatan dini yang diberlakukan.	Koordinasi dengan Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat, Pelaku Dunia Usaha untuk mengakses BTT Provinsi/BK Provinsi dalam bentuk Hibah, Dana Siap Pakai (DSP) dan dana <i>Corporate Social Responsibility (CSR)</i> dari lembaga usaha.	Memastikan adanya SKPDB yang sudah disahkan oleh Bupati sebagai dasar untuk implementasi operasional penggunaan dana dalam tanggap darurat.
		Menjalankan protokol untuk memastikan ketersediaan anggaran/dana BTT yang bersumber dari APBD untuk tanggap darurat.	Mulai identifikasi prosedur aksesibilitas dan pola pelaporan dana dalam tanggap darurat.	Terlaksananya percepatan alokasi dana BTT kepada OPD yang membutuhkan sesuai dengan tugas dan fungsi dalam SKPDB dan mengacu pada pedoman pelaporan penggunaan dana dalam operasi tanggap darurat.
2	Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Ponorogo	Berkoordinasi dengan BPBD terkait harmonisasi produk hukum daerah	Berkoordinasi dengan BPBD terkait harmonisasi produk hukum daerah	Berkoordinasi dengan BPBD terkait harmonisasi produk hukum daerah
3	DINAS INDAKOP	Kordinasi dengan BPBD tentang status bencana tanah longsor	Koordinasi dgengan kecamatan, Desa terhadap usaha di bidang	Pendataan terhadap Koperasi, IKM dan

			Koperasi,IKM dan Umkm terdampak tanah longsor	UMKMterdampak tanah longsor
			Koordinasi dengan dinas Ketahanan pangan tetang kondisi stoc pangan yg tersedia	pengecekan lapangan terhadap tersedianya stock kebutuhan dasar
4	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Berkoordinasi dengan BPBD untuk status sistem peringatan dini yang diberlakukan.	Memastikan tersedianya prosedur alur sistem data kependudukan yang tedampak Tanah Longsor yang dibutuhkan dalam operasi tanggap darurat.	Membantu identifikasi data penduduk terdampak.
		Memastikan ketersediaan data base kependudukan seluruh kecamatan wilayah yang berpotensi terdampak Tanah Longsor.	Membantu identifikasi data penduduk terdampak.	Memastikan adanya pejabat dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil berada di dalam struktur SKPDB khususnya Pusat Data dan Bidang Perlindungan Pengungsian khususnya dalam manajemen informasi Seksi Koordinasi dan Manajemen Tempat Pengungsian.
		Menentukan format baku data terpilah yang akan dijadikan acuan baik posko maupun pos lapangan dalam tanggap darurat.		

5	Dinas Kesehatan	Berkoordinasi dengan BPBD untuk perkembangan status.	Mensiagakan SDM Kesehatan.	Penilaian cepat Kesehatan/ RHA (Rapid Health Assessment).
		Mengaktivasi tim manajemen krisis Kesehatan.	Menyiapkan obat-obatan.	Mobilisasi tim kegawatdaruratan medis/ Disaster Medical Team (DMT).
		Menginventarisir SDM Kesehatan.	Menyiapkan alat-alat Kesehatan.	Mobilisasi logistik Kesehatan.
		Menginventarisir obat-obatan.	Menyiapkan fasilitas pelayanan Kesehatan.	Mobilisasi relawan Kesehatan.
		Menginventarisasi alat-alat kesehatan menginventarisasi fasilitas pelayanan kesehatan (Puskesmas, rumah sakit, klinik) menginventarisasi ambulan, menginventarisasi Kendaraan/mobil.	Menyiapkan fasilitas isolasi dan karantina Kesehatan.	Memberikan pelayanan Kesehatan.
		Distribusi obat- obatan melakukan perawatan ambulan dan mobil distribusi obat-obatan, melakukan pelatihan kesiapsiagaan bencana menyiapkan disaster medical team (DMT) koordinasi dengan rumah sakit terkait dengan tempat rujukan.	Menyiapkan ambulan.	Memastikan pelaksanaan protokol Kesehatan Covid-19.
			Menyiapkan mobil untuk distribusi obat-obatan.	Melaksanakan komunikasi krisis Kesehatan.

			Assesment tempat pelayanan Kesehatan.	Melaksanakan komunikasi risiko.
			Mendirikan fasilitas Kesehatan darurat jika diperlukan.	Melaksanakan promosi Kesehatan di lokasi pengungsian.
6	Dinas Lingkungan Hidup	Berkoordinasi dengan BPBD terkait dengan sistem peringatan dini yang diaktivasi	Menginformasikan kepada masyarakat sekitar untuk evakuasi, khususnya kelompok rentan (bayi, balita, anak-anak, ibu hamil, ibu menyusui, penyandang disabilitas, lansia, orang dengan penyakit bawaan/komorbid/menular, perempuan kepala keluarga, anak-anak kepala keluarga).	Membantu proses evakuasi warga sekitar ke tempat yang lebih aman
		Diseminasi sistem peringatan dini kepada masyarakat sekitar		Implementasi rencana pengelolaan limbah/sampah di posko SKPDB dan pos lapangan pengungsian yang sudah ditentukan
		Menyiapkan sarana dan prasarana serta SDM untuk menangani pengelolaan limbah/sampah pasca bencana		Mengakomodir kendala teknis evakuasi pengelolaan limbah/sampah

		Melakukan identifikasi rencana pengelolaan limbah/sampah di lokasi pengungsian		
7	Perhutani KPH Lawu DS:			
	Segera tinggalkan gedung atau bangunan	Mengarahkan masyarakat untuk menjauhi lokasi rawan bencana	Memahami status bahaya di sekitar	Segera tinggalkan gedung atau bangunan
	Berlarilah sesuai arah petunjuk jalur evakuasi	Memberi informasi kepada masyarakat terkait terkait potensi bencana	Memahami sistem peringatan dini	Hindari kepanikan
	Jangan membuat rumah di pingir sungai, tebing	Memberi saran untuk segera mengungsi	Mengetahui rute jalur evakuasi	Ikuti petunjuk instruktur dan komando
	Tidak melakukan penebangan hutan/pohon secara ilegal		Memiliki ketrampilan untuk evakuasi dan inisiatif untuk melindungi diri	Membunyikan sistem informasi dini/ alarm
	Buanglah sampah pada tempatnya		Melakukan mitigasi	
	Rajin membersihkan selokan saluran air		Melakukan pelatihan	
8	Perum Perhutani KPH Madiun :			
	Segera tinggalkan gedung atau bangunan	Mengarahkan masyarakat untuk menjauhi lokasi rawan bencana	Memahami status bahaya di sekitar	Segera tinggalkan gedung atau bangunan

	Berlarilah sesuai arah petunjuk jalur evakuasi	Memberi informasi kepada masyarakat terkait potensi bencana	Memahami sistem peringatan dini	Hindari kepanikan
	Jangan membuat rumah di pingir sungai, tebing	Memberi saran untuk segera mengungsi	Mengetahui rute jalur evakuasi	Ikuti petunjuk instruktur dan komando
	Tidak melakukan penebangan hutan/penggarapan lahan hutan secara ilegal		Memiliki ketrampilan untuk evakuasi dan inisiatif untuk melindungi diri	Membunyikan sistem informasi dini/ alarem
	Buanglah sampah pada tempatnya		Melakukan mitigasi	
	Rajin membersihkan selokan saluran air		Melakukan pelatihan	
9	Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ponorogo:	Koordinasi dengan BPBD terkait status sistem peringatan dini	Penyiapan dan pengumpulan personil Satpol PP dan Linmas (Kecamatan/Desa)	Membantu keamanan dan ketertiban di sekitar lokasi bencana
	Pembunyian alarm atau pengumuman bencana oleh petugas Tanggap Darurat Bencana	Koordinasi dengan Kecamatan dan Desa terkait potensi Linmas		Membantu relokasi warga yang terdampak
		Penyiapan semua peralatan dan pendukungnya		Membantu renovasi rumah warga pasca bencana
1	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan	Berkoordinasi dengan BPBD tingkat Kabupaten untuk langkah peringatan dini yang harus dilakukan.	Berkoordinasi dengan petugas pertanian ditingkat lapangan yang kena dampak	Dinas dan semua petugas pertanian ditingkat lapangan untuk melakukan pendataan semua kerusakan lahan

			untuk membantu evakuasi semua yang kena dampak	pertanian diwilayah dampak bencana
		Berkoordinasi dengan petugas pertanian ditingkat lapangan yang kena dampak bencana untuk informasi peringatan dini	Menyiapkan armada yang tersedia untuk proses evakuasi	Memastikan stok pangan yang ada dalam tanggap darurat yang siap di distribusikan kelokasi bencana
2	FPRB Kabupaten Ponorogo:			
	Selalu mengedepankan perasaan			
	Memahami perasaan korban			
3	Kodim 0802/Ponorogo	Berkoordinasi dengan BPBD untuk mengfungsikan sistem peringatan dini serta memaksimalkan peran dan fungsi Babinsa dalam system peringatan bencal khususnya di wilayah yang terdampak	Memastikan sistim peringatan dini berfungsi dan aksesible terhadap ragam disabilitas(Suara,Cahaya dan Teks)	Mengerahkan sumber daya alat personil untuk evakuasi warga di wilayah terdampak
		Menyiapkan sarana dan prasana pemeliharaan pengecekan peralatan himbauan kepada masyarakat untuk bersiap evakuasi	Pengorganisasian personil menyiapkan sarana dan prasarana serta peralatan evakuasi serta menyiapkan posko bencana	Melaksanakan Evakuasi terhadap korban bencana
			Berkoordinasi dengan BPBD untuk operasi evakuasi	Melaksanakan pengamanan selama proses evakuasi

				Melaksanakan pendataan personil dan materiel
				Berkoordinasi dengan BPBD dan mengikuti intruksi struktur komando PDB
4	Palang Merah Indonesia Kabupaten Ponorogo:	Mulai Mengecek Perlengkapan	Persiapan evakuasi	Pengerahan dan Evakuasi Masyarakat
	Masyarakat diharapkan dapat memanfaatkan sarana yang ada disekitarnya sebagai sumber informasi dan komunikasi			
5	Dinas Pendidikan Kabupaten Ponorogo	<ul style="list-style-type: none"> • Berkoodinasi dengan BPBD untuk sistem peringatan dini ke seluruh sekolah di wilayah terdampak • Koordinasi dengan Satuan Kerja Pendidikan dalam situasi darurat • Mulai melaksanakan pendataan SDM guru, siswa, dan fasilitas yang berada di wilayah berpotensi terdampak 	Memastikan seluruh penyelenggara Pendidikan sekolah untuk menginstruksikan evakuasi ke tempat aman dari tanah longsor	<ul style="list-style-type: none"> • Kaji cepat kebutuhan Pendidikan dalam situasi darurat, pemilihan lokasi, termasuk perijinan tanah dan atau lahan • Melaksanakan rencana penyelenggaraan Pendidikan dalam situasi darurat yang mengacu pada standar – standar pemenuhan hak Pendidikan anak di daerah bencana :

				<p>Ketersediaan dan keterjangkauan fasilitas Pendidikan dan fasilitas pendukungnya</p> <p>Pendidikan ramah anak dan inklusif</p> <p>Kebutuhan peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mengkoordinasikan bantuan di sektor Pendidikan dari lembaga pemerintah dan non-pemerintah
		<ul style="list-style-type: none"> • Pengadaan dan penyiapan media, alat belajar dan alat-alat bermain anak untuk layanan Pendidikan dalam situasi darurat • Memastikan sistem peringatan dini yang dijalankan aksesibel terhadap ragam disabilitas (cahaya, suara, dan teks) 	<p>Penyiapan strategi layanan pendidikan bagi peserta didik korban bencana</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Pendataan dan penyiapan SDM mengajar di wilayah terdampak dan tidak terdampak • Pendistribusian alat, sarana prasarana belajar mengajar • Pengkoordinasian bantuan sarana dan prasarana Pendidikan • Strategi yang dirancang berkaitan layanan pendidikan bagi peserta didik korban bencana

6	RSUD Dr. Harjono S. Ponorogo	Melakukan Koordinasi dengan BPBD terkait bencana tanah longsor yang mungkin atau sedang terjadi	Menetapkan prosedur pelayanan darurat Kesehatan, mobilisasi peralatan, dan obat-obatan yang akan digunakan untuk penanganan bencana yang terjadi.	Mengirim Tim yang telah ditunjuk dalam penanganan bencana tanah longsor
			Menentukan petugas yang ditunjuk guna berkoordinasi dengan BPBD dan instansi yang terlibat pada penanggulangan bencana	Melakukan penanganan korban yang dibawa ke RSUD
				Mengikuti arahan dari BPBD

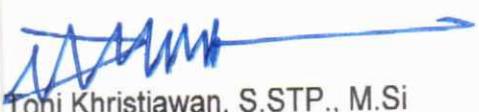


PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Jalan Sekar Putih Timur 32, Ponorogo, Jawa Timur 63418
Telepon 0352-463232, Faksimile 0352-463232
Laman bpbd.ponorogo.go.id, Pos-el bpbd.kabponorogo@gmail.com

LEMBAR KOMITMEN
RENCANA KONTINGENSI BENCANA TANAH LONGSOR
KABUPATEN PONOROGO PROVINSI JAWA TIMUR
TAHUN 2023

Pada hari ini kamis, 26 Oktober 2023 bertempat di Ndalem Katong, kami yang bertandatangan di bawah ini, menyatakan akan melaksanakan langkah-langkah dan kegiatan yang tertuang di dalam Rencana Tindak Lanjut dalam Rencana Kontingensi Tanah Longsor Kabupaten Ponorogo Provinsi Jawa Timur.

<p>Bupati Ponorogo</p>  <p>H. Sugiri Sancoko, S.E., M.M</p>	<p>Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Ponorogo</p>  <p>Masun, S.Pt., MP., MA., M.Ec. Dev NIP. 19750705 200212 1 008</p>
<p>DANDIM 0802 Ponorogo</p>  <p>LetKol. Hirta Juni A, S.Sos., M.Han NRP. 11030035600682</p>	<p>KAPOLRES Ponorogo</p> <p>AKBP Wimboko, S.I.K, M.Si NRP. 78121238</p>
<p>Plt. Kepala Dinas Pertanian Ketahanan Pangan dan Perikanan</p>  <p>Drs. Herry Sutrisno NIP. 19660606 198603 1 016</p>	<p>Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil</p>  <p>Drs. Herry Sutrisno NIP. 19660606 198603 1 016</p>
<p>Camat Slahung</p>  <p>TONI KHRESTIAWAN, S.STP., M.Si NIP. 19761213 199511 1 001</p>	<p>Camat Ngrayun</p>  <p>Bambang Sucipto P, S.Sos NIP. 19671230 199202 1 001</p>

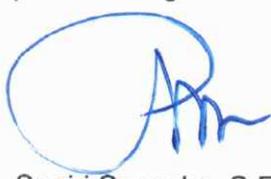
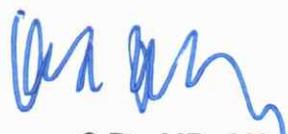
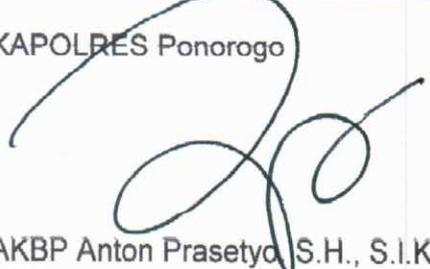


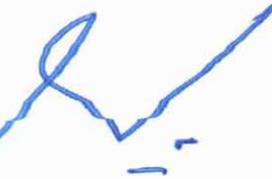
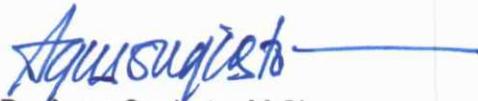
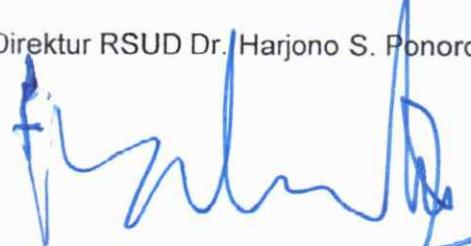
PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Jalan Sekar Putih Timur 32, Ponorogo, Jawa Timur 63418
Telepon 0352-463232, Faksimile 0352-463232
Laman bpbd.ponorogo.go.id, Pos-el bpbd.kabponorogo@gmail.com

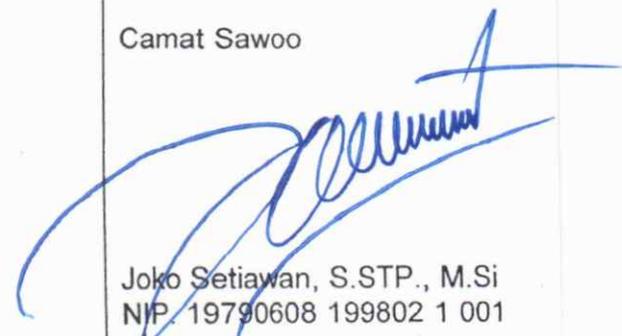
**LEMBAR KOMITMEN
RENCANA KONTINGENSI BENCANA TANAH LONGSOR
KABUPATEN PONOROGO PROVINSI JAWA TIMUR
TAHUN 2023**

Pada hari ini kamis, 26 Oktober 2023 bertempat di Ndalem Katong, kami yang bertandatangan di bawah ini, menyatakan akan melaksanakan langkah-langkah dan kegiatan yang tertuang di dalam Rencana Tindak Lanjut dalam Rencana Kontingensi Tanah Longsor Kabupaten Ponorogo Provinsi Jawa Timur.

Bupati Ponorogo  H. Sugiri Sancoko, S.E., M.M	Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Ponorogo  Masun, S.Pt., MP., MA, M.Ec. Dev NIP. 19750705 200212 1 008
DANDIM 0802 Ponorogo LetKol. Hirta Juni A, S.Sos., M.Han NRP. 11030035600682	KAPOLRES Ponorogo  AKBP Anton Prasetyo, S.H., S.I.K., M.Si. NRP. 82030988
Plt. Kepala Dinas Pertanian Ketahanan Pangan dan Perikanan  Drs. Herry Sutrisno NIP. 19660606 198603 1 016	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil  Drs. Herry Sutrisno NIP. 19660606 198603 1 016
Camat Slahung Toni Khristiawan, S.STP., M.Si NIP. 19761213 199511 1 001	Camat Ngrayun Bambang Sucipto P, S.Sos NIP. 19671230 199202 1 001

<p>Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ponorogo</p>  <p>Gulang Winarno, S.H., MM NIP. 19730725 199602 1 002</p>	<p>Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Ponorogo</p>  <p>Judha Slamet Sarwo Edi, S.Sos. M.Si NIP. 19690919 199402 1 002</p>
<p>Kepala Dinas Sosial, P3A Kabupaten Ponorogo</p>  <p>Supriadi, S.Sos., M.Si NIP. 19680708 198903 1 012</p>	<p>Kepala Bappeda Litbang Kabupaten Ponorogo</p>  <p>Dr. Agus Sugiarto, M.Si NIP. 196804131988091002</p>
<p>Direktur RSUD Dr. Harjono S. Ponorogo</p>  <p>Dr. Yunus Mahatma, Sp.PD</p>	<p>Camat Badegan</p>  <p>Muhammad Muhlas, S.Sos. MM NIP. 19680620 199003 1 016</p>
<p>Ketua FPRB Kabupaten Ponorogo</p>  <p>Ir. Muhamad Kujaeny</p>	<p>Camat Ngebel</p>  <p>Andri Hendhratmoyo, ST., MM, MT NIP. 19800110 200604 1 018</p>

<p>Adminstratur Perhutani KPH Lawu DS</p>  <p>Agus Ahmad Fadoli, S.Hut PHT. 19810814200608100</p>	<p>Administratur Perum Perhutani KPH Madiun</p>  <p>Panca Putra M. SIHITE, S.Hut., M.Sc NIP. PHT.197505122007100</p>
<p>Kasatpol PP Kabupaten Ponorogo</p>  <p>Drs. Joko Waskito, M.Si NIP. 19680506 198809 1 001</p>	<p>Kabag Hukum Setda Kabupaten Ponorogo</p>  <p>Soegeng Prakoso, S.H., M.H NIP. 19680605 199303 1 003</p>
<p>Camat Sooko</p>  <p>M. LUQMAN WAKHIDI, S.STP NIP. 19740930 199402 1 004</p>	<p>Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Ponorogo</p>  <p>Dyah Ayu P, S.KM, MKes NIP. 19760206 200212 2 012</p>
<p>Camat Puduk</p>  <p>Suwadi, S.H., M.H NIP. 19680508 199003 1 010</p>	<p>Camat Pulung</p>  <p>Sudarsono, S.Sos., MM NIP. 19700502 199203 1 007</p>

<p>Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Ponorogo</p>  <p>Jamus Kunto Pornomo NIP. 19681018 199703 1 009</p>	<p>Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ponorogo</p>  <p>Drs. H. Nurhadi Hanuri, MM NIP. 19670331 199303 1 005</p>
<p>Kepala Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Ponorogo</p>  <p>Ringga Dwi Heri I, S.STP., M.Si NIP. 19751509 199603 1 001</p>	<p>Kepala Dinas BPPKAD Kabupaten Ponorogo</p>  <p>Ir. H. SUMARNO, MM NIP. 19650812 199202 1 004</p>
<p>Camat Sambit</p>  <p>Etik Mudarifah, S.STP., M.Si NIP. 19770301 199511 2 001</p>	<p>Camat Sawoo</p>  <p>Joko Setiawan, S.STP., M.Si NIP. 19790608 199802 1 001</p>
<p>Ketua PMI Kabupaten Ponorogo</p>  <p>Drs. H. Luhur Karsanto, M.Si</p>	